



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI  
PROGRAM PASCASARJANA

**PERAN JURNALISME WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)  
SEBAGAI ELEMEN *CIVIL SOCIETY* DALAM PENGUATAN  
DEMOKRASI DI INDONESIA  
(STUDI TENTANG POLITIKANA.COM)**

TESIS

NAMA : RR. SATITI SHAKUNTALA  
NPM : 0706185004  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN KOMUNIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Sains Dalam Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

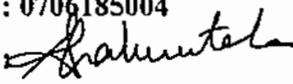
Jakarta  
2009



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI  
PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Rr. Satiti Shakuntala  
**NPM** : 0706185004  
**Tanda Tangan** :   
**Tanggal** : 7 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Rr. Satiti Shakuntala  
NPM : 0706185004  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Tesis : Peran Jurnalisme Warga (*Citizen Journalism*)  
Sebagai Elemen *Civil Society* dalam Penguatan  
Demokrasi di Indonesia (Studi tentang  
Politikana.com)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dedy Nur Hidayat, PhD .....  
Penguji Ahli : Anne Suryani, M.Si, MED .....  
Ketua Sidang : Dr. Ade Armando .....  
Sekretaris Sidang : Eduard Lukman, MA .....

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 07 Juli 2009

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini meskipun dengan jalan yang berliku dan penuh tantangan.

Dalam ketidaksempurnaannya, tesis ini merupakan ekspresi ketertarikan saya dalam melihat aktivitas Jurnalisme Warga (*Citizen Journalism*) yang saat ini sedang merebak di dalam masyarakat yang memanfaatkan sarana teknologi komunikasi khususnya internet untuk dapat berbagai cerita melalui tulisan. Kebebasan warga untuk berpendapat melalui aktivitas *citizen journalism* khususnya di era reformasi ini sangat menarik untuk dikaji sebagai salah satu elemen dalam *civil society* yang berperan dalam penguatan demokrasi di Indonesia.

Banyak pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedy Nur Hidayat, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini; Staf pengajar dan semua karyawan Program studi Ilmu Komunikasi Kekhususan Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia; Para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya, Bapak Daniel Dhakidae, Bapak Wilson Lalengke, Kang Pepih Nugraha, dan Mas Enda Nasution, semoga amal dan kesabaran semuanya mendapat balasan baik dari-Nya; Staf pengajar Sosiologi yang juga telah membantu saya dalam penulisan tesis ini, khususnya Mas Andi Rahman yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya membantu saya dari awal hingga akhir pengerjaan hasil karya ini, Bapak Ganda Upaya yang telah menumbuhkan *sense of democracy* dalam diri saya; Keluarga besar MKOMMERS B 2007, kalian melengkapi rangkaian *puzzle* dalam hidupku; Sahabat-sahabat dan orang-orang spesial yang telah menjadi bagian dalam hidupku.

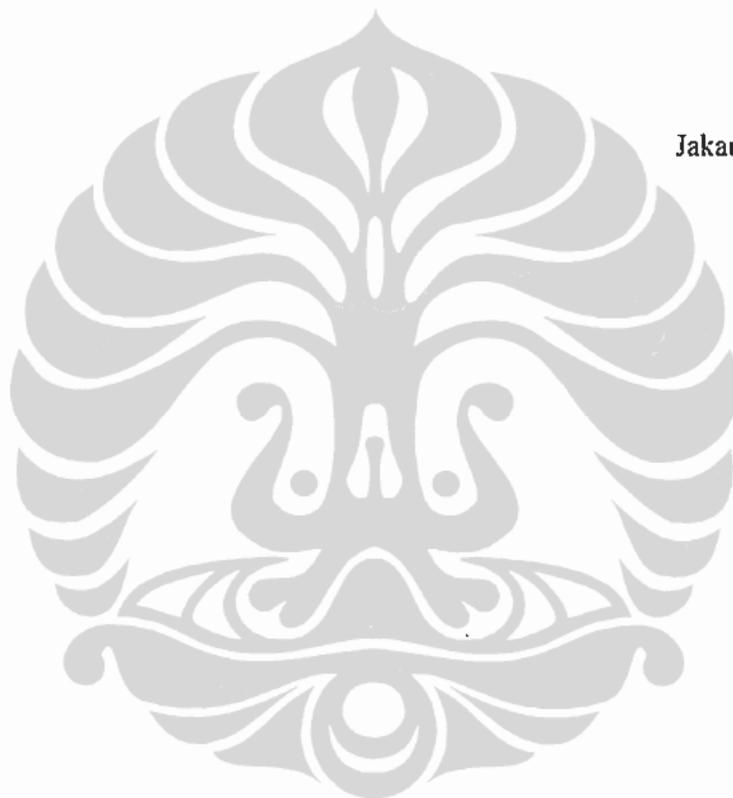
Teramat spesial bagi ibunda (alm) dan ayahanda tercinta atas kasih sayang, semangat, dan do'a restu yang diberikan, serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi.

Untuk mas Sembilu dan keluarga besar, terima kasih atas segala kebaikan dan penerimaan yang begitu menyejukkan hati. Cahaya itu menerangi jalanku dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 7 Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Satiti Shakuntala  
NPM : 0706185004  
Program Studi : Manajemen Komunikasi  
Departemen : Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN JURNALISME WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*) SEBAGAI ELEMEN *CIVIL SOCIETY* DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI TENTANG POLITIKANA.COM).**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juli 2009

Yang menyatakan

( Rr. Satiti Shakuntala )

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI  
PROGRAM PASCASARJANA KOMUNIKASI

Rr. Satiti Shakuntala

0706185004

**PERAN JURNALISME WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)  
SEBAGAI ELEMEN *CIVIL SOCIETY* DALAM PENGUATAN  
DEMOKRASI DI INDONESIA  
(STUDI TENTANG POLITIKANA.COM)**

6 Bab + 102 halaman isi + 5 tabel + 1 Bagan

Daftar Pustaka; 40 buku + 4 jurnal + 5 hasil penelitian

**ABSTRAK**

Ketika orang biasa menjadi wartawan, inilah era “Jurnalisme Warga” (*Citizen Journalism*). Era dimana setiap warga dapat berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisa, dan diseminasi berita dan informasi. Shayne Bowman dan Chris Willis dalam laporannya dalam We Media mengatakan, partisipasi warga dalam menulis dan menyiarkan informasi independen, akurat, tersebar luas, dan relevan adalah syarat-syarat bagi demokrasi. *Citizen journalism* adalah media untuk memberdayakan kelompok kecil warga yang terpinggirkan dari kelompok masyarakat lainnya. Warga yang sekaligus reporter, misalnya, akan efektif menyiarkan berita yang tidak tergarap media massa konvensional, seperti radio/televisi lokal, tentang isu yang “tidak seksi”, seperti rendahnya pendapatan wanita pekerja, kelompok minoritas, bahkan kelompok anak muda. Karena tidak memiliki akses terhadap media inilah, warga lebih bersandar pada informasi yang diperlukan kelompoknya.

Ketika teknologi komunikasi yang semakin berkembang memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam pemberitaan ketika itu pula warga menjadi

individu yang terlibat aktif dalam penyampaian informasi. *Citizen journalism* menurut mantan jurnalis Dan Gillmor adalah pemberdayaan warga untuk terlibat aktif dalam media. Gillmor menyatakan bahwa *citizen journalism* lahir dari ranah media yang berbasis internet. Lewat internet, warga atau masyarakat bebas berekspresi menyampaikan informasi yang mereka miliki. Ciri khas *citizen journalism* muncul lewat spontanitas warga ketika memiliki informasi yang mereka rasa penting bagi orang banyak. Aktivitas *citizen journalism* mengandung nilai dan prinsip demokrasi terkait dengan pemenuhan hak-hak warga negara (*citizen*), khususnya dalam hak untuk menyampaikan pendapat.

Metodologi penelitian kualitatif yang berparadigma kritis (metode analisis wacana) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peran *citizen journalism* melalui situs Politikana.com sebagai salah satu elemen *civil society* dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Terhadap hal tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana teks yang diproduksi dan dikonsumsi oleh para *citizen journalist* sehingga memiliki arti dalam proses demokrasi; bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan (konteks) yang melahirkan teks tersebut.

## ***CITIZEN JOURNALISM AS THE ELEMEN OF CIVIL SOCIETY IN THE STRETHENING OF DEMOCRACY IN INDONESIA***

### **ABSTRACT**

When the ordinary people become journalist, it is an era of 'Citizen Journalism'. It is the era when "citizens play an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information" (Bowman and Willis, 2005, p4). In this context, Citizen journalism plays a significant role as a medium to empower the minority. Now, profesional journalist cannot claim themshelves as the only one who has the authority to make news. In this era of information, the power of knowledge and informations is no longer lay-down only on newsroom or editors of mass media. Anybody can just easily make a news based on the daily realities and upload it into internet.

Actually, the idea that average citizens can engage in the act of journalism has a long history in the United States. The modern citizen journalist movement emerged after journalists themselves began to question the predictability of their coverage of such events as the 1988 U.S. presidential election. Those journalists became part of the public, or civic, journalism movement, a countermeasure against the eroding trust in the news media and widespread public disillusionment with politics and civic affairs.

From the above, therefore, we can say that the democratic form of society is to have more news and information. In democratic country, citizen has to be well-informed. Since the professional journalism is believed has failed to cover the democratization of political system and citizen. The citizen journalism which values genuine democratization shape in human being history, has touch the grass root community that have no access to articulate their voice (voiceless).

By using Critical Discourse Analysis methode, I conduct the case study of Politikana.com. This paper will try to find how citizen journalism can strengthen the civil society on the process of democracy in Indonesia.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR & UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR & LAMPIRAN .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
1.1 Ruang Lingkup Pers .....	5
1.2 Webblog: Media Aktivitas <i>Citizen Journalism</i> .....	8
1.3 <i>Citizen Journalism</i> sebagai Ruang Publik ( <i>Public Sphere</i> ) .....	11
1.4 Politikana.com: Situs <i>Citizen         Journalism</i> Indonesia .....	12
2. Permasalahan Penelitian .....	12
3. Tujuan Penelitian .....	15
4. Signifikansi Penelitian .....	15
5. Telaah Penelitian .....	16
6. Sistematika Penulisan .....	18
<b>II. KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
2.1 Jurnalisme: Pemenuhan Naluri .....	21

Kesadaran	
2.1.1 Jurnalisme dan Kewargaan ( <i>Citizenship</i> )	24
2.2 <i>Citizen Journalism</i>	26
2.2.1 Jenis-Jenis <i>Citizen Journalism</i>	29
2.3 Media Komunikasi Internet & <i>Citizen Journalism</i>	32
2.4 Aktivitas <i>Citizen Journalism</i> : Elemen <i>Civil Society</i>	38
2.5 Demokratisasi Komunikasi: <i>Citizen Journalism</i> dalam Sistem Demokrasi	43
2.5.1 Defnisi Demokrasi	43
2.5.2 Demokratisasi Komunikasi	50
2.5.3. Teori Demokratisasi Komunikasi	51
2.5.3.1. Teori Jurgen Habermas	51
2.6 Alur Kerangka Teoritis	54
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian	56
3.2 Pendekatan Penelitian	56
3.3 Paradigma Penelitian	57
3.4 Metode Pengumpulan Data	63
3.5 <i>Critical Discourse Analysis</i>	64
3.5.1 Analisis Wacana	64
3.5.2 Wacana Kritis Fairclough	67
3.5.2.1 Teks	68
3.5.2.2 Intertekstualitas	69
3.5.2.3 <i>Discourse Practice</i>	69
<b>IV. TEMUAN PENELITIAN</b>	
4.1 Politikana: Politik dan Demokrasi dalam <i>Citizen Journalism</i>	74

4.1.1 Demokrasi Indonesia dalam Teks .....	74
4.1.1.1 Demokrasi untuk diri sendiri .....	74
4.1.1.2 Demokrasi adalah demonstrasi .....	78
4.1.1.3 Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat .....	82
4.1.2 Pemilihan Umum di Indonesia .....	
4.1.2.1 Kualitas Pemilu Indonesia .....	84
4.1.2.3 HAM dalam Pemilu .....	86
4.1.2.3 Masa Depan Indonesia dalam Pemilu .....	87
4.1.2.4 Ruang Publik dalam Pemilu .....	89
4.1.3 Aktor-Aktor Dalam Pemilihan Umum Legislatif .....	90
4.1.3.1 Jejak Rekam Calon Legislatif .....	90
4.2 Konteks: Produksi dan Reproduksi Teks .....	91
 <b>V. ANALISA HASIL PENELITIAN: DEMOKRASI JURNALISME WARGA, DEMOKRASI INDONESIA</b>	
5.1. Demokrasi dalam Jurnalisme Warga .....	94
5.1.1. Keragaman Isu .....	95
5.1.2. Kesenjangan Aktor .....	96
5.2 <i>Citizen Journalism</i> dan Penguatan Demokrasi Indonesia .....	97
5.2.1 Nilai-Nilai Demokrasi .....	97
5.2.2 Kontrol atas Kekuasaan .....	97

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan .....	99
6.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103

### Daftar Tabel

Tabel 1 Ancaman terhadap Kebebasan Pers .....	2
Tabel 2 Pandangan Mengenai Kebebasan Pers .....	3
Tabel 3 Perbedaan Cara Kerja Jurnalis di Media Konvensional dan <i>Citizen Journalist</i> .....	6
Tabel 4 Kekuatan dan Kelemahan Berbagai Jenis Media .....	25
Tabel 5 Tiga Kepentingan Masyarakat .....	48

### Daftar Gambar

Gambar 1 The Emerging Media Ecosystem.....	38
--	----

### Daftar Lampiran

Lampiran 1	
Teks-teks / tulisan yang diposting dalam situs Politikana.com	
Lampiran 2	
Hasil wawancara dengan narasumber	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Belum lama ini kita dihebohkan dengan kasus seorang ibu rumah tangga yang ditangkap karena dianggap telah mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit internasional di wilayah Tangerang. Seorang ibu tersebut menuliskan unek-uneknya dan mengirimkannya ke beberapa temannya melalui surat elektronik (*e-mail*) perihal buruknya pelayanan rumah sakit swasta tempat ia dirawat. Namun, ternyata surat tersebut menyebar luas di dunia maya hingga akhirnya Rumah Sakit yang bersangkutan merasa dirugikan akibat tuduhan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada sang Ibu. Meskipun pada akhirnya Ibu tersebut dibebaskan, namun tuduhan itu sempat menyebabkan sang Ibu dijebloskan ke penjara selama beberapa saat karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Inilah, untuk pertama kalinya, di era kebebasan arus informasi, seorang yang mengeluarkan unek-uneknya lewat *e-mail* dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang yang baru disahkan setahun lalu.

Peristiwa pemenjaraan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat seperti yang dicita-citakan oleh sebuah negara yang demokratis belum terlaksana dengan baik di Indonesia.

Angin segar kebebasan pers di Indonesia akhirnya memang terjadi setelah lama diidam-idamkan oleh masyarakat. Keterbukaan ini merupakan akibat langsung dari ambruknya sistem politik Orde Baru pada 1998 yang gagal menahan gelombang tuntutan perubahan. Pemerintah pada waktu itu menerapkan

sistem pers otoriter, yang oleh S. Siebert, W. Schramm dan T. Peterson disebut dengan *authorian system*.<sup>1</sup>

Menurut Hidayat, dkk (2002), kontrol ketat itu terjadi karena pemerintah Orde Baru berupaya menempatkan pers sebagai bagian dari perangkat negara untuk mengawal ideologi penguasa (*ideological state apparatus*), yang diharapkan bisa berperan dalam proses memproduksi dan menjaga stabilitas legitimasi rezim. Kontrol yang dilakukan adalah: (1) Kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media melalui Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)<sup>2</sup>. (2) Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional melalui mekanisme seleksi dan regulasi. (3) Kontrol terhadap produksi teks, baik isi maupun isu pemberitaan, (4) Kontrol terhadap sumber daya, berupa monopoli kertas oleh penguasa, dan (5) Kontrol terhadap akses pers, berupa pencekalan tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers. Pemerintah menganggap pers yang bebas akan dapat mengganggu stabilitas negara, keamanan dan kepentingan umum.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sebagaimana terangkum dalam *Four Theories of The Press* yang menyatakan bahwa pers berkembang menurut keberadaan sistem pemerintahan antara sistem otoritarian, libertarian, komunis/fasis dan *social responsibility*. Straubhaar dan Robert LARose (2002) menjelaskan *Authoritarian System* terjadi bila negara menggunakan otoritasnya untuk memaksa dan melakukan secara ketat media massa yang ada dengan melakukan sensor atau melarang sebuah *content* media yang dianggap emnyerang atau meng-*counter* kebijakan pemerintah. Contohnya adalah Cuba yang melakukan sensor terhadap berita politik serta Iran yang mensensor film *Baywatch* di negaranya.

<sup>2</sup> Menurut Lukas Luwarso dkk (2002). SIUPP memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, SIUPP dapat digunakan untuk mencabut ijin nyawa media-media yang kritis terhadap pemerintah. Di sisi lain, SIUPP dapat juga digunakan untuk mengontrol siapa saja yang berhak mengelola penerbitan pers. Surat ijin ini hanya akan diberikan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki pemerintah. Contoh, pasca pembredelan 1994, SIUPP untuk majalah TEMPO diberikan kepada Bob Hasan, sementara kebanyakan wartawan TEMPO tak dapat mendirikan media baru bahkan dilarang bekerja di media lain.

<sup>3</sup> Kala itu, cukup populer adanya istilah 'budaya telepon' yang dilakukan oleh otoritas pejabat keamanan baik tentara maupun kepolisian yang emminta wartawan atau redaksi media untuk tidak memberitakan peristiwa tertentu yang dianggap merugikan pemerintah. Media tidak mungkin bisa mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ia harus mengutip keterangan resmi pemerintah dalam mengangkat suatu peliputan yang sangat politis, atau sama sekali tidak mengangkatnya.

Untuk memperjelas ancaman terhadap kebebasan pers pada masa Orde Baru versus Orde Reformasi, lihat tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Ancaman terhadap Kebebasan Pers**

Aktor Pengancam	Orde Baru	Orde Reformasi
Penguasa	Kuat	Lemah
Permodal	Kuat	Kuat
Masyarakat	Lemah	Kuat

Sumber: Masduki, 2003

Secara umum, Daniel Dhakidae, melalui disertasinya di Cornell University tentang *The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia News Industry*, menjelaskan pengaruh struktur dalam menekan kebebasan pers di Indonesia. Terdapat korelasi yang kuat antara struktur kekuasaan dan kebebasan pers. Manakala struktur kekuasaan menguat, kebebasan pers melemah. Sebaliknya, jika struktur kekuasaan melemah, kebebasan pers menguat (Dhakidae, 1991).

Kelahiran Orde Reformasi Mei 1998 secara drastis mengubah kebebasan jurnalistik menjadi kemerdekaan jurnalistik. Hal ini ditandai dengan dibubarkannya Departemen Penerangan yang berlaku sebagai *malaikat* pencabut nyawa pers. Secara yuridis, UU Pokok Pers No.21/1982 pun diganti dengan UU Pokok Pers No.40 / 1999. Dengan undang-undang dan pemerintahan baru, siapa pun bisa menerbitkan dan mengelola pers. Siapa pun bisa menjadi wartawan dan masuk dalam organisasi pers mana pun. Tak lagi kewajiban hanya mengindik kepada satu organisasi pers. Seperti ditegaskan Pasal 9 Ayat (1) UU Pokok Pers No.40 / 1999, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Pada pasal yang sama ayat berikutnya (2) ditegaskan lagi, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. (Sumadiria, 2008: 25)

Kewenangan yang dimiliki pers nasional itu sendiri sangat besar. Menurut Pasal 6 UU Pokok Pers No.40 / 1999, pers nasional melaksanakan peranan: (a)

Universitas Indonesia

memenuhi hak dasar masyarakat untuk mengetahui, (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Apa arti dan maknanya? Dalam era reformasi, kemerdekaan pers benar-benar dijamin dan senantiasa diperjuangkan untuk diwujudkan. Semua komponen bangsa memiliki komitmen yang sama: pers harus hidup dan merdeka. Hidup, menurut kaidah manajemen dan perusahaan sebagai lembaga ekonomi. Merdeka menurut kaidah demokrasi, hak asasi manusia, dan tentu saja supremasi hukum.

**Tabel 2**  
**Pandangan Mengenai Kebebasan Pers**

<b>Model Pasar</b>	<b>Model Marxist</b>	<b>Model Pembangunan</b>
Pers yang bebas berarti bahwa wartawan bebas dari semua kontrol dari luar	Pers yang bebas berarti bahwa opini dari semua orang dimuat, tidak hanya untuk pihak yang kaya	Pers yang bebas berarti kebebasan atas kesadaran para wartawan
Pers yang bebas adalah salah satu di mana pers tidak tunduk pada kekuasaan dan tidak dimanipulasi oleh kekuasaan	Pers yang bebas diperlukan untuk melawan penindasan	Kebebasan pers kurang penting daripada kelangsungan hidup negara
Tidak ada kebijakan pers nasional untuk memastikan pers yang bebas.	Kebijakan pers nasional diperlukan untuk menjamin bahwa pers yang bebas mengambil bentuk yang benar	Kebijakan pers nasional diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan

Sumber: J. H. Altschull. *Against of Power: The Role of News Media in Human Affairs* (White Plains. N. Y.: Longman, 1984: 294)

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyatakan pendapatnya (*free expression*), pers

Universitas Indonesia

dianggap sebagai kekuasaan keempat (*the four estate*), yaitu setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai *the fourth estate*, pers menjalankan fungsi kontrol masyarakat (Assegaf, 1991: 12)

### 1.1. Ruang Lingkup Pers

Pers mengandung dua arti. Arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pers hanya menunjuk kepada media cetak berkala: surat kabar, tabloid, dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers bukan hanya menunjuk pada media cetak berkala melainkan juga mencakup media elektronik auditif dan media elektronik audiovisual berkala yakni radio, televisi, film, dan media *on line* internet. Pers dalam arti luas disebut media massa.

Secara yuridis formal, seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Pers No. 40 / 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah menghadirkan aneka ragam saluran (media) yang kian lama kian canggih dan memungkinkan segala macam kejadian meledak menjadi berita yang dramatis di seluruh dunia. Arus berita berlangsung kian cepat. Kemajuan teknologi media membuat akses publik untuk memasuki ranah jurnalistik semakin terbuka.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah ruang dimana dunia berada di dalamnya. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media internet, membawa pengaruh besar terhadap kajian tentang jurnalisme. Kehadiran internet melahirkan jurnalisme *online*, yakni aktivitas jurnalisme yang sepenuhnya berbasis komunikasi maya-interaktif seperti dilakukan oleh *detik.com*, *tempointeraktif.com*, dan perusahaan sejenis lainnya.

Memasuki abad ke-21, pertumbuhan teknologi informasi tersebut semakin cepat dan kian tak terduga. Internet menjadi lokomotif dan transformasi peradaban masa kini. Jurnalistik pun mendapat tantangan terbesarnya, terutama sejak tahun 2000 dan memuncak pada dua tahun terakhir seiring pesatnya kemajuan dunia *cyber*. Tantangan itu berwujud sebuah konsep dan praktik yang disebut *citizen journalism* atau jurnalisme warga. (Habibi, dalam Jurnal Komunikasi, 2007: 111). Ada pula yang menyebutnya sebagai Public Journalism, Participatory Journalism, maupun Interactive Journalism.

Konsep dasar dalam *citizen journalism* adalah memposisikan audiens sebagai produsen berita juga, bukan hanya konsumen pasif seperti selama ini berjalan dalam logika kerja jurnalisme tradisional berbasis media massa. Dengan kata lain, posisi antara jurnalis sebagai pencari dan penulis berita, narasumber sebagai muasal berita, dan audiens sebagai konsumen berita sudah lebur begitu cair. Antara produsen dan konsumen berita tidak bisa lagi diidentifikasi secara rigid karena setiap orang dapat memerankan keduanya (Gillmor, 2004: xii-xv). Intinya, dalam *citizen journalism* yang diutamakan adalah interaksi dan interkoneksi, (Habibi dalam Jurnal Komunikasi, 2007: 116) dengan begitu hubungan antara jurnalis, narasumber berita, dan audiens sudah menjadi cair dalam dunia maya, sekaligus juga dalam pola hidup masyarakat sehari-hari.

Perbedaan nyata antara *citizen journalist* dan wartawan yang bekerja di media massa, dijelaskan dengan perinci oleh Bentley (2005) sebagai berikut: "Seseorang wartawan yang bekerja di media massa, melakukan liputan karena penugasan, sementara seorang *citizen journalist* menuliskan pandangannya atas suatu peristiwa karena didorong oleh keinginan untuk membagi apa yang dilihat dan diketahuinya." Dalam perspektif bahasa Inggris, dapat digambarkan secara jelas: yang dilakukan oleh wartawan adalah *to cover*, sedangkan yang dilakukan oleh *citizen journalist* adalah *to share*. Seorang penulis pada *citizen journalism*

melakukan tugasnya dengan proses penetrasi terhadap objek pemberitaan dengan totalitas dan penuh atmosfer. *CJ* menjadi wadah 'gairah bercerita' dari semua individu.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan secara ringkas perbedaan cara kerja jurnalis di media konvensional dan *citizen journalist*:

**Tabel 3**  
**Perbedaan Cara Kerja Jurnalis di Media Konvensional dan *Citizen Journalist***

<b>Jurnalis Media Konvensional</b>	<b><i>Citizen Journalists</i></b>
Memiliki kode etik (institusional)	Tidak terikat institusi pers tertentu, tidak memiliki kode etik yang memiliki sanksi hukum
Memiliki standar edukasi tertentu. Mengalami masa pelatihan jurnalistik tertentu (yang diberikan oleh institusi pers tempat jurnalis bekerja, maupun pelatihan dari luar organisasi)	Self-taught amateurs (belajar dari pengalaman), kemampuan menulis, meliput, merekam dan menyebarkan informasi hanya berdasarkan pengetahuan, ketertarikan pada topik tertentu dan keinginan bertukar informasi

Sumber: skripsi Ulung Putri A.P, "Fenomena Citizen Journalism dalam Ranah Media Massa Konvensional (Televisi) di Indonesia (Studi pada Program I-Witness di Metro TV).2008, diolah.

Kehadiran *citizen journalism* bukannya tidak disadari media-media tradisional, seperti media cetak, radio, atau televisi. Malah akhirnya sejumlah media tradisional yang relatif mapan, ikut membuka ruang bagi warga untuk menjadi bagian dari pemberitaan mereka. Warga bukan lagi sekedar bagian dari masyarakat yang hanya bisa bersuara melalui rubrik surat pembaca atau dikutip opininya secara sekilas dalam berita.

Media tradisional di Indonesia yang mulai membuka sedikit pintu keredaksiannya, seperti *Media Indonesia*, *Republika*, *Kompas* (situs *Kompas Kita* dan *Kompasiana*), serta *Metro TV* (melalui program *I-Watch*). Hal tersebut menandakan bahwa media-media konvensional tersebut mau berbenah diri.

Nicholas Lemann, profesor di Columbia University Graduate School of Journalism, New York City, Amerika Serikat, mencatat, bahwa kelahiran jurnalisme publik dimulai melalui gerakan pada Pemilu 1988 di Amerika Serikat. Saat itu publik mengalami erosi kepercayaan terhadap media-media mainstream seputar pemilihan presiden AS. Ia muncul sebagai “perlawanan” terhadap pemberitaan media konvensional yang dianggap mengandung bias politik. Pelopor situs-situs semacam ini, antara lain, Jay Rossen, dosen University of New York. Ia berprinsip masyarakat dapat berperan aktif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai jurnalisme warga (*citizen journalism*- <http://www.halamansatu.net>). Begitu pula situs Oh My News yang mengalami sukses luar biasa juga dipicu oleh pemilihan presiden Korsel. Lemann mencatat, situs ini merupakan media terbesar yang menerapkan Citizen journalism.

### 1.2. Webblog: Media Aktivitas *Citizen Journalism*

Perkembangan jurnalisme warga bertitik tolak dari adanya *weblog* (biasa disingkat *blog*), yaitu satu jenis *web* yang biasanya dikelola perorangan, berisi komentar atau informasi tentang topik tertentu seperti politik, berita daerah, dan beberapa data diri pemilik *blog*. Biasanya *blog* mengombinasikan bentuk tulisan, gambar, dan *link* ke *blog* atau situs *web* lain yang berkaitan dengan isi topik *blog* (Asagiri, 2006:8). Penggunaan *blog* yang awalnya sekedar untuk memenuhi kepuasan diri akhirnya berkembang menjadi aktivitas rutin untuk saling bertukar informasi di kalangan *blogger* (para pembuat dan pengakses *blog*) sehingga berkembang menjadi jurnalisme warga yang memiliki karakter berbeda dengan jenis jurnalisme *online* yang lahir sebelumnya.

Kini setiap pengguna internet pada dasarnya bisa menciptakan media tersendiri. Mereka dapat melakukan semua fungsi jurnalistik sendiri, mulai dari merencanakan liputan, meliput, menuliskan hasil liputan, mengedit tulisan,

Universitas Indonesia

memuatnya dan menyebarkannya di berbagai situs internet atau di *weblog* yang tersedia gratis. Artinya, semua orang yang memiliki akses terhadap internet sebenarnya bisa menjadi “jurnalisdadakan”, meski tentu saja kualitas jurnalistik mereka masih bisa diperdebatkan. (Haryati, Jurnal Observasi 2007: v)

*Blog* menjadi bagian dari proses revolusi komunikasi. Kegiatan pemberitaan yang beralih ke tangan orang biasa memungkinkan berlangsungnya pertukaran pandangan yang lebih spontan dan lebih luas dari media konvensional. Dan Gillmor yang semula bekerja sebagai kolumnis IT di San Jose Mercury News, kini terjun untuk mengelola situs *blog*, dikenal sebagai pelopor *grassroots media*, *participatory media*, atau *citizen journalism*. Gillmor dalam *principles of “we media” movement* (“We Media” hal. 13) menyebutkan beberapa esensi dari *citizen journalism*, yaitu:

- “• *My readers know more than I do.*
- “• *That is not a threat, but rather an opportunity.*
- “• *We can use this together to create something between a seminar and a conversation, educating all of us.*
- “• *Interactivity and communications technology — in the form of email, weblogs, discussion boards, websites and more — make it happen.”*

Wimar Witoelar menyatakan, *blog* pada dasarnya adalah media untuk kebebasan berekspresi, bahwa orang akan tetap mengungkapkan pendapatnya, orang akan tetap berbicara. Itu tidak akan pernah berhenti. “Masa depan internet itu ada di *blog*, dan masa depan *blog* ada di *content* (pada isinya). *Content* hanya bisa dikuasai oleh orang yang terbiasa membaca, menulis, dan berdiskusi.” (<http://www.pontianak.com>)

Di Indonesia, *blog* masih terbatas pada lingkungan tertentu. *Halamansatu.net* misalnya, pada tahun 2007 baru mempunyai 59 penyumbang berita dan tiga awak redaksi. Atau situs *Wikimu.com* yang sebulan lebih tua dari *Halamansatu.net* yang memiliki 100-an penyumbang berita. Masih ada lagi *Panyingkul.com* yang usianya hampir enam bulan. Berbeda dengan *OhmyNews*,

Universitas Indonesia

*blog* milik Oh Yeon-ho, warga Korea Selatan itu kini menjadi salah satu media paling berpengaruh di Negeri Ginseng, mempunyai lebih dari 42 ribu berita versi bahasa Inggrisnya yang digarap bergotong-royong oleh sekitar 900 “wartawan” warga dari 85 negara. (Haryati, Jurnal Observasi 2007: vi)

Situs Yahoo!, BBC, MSNBC, dan sebagainya yang menyediakan portal khusus untuk informasi dari dan untuk pembacanya. Di Yahoo! Ada portal "people of the web" untuk cerita dan "you witness news" untuk foto dan video. Di BBC ada "eyewitness tales, readers' stories of reuniting, photos from survivors", dan "survivor amateur videos". Di MSNBC ada "citizen journalists report". Tentu yang paling fenomenal adalah situs Oh My News. Berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan, situs ini pertama terbit 22 Februari 2000 dengan moto "Setiap Warga adalah Seorang Reporter". Kini mereka memiliki 60 ribu reporter di seluruh dunia. Isinya 80 persen berasal dari citizen journalists, sisanya oleh 'wartawan tradisional' yang jumlahnya 40-an orang.

Eksperimen citizen journalism yang dijalankan *Panyingkul!*, misalnya, dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kekakuan pola relasi antara wartawan dan narasumber, misalnya, telah mencair. Para jurnalis warga telah membuktikan bahwa status sebagai wartawan, meskipun penting, bukan lagi determinan dalam mengakses informasi dari narasumber, atau peristiwa. Pelbagai kabar yang disampaikan melalui situs [www.panyingkul.com](http://www.panyingkul.com), yang pilihan-pilihan tematiknya dianggap mewakili spirit jurnalisme orang biasa, mencoba membedakan diri dari kabar-kabar di media mainstream – terutama dalam pendekatannya kepada peristiwa. Ia bisa berupa kejadian yang telah lampau, isu-isu yang terkesan sepele, sudut pandang yang personal atas peristiwa besar, atau bahkan fenomena yang tidak lagi mendapat tempat di media massa mainstream.

### 1.3. *Citizen Journalism* sebagai Ruang Publik (*Public Sphere*)

Spirit kebebasan dan kebersamaan dalam sebuah ruang dan waktu yang diusung oleh *Citizen journalism* mengingatkan kita pada sebuah konsep yang dikaji oleh Jurgen Habermas, yaitu “Ruang Publik” (*Public Sphere*). Apakah ruang publik itu sebenarnya? Robert C. Holub menerangkan ruang publik itu sebagai berikut:

*“Public sphere is an arena, independent of government (even if in receipt of state funds) and also enjoying autonomy from partisan economic forces, which is dedicated to rational debate (i.e. to debate and discussion which is not interested, disguised, or manipulated) and which is both accesible to entry and open to inspection by the citizenry. It is here, in this public sphere, that public opinion is formed.”* (Holub, 1991: 2-8)

Ruang Publik – atau, menurut Habermas, ruang publik borjuis – muncul sebagai akibat dari berkembangnya masyarakat kapitalis pada abad ke-18 di Inggris, Perancis, Jerman, dan sejumlah kota di Eropa. Pada masa itu, pengusaha kapitalis sangat makmur untuk dapat bertahan hidup dan mereka memperoleh kebebasan dari gereja dan negara sekaligus. Kehidupan publik kala itu didominasi oleh hubungan feodal antara para pejabat negadan dan kalangan istana. Tetapi, perkembangan kaum kapitalis pada akhirnya mengikis supremasi feodalisme tersebut. Hal demikian terjadi karena pihak gereja dan negara secara tidak sengaja telah memberikan dukungan kepada dunia sastra. Dunia ini biasanya direpresentasikan oleh beberapa sarana seperti teater, seni, salon, warung-warung kopi (*coffee houses*), novel, dan kritik.

Banyak orang seringkali bertemu di tempat-tempat tersebut untuk mendiskusikan berbagai peristiwa yang menyangkut negara. Seiring dengan perkembangan proses produksi-distribusi-konsumsi pada media cetak, diskusi tersebut berubah menjadi oposisi yang efektif terhadap kekuasaan pemerintah. Meskipun hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat, Habermas meyakinkan

bahwa salon-salon itu menjadi tempat yang sangat vital bagi perkembangan demokrasi awal. Hal demikian sangat beralasan karena mereka telah memperkenalkan gagasan untuk menyelesaikan masalah politik melalui diskusi publik (Giddens, 1997: 378).

Aktivitas Citizen journalism dalam dunia internet menjadi sebuah ruang publik agar obyektivitas sebuah pemberitaan tetap terjaga, tidak menjadi sumber yang dapat dimanipulasi bagi media massa konvensional untuk menaikkan rating.

#### **1.4. Politikana.com: Situs *Citizen Journalism* Indonesia**

Di Indonesia situs-situs yang memuat prinsip *citizen journalism* sudah berkembang pesat, Panyingkul.com, Kompasiana.com, HarianOnlineKabarIndonesia.com, Wikimu.com, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengangkat salah satu situs yang mengusung semangat Citizen journalism terkait dengan unsur-unsur demokrasi di Indonesia. Situs tersebut yaitu Politikana.com.

Politikana.com adalah situs politik Web 2.0 yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Wadah beropini, diskusi dan interaksi tentang "politik" dengan pengertian yang luas dengan tujuan memberikan pengalaman politik secara langsung untuk generasi online Indonesia. Di politikana.com semua artikel ditulis oleh pengguna dan dimoderasi juga oleh pengguna, menghasilkan situs yang dinamis dan demokratis dimana "penting" dan "rating" dari sebuah konten betul-betul ada di tangan para pembaca dan penulis politikana.com itu sendiri. Politikana.com menganut prinsip independen dan non partisan dengan tujuan akhir untuk berkontribusi nyata terhadap kemajuan Republik Indonesia dan segala isinya.

## **2. Permasalahan Penelitian**

Berita di media memang bukan realitas sosial itu sendiri, melainkan realitas media yang juga sudah melalui proses konstruksi atas realitas sosial. Akan tetapi, proses konstruksinya selama ini hanya berkutat di jajaran redaksi media

Universitas Indonesia

tersebut. Dengan kata lain masih elitis. Media massa yang menentukan apa yang harus diliput dan apa yang luput dari pelaporan peristiwa. Media pula lah yang memastikan nilai berita mana yang penting bagi pembacanya. Media massa menentukan berbagai faktor untuk menentukan peristiwa apa yang akan mereka liput (Anderson dan Itule, 1984: 17)

Pola demikian yang kemudian didekonstruksi oleh prinsip *citizen journalism* dalam dunia *cyber*. Setiap orang kembali kepada definisi asli dari berita itu sendiri, yakni segala sesuatu yang diinginkan dan diperlukan untuk diketahui oleh orang lain (Newsom dan Wollert, 1985: 11). Dengan melaporkan berita, media tidak hanya berbagi informasi kepada khalayak untuk kemudian menggerakkan masyarakat dalam perikehidupan demokratis, tetapi juga menjadi ruang interaksi antar individu maupun ruang dialog yang konstruktif. Berita mewujudkan sebagai sebuah laporan dari warga yang bisa bernuansa subjektif, tetapi mampu menjadi sarana dialog untuk menemukan tesis dan sintesis kehidupan bersama.

Kehadiran *citizen journalism* tersebut tersebut membawa perubahan dalam dunia jurnalistik. Saat ini, pers berada dalam situasi di mana pengertian wartawan dan media mengalami pergeseran sebagai akibat dari perkembangan jurnalistik dan perkembangan media, khususnya teknologi internet. Internet memungkinkan seseorang memperoleh dan menyebarkan informasi dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja seseorang tersebut bisa mengaksesnya. Kehadiran internet membuat kebebasan arus informasi menjadi semakin mudah untuk menembus batas jarak, ruang, dan waktu. Sejarah juga mencatat peran internet yang bisa dimanfaatkan oleh para aktivis anti-Soeharto telah efektif memunculkan gagasan reformasi dan menggerakkan mahasiswa yang berujung pada tumbanganya Orde Baru pada 21 Mei 1998 (Sen dan Hill, 2001: 227; Budiman, 2002).

Pertautan antara informasi, teknologi dan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa (bukan wartawan profesional) melalui aktivitas *citizen*

*journalism*, memunculkan beberapa hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Bagaimanapun, pada satu sisi, *citizen journalism* merupakan salah satu bentuk dari *civil society* karena memperlihatkan kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, dan aneka prinsip *civil society* lainnya. Pada titik ini, *civil society* tersebut memiliki kemampuan untuk memproduksi dan mereproduksi aneka berita yang mewakili kepentingan mereka dengan difasilitasi oleh teknologi informasi (internet). Hal tersebut bukan hanya membedakan jurnalisme warga dari jurnalisme konvensional, tetapi ia juga bisa memperkuat demokratisasi Indonesia. Jurnalisme konvensional memang kerap dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi, namun kekuatan modal seringkali membuatnya harus berkompromi dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Kemampuan *citizen journalism* dalam memperkuat demokrasi Indonesia dapat dilihat pada teks yang diproduksi dan direproduksi masyarakat dan konteks yang melahirkannya. Ia menyuarakan kepentingan masyarakat dengan isu yang beragam; kesetaraan antar aktor yang memproduksi dan mereproduksi teks tersebut, dan sebagainya. Ia menjadi arena baru demokrasi yang berbeda dengan arena lama demokrasi, seperti debat di parlemen, pemilu, demonstrasi, dan sebagainya. Jurnalisme warga bersifat langsung, interaktif, sederhana, setara. Ujungnya, jurnalisme warga mendidik masyarakat dengan nilai-nilai demokratis, baik dalam relasinya dengan sesama warga masyarakat (horisontal) maupun dengan negara (vertikal), seperti kesetaraan, berani menyampaikan pendapat, mau berdiskusi dengan pihak lain yang berbeda pendapat, mau bernegosiasi dan berkompromi, tidak ada kekerasan, dan lain-lain. Jurnalisme warga juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan atau jalannya pemerintahan dengan cara yang demokratis, yaitu melalui penyampaian pendapat dengan menulis langsung di media massa, bukan melalui cara lain yang konvensional

seperti demonstrasi, penyampaian pendapat ke DPR, surat pembaca di media massa konvensional, dan sebagainya.

Permasalahan penelitian tersebut dapat diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Dalam konteks demokrasi Indonesia, teks apa saja yang diproduksi dan direproduksi oleh *citizen journalism*?
2. Bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan (konteks) yang melahirkan teks tersebut?
3. Bagaimana dengan teks dan konteks tersebut, *citizen journalism* berperan dalam memperkuat demokratisasi Indonesia?

### 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas *citizen journalism* sebagai agen dari *civil society* berperan dalam memperkuat proses demokrasi di Indonesia, ditinjau melalui teks-teks tulisan yang dimuat dalam sebuah situs (Poilitikana.com) sebagai wadah yang menampung semua opini para *citizen journalist*. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana peran aktivitas *citizen journalism* dalam merubah dunia jurnalistik secara luas, dari level mikro (level teks), meso (level produksi dan konsumsi teks), dan makro (sociocultural).

### 4. Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai peran *citizen journalism* dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia ini memiliki dua signifikansi yang terbagi secara praktis dan akademis, yaitu:

- a. Secara akademis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkaya kajian mengenai konsep *citizen journalism* yang sedang berkembang di dalam masyarakat era informasi dalam kaitannya

dengan konsep demokrasi. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur kajian terhadap ilmu komunikasi, sosiologi, dan terhadap wahana *civil society* dalam proses demokrasi di Indonesia.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pemerhati masalah jurnalisme, terkait dengan konsep *civil society* dan demokrasi. Terutama bagaimana aktivitas *citizen journalism* (jurnalis warga) membawa angin segar dan perubahan dalam pemenuhan hak-hak rakyat khususnya terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat.

## 5. Telaah Pustaka

Untuk memperkuat pentingnya studi aktivitas *citizen journalism* sebagai sebuah sarana demokratisasi dari sudut pandang paradigma kritis, sebelumnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap studi teks yang pernah dilakukan diantaranya di lingkungan Departemen Komunikasi FISIP UI, hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. **Tesis “Kontrol Publik Atas Pemberitaan Media” (Studi Kasus Konflik Jawa Pos vs Banser) oleh Akhmad Khakim, 2004.**

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari tahu bagaimana aktivitas produksi berita yang dilakukan media dan aktivitas konsumsi berita yang dilakukan oleh publik sehingga memunculkan konflik akibat kesenjangan persepsi dan subyektivitas atas peristiwa. Aktivitas produksi berita yang dimaksud adalah sejauh mana media melakukan proses konstruksi realitas atas peristiwa dalam item berita yang disajikan dengan segala faktor internal newsroom dan eksternal yang mempengaruhinya. Sedangkan aktivitas konsumsi berita dimaksudkan sejauh mana publik memahami dan memaknai berita media yang dikonsumsi dari media, serta respon yang muncul sehingga memunculkan konflik. Melalui paradigma kritis dengan

metode kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis dengan multi level analisis: analisis teks, analisis wacana dan analisis sosial budaya terhadap peristiwa konflik antara masyarakat NU dengan harian Jawa Pos yang muncul dipermukaan.

**b. Tesis “Rasisme dalam Media” (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kerusuhan Mei 1998 Pada Harian Kompas, Media Indonesia, dan Republika), oleh Nina Widyawati, 2004.**

Paradigma kritis dengan metode kualitatif melalui analisis wacana kritis, digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana Kompas, Media Indonesia dan Republika mengartikulasikan jalannya kerusuhan Mei 1998 serta memetakan penyebab kerusuhan. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana media memproduksi dan mereproduksi simbol-simbol rasisme baru dan bagaimanakah hubungan dominasi – subordinasi antara pribumi dan etnis Cina.

**c. Tesis “Karya Sastra sebagai Media Resistensi atas Dominasi dan Hegemoni” (Analisis Wacana Kritis Novel “Tarian Setan” Karya Saddam Hussein) oleh Alip Kunandar, 2008.**

Dalam penelitiannya, Alip Kunandar mengungkapkan bentuk perlawanan (resistensi) dunia Arab terhadap hegemoni dan dominasi Barat (AS) yang disampaikan oleh Saddam Hussein melalui karya sastra novel “Tarian Setan” sebagai media untuk menyampaikan gagasan-gagasan perlawanannya. Studi ini menggunakan paradigma kritis dengan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Pada level teks dilakukan dengan analisa naratif dari Fairclough dan analisis fungsi-fungsi dari Propp. Pada level *discourse practice*, dilakukan dengan wawancara dan penelusuran pustaka. Begitu pula pada level *sociocultural practice*.

d. Skripsi “Fenomena *Citizen Journalism* dalam Ranah Media Massa Konvensional (Televisi) di Indonesia” (Studi pada Program I-Witness di Metro TV) oleh Ulung Putri A.P, 2008.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana pandangan media massa konvensional terhadap *citizen journalism*. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai bagaimana konsep dan produk *citizen journalism* yang muncul di media konvensional. Melalui penelitian ini masyarakat dapat mengetahui interaksi yang terjadi antara media konvensional dengan *citizen journalism* yang hadir di media tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode *case Study* dari berbagai metode penelitian sosial. Informan yang dicari dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam proses produksi program *i-witness* (Metro TV) dan merupakan jurnalis yang bekerja di Metro TV.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

### Bab I Pendahuluan :

Bab ini berisi latar belakang mengenai perkembangan *citizen journalism*, di Amerika, Korea, dan Indonesia. Terbukanya peluang kebebasan berpendapat yang ditandai dengan kebebasan pers pada era reformasi. Dalam bab I ini juga disampaikan bagaimana permasalahan penelitian yang tersusun menjadi pertanyaan penelitian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian untuk lebih menjelaskan maksud dari penelitian yang dilakukan; Signifikansi penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu signifikansi akademis dan signifikansi praktis; Telaah pustaka, yaitu hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain,

yang dapat mendukung penelitian ini; Sistematika penelitian, merupakan penjelasan isi masing-masing bab dalam laporan penelitian ini.

## Bab II Kerangka Konseptual :

Pada bab Kerangka Konseptual dijelaskan secara mendasar konsep dan teori-teori apa saja yang digunakan sebagai pijakan dasar pemikiran pada penelitian ini. Konsep dan teori yang digunakan diantaranya adalah Jurnalisme, *Citizen Journalism*, Jenis-jenis *Citizen Journalism*, Media Komunikasi Internet dan *Citizen Journalism*, Aktivitas *Citizen Journalism* sebagai wahana dari *Civil Society*, dan terakhir adalah Demokratisasi Komunikasi dengan menggunakan teori Jurgen Habermas.

## Bab III Metodologi

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan paradigma kritis melalui metode analisis wacana. Metode pengumpulan data dilakukan pada teks yang diposting dalam situs Politikana.com pada periode April-Mei 2009 yang terkait dengan perihal demokrasi dan pemilihan umum.

## Bab IV Temuan Penelitian

Bab IV berisikan temuan hasil penelitian, dengan memperhatikan teks yang diposting oleh para *citizen journalist* dalam situs Politikana.com.

## Bab V Analisa Hasil Penelitian

Analisa hasil penelitian diuraikan pada bab V ini. Analisa tersebut terkait dengan hasil temuan penelitian yang merepresentasikan prosedur dan

nilai-nilai demokrasi jurnalisme warga sebagai salah satu bentuk dari demokrasi *Indonesia*.

#### Bab VI Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Bab terakhir merupakan penutup dari seluruh laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 2.1 Jurnalisme: Pemenuhan Naluri Kesadaran

“Bagaimanakah sebuah berita diproduksi? Dapatkah kita selaku warga yang tidak berprofesi sebagai jurnalis meliput sebuah berita dan kemudian menginformasikannya kepada khalayak luas? Atau dapatkah kita memperoleh informasi selain dari pemberitaan yang disampaikan oleh media massa (konvensional)?” Pertanyaan tersebut menjadi misteri bagi orang-orang yang bukan berprofesi sebagai wartawan tetapi memiliki kebutuhan akan informasi yang ingin di-*share* kepada orang lain atau ingin memperoleh informasi lain diluar pemberitaan media massa, dengan sarana dan prasarana teknologi komunikasi yang menunjang.

Noam Chomsky, seorang pakar komunikasi menyebutkan bahwa fakta yang ada di media massa sering disebut fakta kedua (*second reality*), karena fakta di media massa hanya merupakan sebagian dari fakta yang sesungguhnya, dan kehadirannya sangat tergantung pada pekerjaan para pelaku media. Fakta di lapangan melalui pencitraan media dapat didefinisikan, dikonstruksikan, dan dimaknai secara beragam. Sebuah rekonstruksi sangat tergantung pada bagaimana pelaku di balik media melakukan tugasnya. Walaupun mereka telah bekerja dengan menerapkan teknik-teknik jurnalistik yang presisi, tetapi tetap saja kita tidak dapat mengatakan apa yang mereka tulis adalah fakta yang sebenarnya. (Chomsky, 2006: 5). Asumsi tersebut mengindikasikan bahwa setiap saat kita sedang menyaksikan pertempuran berbagai kepentingan di media massa. (Hariyanti, 2006: 31)

Pada dasarnya, manusia membutuhkan berita karena naluri dasar, yang kita sebut sebagai Naluri Kesadaran. Berita adalah bagian dari komunikasi yang membuat kita terus memperoleh informasi tentang pergantian peristiwa, isu, dan tokoh di dunia luar. Sejarah mengungkap sebuah kecenderungan, makin

demokratis sebuah masyarakat, makin banyak berita dan informasi yang didapatkan. (Kovach & Rosenstiel, 2004: 16-17)

Untuk memenuhi kebutuhan itulah, jurnanisme hadir di dalam ruang kehidupan komunikasi dan interaksi manusia. Sejarah menuturkan bahwa jurnanisme adalah alat pemasok kebutuhan orang berkomunikasi. Komunikasi, sebagai alat penting bagi manusia, merupakan jalan bagi manusia bertukar informasi. Komunikasi banyak berubah bentuk. Dari sejak awal kehidupan bermasyarakat, manusia mempergunakan berbagai medium untuk berkomunikasi. Sampai kemudian jurnanisme ditemukan: sebagai sebuah kegiatan masyarakat melaporkan berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat (Santana, 2005: 10).

Dalam bahasa Perancis, jurnalistik (*journalistic*) berasal dari kata *du jour* atau *journal* yang artinya “hari” atau “catatan harian”. Dalam bahasa Belanda, *journalistiek* artinya penyiaran catatan harian. Hal ini merujuk pada asal mula munculnya media massa yang disebut *Acta Diurna* pada zaman Romawi kuno di bawah pemerintahan Raja Julius Caesar. Dalam bahasa Inggris, kata *journal* diartikan sebagai pelaporan, pencatatan, penulisan, atau perekam kejadian. Kamus *The Oxford Paperback Dictionary* mengartikan kata *journal* sebagai sebuah rekaman berita, kejadian, atau transaksi bisnis sehari-hari (*a daily record of news or events or business transaction*) dan surat kabar berkala (*a newspaper or periodical*). John M. Echols dan Hassan Shadily dalam Kamus Inggris-Indonesiamengartikan *journal* sebagai majalah, surat kabar, dan *diary* atau catatan harian. *Journalistic* sendiri diartikan sebagai “mengenai kewartawan”. Dari asal-usul kata atau arti etimologis tersebut didapat berbagai hal yang membangun konsep jurnalistik, antara lain catatan, kejadian, wartawan, dan surat kabar, sehingga muncul definisi jurnalistik sebagai “proses penulisan dan penyebarluasan informasi berupa berita, *feature*, dan opini melalui media massa”. (M. Romli, 2005:2)

F.Fraser Bond dalam *An Introduction to Journalism* (1961:1) menulis jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Roland E. Wolseley dalam *Understanding Magazines* (1963:3) menyebutkan, jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran. Adinegoro menegaskan, jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Secara teknis, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya (Sumadiria, 2005: 3).

Tujuan utama dari jurnalisme adalah menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada warga masyarakat agar dengan informasi tersebut mereka dapat berperan membangun sebuah masyarakat yang bebas. Bukan tugas mudah menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, atau setidaknya menjadi landasan bagi jurnalisme untuk memantapkan langkahnya menciptakan perubahan dalam masyarakat. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel, jurnalisme berperan dalam, diantaranya: membantu memperbaiki kehidupan masyarakat, menciptakan bahasa dan pengetahuan umum, mengidentifikasi apa yang dicita-citakan masyarakat, merumuskan siapa yang pantas disebut pahlawan atau penjahat, dan mendorong orang-orang untuk lebih dari sekedar berpuas diri (Kovach & Rosentiel, 2001: 17). Jurnalisme juga mencakup keperluan-keperluan lain, seperti hiburan, menjadi penjaga *-watchdog-* dan menyuarakan kepentingan dari mereka yang tidak memiliki suara – *voice to the voiceless*.

Menurut Kovach dan Rosentiel setidaknya ada sembilan prinsip yang harus dikembangkan dalam jurnalisme. Diantaranya, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. (Kovach, 2004: 37). Kebenaran yang dimaksud

bukanlah kebenaran absolut atau filosofis, tetapi kebenaran dalam pengertian praktis. Karena itu jurnalis harus melakukan verifikasi, transparansi mengenai sumber-sumber dan metode yang dipakai. Salah satu syarat penting lainnya menurut Kovach dan Rosentiel adalah, jurnalis harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Kebebasan adalah syarat dasar jurnalisme. Walaupun editorialis dan komentator tidak netral, namun, sumber dari kredibilitas mereka adalah tetap, yaitu, akurasi, kejujuran, intelektual, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi, bukan kesetiaan pada kelompok atau hasil tertentu. (Ishwara, 2005: 11)

### 2.1.1 Jurnalisme dan Kewargaan (*Citizenship*)

Bagi negara-negara di mana demokrasi muncul, jurnalisme hadir untuk membangun kewargaan (*citizenship*). Jurnalisme ada untuk memenuhi hak-hak warga negara. Jurnalisme ada untuk demokrasi. Jutaan orang, yang terbedayakan arus informasi bebas, menjadi terlibat langsung dalam menciptakan pemerintahan dan peraturan baru untuk kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negeri mereka.

Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. (Kovach & Rosenstiel, 2004: 11-12)

Sejarah mengungkap sebuah kecenderungan penting. Makin demokratis sebuah masyarakat, makin banyak berita dan informasi yang didapatkan. Pengajar jurnalisme John Hohenberg di Yunani mengatakan "*hampir semua yang penting tentang urusan publik dibuka untuk umum*" (Kovach & Rosenstiel, 2004: 17).

Ada tiga kekuatan yang kini menyebabkan terjadinya pergeseran jurnalisme dari upaya pengembangan komunitas. Pertama adalah sifat teknologi baru. Dalam hal ini, internet telah mulai memisahkan jurnalisme dari geografi, dan selanjutnya dari komunitas yang lebih kita pahami dalam pengertian politik atau kemasyarakatan. Lebih mudah untuk melihat bagaimana orang melayani

perdagangan di situs web dan komunitas yang berbasis kepentingan daripada melayani komunitas politik.

Perubahan besar kedua adalah globalisasi. Saat perusahaan –terutama perusahaan komunikasi- menjadi perusahaan tanpa batas, ihwal kewarganegaraan dan komunitas tradisional pun menghilang dalam pengertian komersial. Seperti yang dikatakan profesor filsafat Universitas Harvard Michael Sandel, “*Seharusnya ada pertanyaan yang terus mengusik di dalam diri kita semua: apakah demokrasi akan dibeli juga?*” (Kovach & Rosenstiel, 2004: 30).

Faktor ketiga yang menggerakkan jurnalisme adalah konglomerasi. Pengertian tentang kebebasan pers akarnya terletak pada independensi. Hanya pers yang independen, pers yang bebas dari sensor atau kontrol pemerintah, yang bisa menyampaikan kebenaran. Dalam konteks modern, independensi itu diperluas sebagai juga bebas dari lembaga-lembaga lain selain pemerintah – misalnya partai politik, pemasang iklan, perusahaan bisnis, dan sebagainya. Konglomerasi bisnis media ternyata mengancam kelangsungan hidup pers sebagai lembaga yang independen karena jurnalisme menjadi bagian dari perusahaan besar yang lebih mementingkan bisnis mereka yang lain. (Kovach & Rosenstiel, 2004: 32)

Ketiga kekuatan tersebut telah mengantarkan konsep jurnalisme kepada perluasan sarana informasi yang bisa diberikan dan diperoleh bukan hanya bagi kalangan profesional media tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak atas informasi.

Secara teoritis, media yang terpercaya (*credible*) menjadi sendi yang kokoh dalam proses demokratisasi. Media yang terpercaya juga mencerminkan kerjasama dan hubungan timbal balik yang baik antara publik dan media massa dalam menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik. Media yang memiliki kualitas seperti itu memungkinkan munculnya opini dan debat publik yang rasional. Jika kredibilitas media ini berhubungan dengan pembentukan ruang publik di era demokratisasi ini, maka ia dapat dimaknai sebagai stimulus yang memungkinkan publik secara sadar atau tidak mengendalikan media, terutama

dalam berbagai keputusan politiknya. Kualitas kredibilitas, yang terdiri dari berbagai dimensi – seperti adil (*fair*), tidak bias (*unbiased*), lengkap dalam memaparkan keseluruhan cerita (*tells the whole story*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*can be trusted*), sebagaimana dinyatakan oleh Meyer – dapat membatasi ruang gerak berbagai pertarungan kepentingan yang mengurung media massa dari berbagai sudut. (LP3ES, 2006: 194)

## 2.2 Citizen Journalism

*Citizen journalism* yang juga dikenal dengan beragam nama lain, seperti *participatory journalism* atau *grassroot journalism* adalah jurnalisme orang biasa. Konsep dasar dalam *citizen journalism* adalah memposisikan audiens sebagai produsen berita juga, bukan hanya konsumen pasif seperti selama ini berjalan dalam logika kerja jurnalisme tradisional berbasis media massa. Dengan kata lain, posisi antara jurnalis sebagai pencari dan penulis berita, narasumber sebagai muasal berita, dan audiens sebagai konsumen berita sudah lebur begitu cair. Antara produsen dan konsumen berita tidak bisa lagi diidentifikasi secara rigid karena setiap orang dapat memerankan keduanya (Gillmor, 2004: xii-xv). Intinya, dalam *citizen journalism* yang diutamakan adalah interaksi dan interkoneksi.

Prinsip dasar *citizen journalism* telah amat jelas menunjukkan bahwa berita sebagai isi interaksi para *users* adalah sebuah bentukan atau konstruk bersama. Jika sebelumnya berita sebatas dimaknai sebagai peristiwa yang dilaporkan melalui media massa (Simolon, 2006: 87), kini berita menemukan makna tersendiri lewat *Citizen Journalism*. Berita bukan lagi sesuatu yang elitis dan hanya punya “satu sisi muka” karena tidak muncul dari sekelompok orang tertentu yang berlabel jurnalis profesional saja. Setiap orang yang mempunyai cerita kehidupan dan berdampak sosial dapat menuliskannya di situs *web* yang berprinsip *citizen journalism*.

Perbedaan mendasar antara *citizen journalism* dengan wartawan profesional lebih terletak pada keahliannya dalam teknik mencari dan menyampaikan berita, namun yang paling utama adalah perbedaan motivasi. Hal

ini dinyatakan oleh seorang Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, hasil wawancara dengan bapak Wilson Lalengke:

*"Selain keahlian, dari sisi motivasi juga berbeda. Kalau watawan lebih kepada motivasi profesi, tuntutan profesi, sementara masyarakat luas justru dimotivasi oleh keinginan untuk berbagi. Dan saya kira, hal2 lain berkenaan dengan ruang lingkup yang diberitakan oleh wartawan dan masyarakat. Ketika masyarakat Wilayah A menceritakan tentang wil A, ruang lingkupnya adalah sekitar A, tapi seorang wartawan bisa bicara lebih luas, perbedaan yang lain adalah mungkin dari sisi objektivitas, karena watawan mungkin sudah dibentuk untuk memilah-milah pemberitaan. Berita yang layak dan tidak layak, sementara masyarakat tidak tahu apakah sebuah berita layak atau tidak. Yang jelas, saya ingin berbagi sehingga lebih kepada subjektivitas saya ingin berbagi. Nah adapun obyek yang diberitakannya itu betul2 sebuah kejadian, saya kira justru disini masyarakat lebih unggul, karena apa yang dia lihat itulah yang diberitakan. Apa yang terjadi disekitarnya, itulah bahan cerita dia."*  
(wawancara dengan Wilson Lalengke, 13 April 2009)

Menurut Lily Yulianti Farid, wartawan yang pernah bekerja di *Kompas*, Radio Australia di Melbourne dan kini aktif bekerja di NHK di Tokyo, *Citizen Journalism* dicirikan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses lahirnya berita. Di Amerika sendiri, bentuk ini berkembang dalam dua dekade terakhir ini. Akarnya adalah *community based media*. Media komunitas (*community media*) senantiasa memiliki tempat, bahkan ada yang dikelola secara profesional seperti di Australia dan Amerika, karena pembaca tidak melulu mencari berita tentang dunia, tapi juga tentang komunitasnya tetangga, dan sekitarnya. Ini terjadi pada *backfence* di AS (Sinar Harapan Online, Rabu, 14 Maret 2007).

Menurut Lasica seperti dikutip oleh situs *wikipedia.org* dan Kusnawan (*Komunika*, Edisi 05/Tahun III/Maret), karakteristik jurnalisme warga antara lain: (1) keterlibatan khalayak sebagai pengguna untuk mengirimkan berita kisah, *blog* pribadi, foto atau potongan video, atau tulisan berita-berita lokal yang terjadi di sekitar tempat tinggal; (2) situs-situs berita dan informasi yang independen; (3) situs yang mengkhususkan diri sebagai situs jurnalisme warga; (4) situs-situs

media yang dibangun secara bersama; (5) media “ringan” lainnya seperti *mailing list* dan *newsletter*, serta (6) situs “*broadcasting*” pribadi.

Salah satu prinsip yang paling menonjol dalam konsep *citizen journalism* adalah adanya keterlibatan atau partisipasi penuh dari warga sehingga mereka tidak hanya menjadi objek dari produk jurnalisme, tetapi sekaligus subjek. Dalam istilah yang dikembangkan oleh situs OhMyNews (“*every citizen is a reporter*”) merupakan sebuah semboyan yang sangat radikal dan dapat menjungkirbalikkan pandangan konvensional tentang jurnalisme. Karena sifat partisipasinya yang penuh, maka tidak ada klaim dari manapun yang merasa sebagai pihak yang bertanggung jawab, dan karenanya berhak mendikte, mengarahkan, dan menentukan jenis berita atau informasi yang akan ditulis oleh para reporter, sebagaimana terjadi dalam media *mainstream*. Kebebasan yang dimiliki oleh reporter jurnalisme warga seluas jaminan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Declaration of Human Rights*. Dalam konteks Indonesia, kebebasan tersebut sebesar jaminan yang diatur oleh amandemen kedua UUD 1945 pasal 28, yaitu:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Di Indonesia, jurnalisme ala warga telah hadir dalam keseharian melalui acara-acara *talkshow* di radio khususnya sejak awal tahun 90-an. Karena dilarang pemerintah menyiarkan program siaran berita, beberapa stasiun radio mengusung format siaran informasi. Pada program siarannya, stasiun radio tersebut (diantaranya adalah Radio Mara 106,7 FM di Bandung yang menjadi pionir siaran seperti ini) menyiarkan acara *talkshow* yang mengajak pendengar untuk aktif berpartisipasi melalui telepon untuk menyampaikan informasi maupun pendapat

tentang sebuah topik hangat. Pada masa orde baru, acara siaran tersebut efektif menjadi saluran khalayak menyampaikan keluhan terhadap kelemahan atau kezaliman penguasa. (Yudhapramesti, Jurnal Observasi, 2007: 36)

Setelah UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, kehadiran *community based media* di bidang penyiaran pun akhirnya terakomodasi. Kehadiran radio atau televisi komunitas menjadi legal. Legalitas ini membuat peluang jurnalisme ala warga menjadi semakin terbuka. Melalui radio atau televisi komunitas, warga bisa bertukar informasi atau pendapat, tentang hal-hal terdekat dengan keseharian mereka, yang biasanya luput diliput oleh media-media besar. Pada radio siaran, biaya peralatan, operasional siaran dan pesawat penerima yang relatif murah – bahkan sangat murah bila dibandingkan dengan operasional televisi atau akses pada internet – membuat peluang jurnalisme ala warga menjadi semakin besar untuk bisa dilakukan oleh lebih banyak orang termasuk pedesaan. (Yudhapramesti, Jurnal Observasi, 2007: 36)

### 2.2.1 Jenis-Jenis *Citizen Journalism*

Gilmor mengatakan *citizen journalism* bukanlah konsep sederhana yang dapat diaplikasikan secara sederhana pada seluruh organisasi pemberitaan. *Citizen journalism* memiliki konsep yang kompleks dengan beragam variasi. JD Lasica, senior editor *Online Journalism Review* menyatakan, ada 6 kategori jurnalisme partisipasi, yaitu (Yudhapramesti, Jurnal Observasi, 2007: 38-40):

#### 1. Partisipasi khalayak dalam *mainstream media*.

Di Indonesia praktik-praktik seperti ini juga telah banyak dilakukan baik di media cetak (surat kabar maupun majalah), media elektronik (radio maupun televisi) serta media *online*. Partisipasi ini dapat berbentuk: komentar khalayak (media *online* biasanya menyediakan ruang untuk berkomentar berdampingan dengan beritanya, radio dan televisi biasa menyediakan acara *talkshow* untuk memberikan kesempatan khalayak

menyampaikan komentar); forum diskusi pembaca/khalayak; kolom artikel; juga termasuk foto, video, laporan yang dikirim oleh khalayak; serta bentuk-bentuk kontribusi khalayak lainnya.

2. Berita independen dan situs yang berisi informasi (*weblog* individual maupun situs dengan tema khusus, misalnya situs yang menyediakan berita kota).
3. Situs dengan partisipasi penuh, dimana hampir semua beritanya diproduksi oleh reporter warga (*citizen reporters*), seperti OhmyNews di Korea Selatan atau Panyingkul (<http://www.panyingkul.com>) di Makasar Sulawesi Selatan.
4. *Collaborative and Contributory media sites*.
5. Media kecil lainnya, termasuk *milist*, *email newsletter*, dan media digital lainnya.
6. Situs penyiaran personal, yang memublikasikan penyiaran radio maupun televisi.

Sementara Steve Outing, senior editor pada the Poynter Institute for Media Studies, mengklasifikasikan *citizen journalism* ke dalam 11 kategori, yaitu:

1. *Citizen journalism* yang membuka ruang untuk komentar publik, dimana pembaca atau khalayak bisa bereaksi, memuji, mengkritik, atau menambahkan bahan tulisan jurnalis profesional. Pada media cetak konvensional, jelas ini biasa kita kenal sebagai ruang surat pembaca.
2. Menambahkan pendapat masyarakat sebagai bagian dari artikel yang ditulis. Warga diminta untuk ikut menuliskan pengalamannya, pada sebuah topik utama liputan yang dilaporkan jurnalis.
3. Kolaborasi antara jurnalis profesional dengan nonjurnalis yang memiliki kemampuan dalam materi yang dibahas, sebagai bantuan dalam mengarahkan atau memeriksa keakuratan artikel. Terkadang profesional nonjurnalis ini dapat juga menjadi kontributor tunggal yang menghasilkan artikel tersebut.

Universitas Indonesia

4. *Bloghouse* warga. Melalui *blog*, orang bisa berbagi cerita tentang dunia, dan bisa menceritakan dunia berdasarkan pengalaman dan sudut pandangnya.
5. *Newsroom citizen transparency blogs*, merupakan *blog* yang disediakan sebuah organisasi media sebagai upaya transparansi, dimana pembaca bisa memasukkan keluhan, kritik, atau pujian atas pekerjaan media tersebut.
6. *Stand-alone citizen journalism site*, yang melalui proses editing. Sumbangan laporan dari warga, biasanya tentang hal-hal yang sifatnya sangat lokal, yang dialami langsung oleh warga. Editor berperan untuk menjaga kualitas laporan, dan mendidik warga (kontributor) tentang topik-topik yang menarik dan layak untuk dilaporkan.
7. *Stand-alone citizen journalism site*, yang tidak melalui proses editing.
8. Gabungan *stand-alone citizen journalism website* dan edisi cetak.
9. *Hybrid: Pro + citizen journalism*. Suatu kerja organisasi media yang menggabungkan pekerjaan jurnalis profesional dengan jurnalis warga. Situs *OhmyNews*, Radio Elshinta, atau Radio Mara FM Bandung termasuk ke dalam kategori ini. Dalam *OhmyNews*, kontribusi berita tidak otomatis diterima sebagai sebuah berita. Editor berperan dalam menilai dan memilih berita yang akan diangkat ke halaman utama.
10. Penggabungan antara jurnalis profesional dan jurnalis warga dalam satu atap, dimana *website* membeli tulisan dari jurnalis profesional dan menerima tulisan jurnalis warga.

Model Wiki, dimana pembaca adalah juga editor. Setiap orang bisa menulis artikel dan setiap orang bisa memberi tambahan atau komentar terhadap komentar yang terbit.

Sementara itu, berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Steve Outing, situs Politikana.com termasuk pada kriteria *Stand alone citizen journalism* yang tidak melalui proses editing. Warga yang dapat mengakses internet dan tergabung

dalam keanggotaan situs tersebut dapat memberikan kontribusi tulisannya secara bebas tanpa dilakukan proses editing oleh pengelola. Kontrol dilakukan oleh para *citizen journalist* itu sendiri seperti misalnya tidak boleh menulis hal-hal yang berbau SARA, dan tulisan-tulisan yang bermuatan pornografi.

### 2.3 Media Komunikasi Internet & *Citizen Journalism*

McLuhan menyatakan bahwa setiap penemuan teknologi baru akan membawa perubahan dalam konsep dan model komunikasi manusia. Setiap penemuan teknologi media baru merupakan perpanjangan alat indera manusia. Buku adalah perpanjangan mata, roda adalah perpanjangan kaki, baju adalah perpanjangan kulit, dan sirkuit elektronik khususnya komputer adalah perpanjangan dari sistem saraf sentral manusia. Dengan memerhatikan contoh tersebut di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya McLuhan menghindari pendefinisian media dalam cakupan yang sempit. Bagi McLuhan, media adalah segala sesuatu yang memperkuat atau mengintensifkan organ, indera, atau fungsi tubuh manusia (Griffin, 1997: 341).

McLuhan membagi sejarah keberadaan manusia dalam perspektif media menjadi lima bagian, yaitu: (1) *Zaman Primitif*, yang merupakan zaman ketika komunikasi masih menggunakan media suara, ucapan, dan pendengaran; (2) *Zaman Literatur*, yang merupakan zaman ketika tulisan menjadi media komunikasi yang dominan setelah munculnya teks; (3) *Zaman Percetakan*, yang merupakan zaman ketika informasi dapat disebarluaskan secara lebih cepat melalui media buku setelah munculnya teknologi mesin cetak Gutenberg; (4) *Zaman Elektronis*, yang merupakan zaman ketika untuk pertama kalinya ditemukan teknologi telegraf sehingga saat ini komunikasi sudah dapat menggunakan media elektronis yang lebih canggih, misalnya, telepon. McLuhan menegaskan bahwa media komunikasi elektronis mendekatkan kita dengan siapa pun dan di mana pun secara instan. Keadaan tersebut digambarkan sebagai sebuah

Universitas Indonesia

Perkampungan Global (*The Global Village*); (5) *Digital Age*, yang merupakan zaman dimana teknologi komunikasi sudah memasuki ranah yang lebih luas dan tidak terbatas. Dengan kehadiran internet, batas-batas ruang dan waktu bukan lagi menjadi halangan bagi seseorang untuk berada dalam sebuah dunia. (Lihat Griffin: 2009). Komputerisasi mau tak mau berpengaruh besar bagi jurnalisme. Ketika semua perangkat teknologi media telah bersifat digital, kebutuhan jurnalisme akan kecepatan semakin dipenuhi. Kecepatan ruang-waktu elektronika dipakai untuk mengantarkan pesan bergambar dan bersuara (multimedia). Teknologi digitalisasi membuat informasi dapat diakses siapapun dan dimanapun secara privat (Santana, 2005: 2-3).

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang fantastis pada awal dekade 1990-an mendorong lahirnya teknologi internet. Secara sederhana, internet bisa dipahami sebagai sebuah cara atau metode untuk mentransmisikan bit-bit data atau informasi sebagai sebuah cara atau metode untuk mentransmisikan bit-bit data atau informasi dari satu komputer ke komputer yang lain, dari satu lokasi ke lokasi yang lain di seluruh dunia. Kelebihan teknologi yang mulai marak pada 1995 ini adalah kemampuannya menjangkau seluruh penjuru dunia dalam waktu yang serentak. Internet juga memberikan ruang yang nyaris tak terbatas bagi setiap orang untuk menyimpan, mengirimkan, atau membuka kasus informasi tersebut kepada siapa saja. Dengan dikenalkannya teknologi *World Wide Web* (WWW) oleh Tim Berners-Lee, internet tidak hanya menampilkan “halaman-halaman” yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga gambar, grafik, animasi, dan suara yang menarik serta penuh warna sehingga mampu menampilkan layanan multimedia yang bersifat audio-visual (data, citra, dan suara). Internet tidak saja dapat menyajikan data yang bersifat teks dan gambar, tetapi juga sinergi audio dan visual (Dominick, dkk, 2004: 43). Sifatnya yang dinamis dan interaktif membuatnya lebih menarik dibanding sumber media informasi lain.

**Tabel 4**  
**Kekuatan dan Kelemahan Berbagai Jenis Media**

No	Kategori	Mobile	Online	Televisi	Radio	Cetak
1	Jangkauan	+++	+++	++	++	+
2	Kedatangan	+++	+++	+++	+++	+
3	Dokumentasi	++	+++	+	+	++
4	Interaksi	+++	+++	++	++	+
5	Impresi	++	++	+++	++	+
6	Kepraktisan	+++	++	+	++	+++
7	Ruang	+++	+++	+	+	+
8	Waktu	+++	+++	++	++	+

*Sumber: Supriyanto & Yusuf, Pers dan Teknologi Media: Dejournalisasi di Tengah Konvensional, dalam Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, April 2007, hal 100.*

Teknologi internet kemudian menyebabkan terjadinya banjir data atau *information overload*, padahal tidak semua informasi itu dibutuhkan. Dalam kaitan ini, Baudrillard (1995) mengatakan, masyarakat saat ini hidup dengan banyak informasi setiap hari tetapi dengan makna yang susut. Bahkan tak jarang mereka tersesat dalam tumpah ruah informasi antara yang nyata dan palsu (Baudrillard, 1998: 7; Preston, 2001: 90). Komputer dan internet, juga menjadikan sumber informasi untuk hiburan dan informasi perjalanan wisata. Pengguna *internet* menggantungkan pada situs untuk memperoleh berita. Dua sampai tiga pengguna internet mengakses situs untuk mendapatkan berita terbaru setiap minggunya.

Menurut Laquey, asal mula internet adalah tercipta suatu ledakan tak terduga di tahun 1969, yaitu dengan lahirnya *Arpanet*, suatu proyek eksperimen Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bernama DARPA. Misi awalnya sederhana, yaitu mencoba menggali teknologi yang dapat menghubungkan para peneliti dengan berbagai sumber daya jauh seperti sistem komputer dan pangkalan data yang besar. *Arpanet* berhasil membantu membudidayakan sejumlah jaringan lain yang kemudian saling berhubungan. Dua puluh lima tahun kemudian sistem

ini berevolusi menjadi suatu 'organisme' yang semakin luas perkembangannya, yang mencapai puluhan juta orang dan ribuan jaringan.

Sebagian besar *komputer* dan jaringan yang tersambungkan ke *internet* masih berkaitan dengan masyarakat pendidikan dan penelitian. Kenyataan ini tidaklah mengejutkan karena internet memang lahir dari benih penelitian. Menurut LaQuey yang membedakan *internet* (dan jaringan global lainnya) dari teknologi komunikasi tradisional adalah tingkat interaksi dan kecepatan yang dapat dinikmati pengguna untuk menyiarkan pesannya. Tak ada media yang memberi setiap penggunanya kemampuan untuk berkomunikasi secara seketika dengan ribuan orang. (Dirgahayu, dalam Jurnal Observasi, 2000: 24)

Internet unggul dalam menghimpun berbagai orang, karena masalah geografis tak lagi menjadi penghalang, berbagai orang dari negara dan latar belakang berbeda dapat saling bergabung berdasarkan kesamaan minat dan proyeknya. Internet menyebabkan begitu banyak perkumpulan antara berbagai orang dan kelompok. Menurut Reddick dan King (1996), informasi yang menarik, tepat waktu dan cermat sangat penting untuk jurnalisisme yang baik.

Internet kini menjadi *new media*, media kontemporer yang memberi wahana baru dalam aktualitas pemberitaan. Keunggulan itu akhirnya dipergunakan oleh sebagian pihak untuk menjadikan media internet sebagai salah satu wadah *mainstream media*. Tercatat sejumlah lembaga menggunakan domain-domain yang disewanya sebagai media pemberitaan. Media elektronik dan cetak juga merambah bidang ini. Internet akhirnya marak dengan pergerakan-pergerakan informasi, seperti halnya yang terjadi didunia realitas.

Harold Innis (dalam William Melody, 1995: 258) menguraikan bahwa perkembangan teknologi komunikasi baru selain berhasil menyelesaikan masalah yang telah ada, ternyata di lain pihak memunculkan masalah-masalah yang baru. Innis secara spesifik menyoroti dampak teknologi komunikasi baru yang menurutnya cenderung menghilangkan sentuhan personal pada hubungan antarmanusia. Namun, menurut Howard Rheingold, internet merupakan sebuah

Universitas Indonesia

peluang untuk menghadirkan kembali hubungan antarpribadi yang pada saat ini intensitasnya semakin berkurang.

Di dalam internet, perbedaan gender, usia, bangsa, dan penampilan fisik tidak menjadi soal karena memang hal tersebut tidak dapat dilihat langsung (Howard Rheingold, 2000: 11). Melalui internet, *citizen journalism* dapat mengoptimalkan perannya sebagai forum diskusi dan media kesaksian. Selain mendapatkan informasi dari sebuah situs (*website*), orang juga bisa bertukar ekspresi, memberi aksi atau reaksi atas arus informasi melalui *mailing list* atau *blog*. Hal ini sesuai dengan hal yang diterapkan oleh situs Politikana.com yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Daniel Dhakidae (dalam wawancara, 19 Mei 2009) menyebutkan bagaimana internet telah mengubah model jurnalistik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya:

*“Internet memang mengubah seluruh pemikiran, seluruh style di dalam jurnalistik sendiri, bukan hanya penampilan tapi juga essence dari jurnalistik itu juga berubah dalam pengertian tidak ada lagi penerbit. Kita sebut blog, facebook, macam-macam yang ada di internet, sekarang ada juga twitter. Semua ini jelas saja suatu dimensi baru yang tidak pernah dibayangkan bahkan 10-15 tahun lalu. Dia mengubah benar-benar the essence, yaitu semua menjadi jurnalis, siapa aja yang punya hp bisa mengirimkan berita. Jurnalisme bebas, tidak lagi harus terikat oleh piramida terbalik, segala jenis berita dan tulisan itu diterima sebagaimana adanya dan tidak lagi dituntut orang ini direkrut oleh siapa. Berita sendiri sudah menjadi sesuatu yang benar-benar berubah karena makin dekat ke real time.”*

Internet adalah medium terbaru yang mengonvergensiikan seluruh karakteristik dari bentuk-bentuk terdahulu. Karena itu menurut Hilf, seperti dikutip Santana (2002), apa yang berubah bukanlah substansinya melainkan mode-mode produksi dan perangkatnya. Kehadiran internet telah mengubah banyak hal terutama pada perilaku arus informasi dan perilaku orang

berkomunikasi. Mengutip pernyataan Marshall McLuhan, *medium is the message*: media adalah pesan itu sendiri, pesan medium yang berbeda. Cerita sandiwara radio serbuan dari planet mars yang mengundang kepanikan massa karena dikira adalah kejadian sesungguhnya, akan memberi dampak berbeda manakala disampaikan lewat panggung pertunjukan atau koran, atau televisi, atau media lainnya. Internet telah mengubah banyak hal. Titik esensialnya adalah bahwa keunikan internet terletak pada efisiensinya sebagai sebuah medium (Santana, 2002).

Perubahan ini telah membawa konsekuensi besar ke dalam dimensi-dimensi lain dari kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, demokrasi, dan lain-lain. Bosan dengan arah pemberitaan *mainstream media* yang memiliki agenda tersendiri, khalayak yang berdaya kemudian menunjukkan dayanya dengan merencanakan, mengolah, dan mempresentasikan sekaligus membincangkan (melalui diskusi, perdebatan, bahkan konflik) informasi yang diperolehnya melalui sebuah forum *citizen journalism*. Melalui *citizen journalism* di internet, siapapun bisa merasakan kekuasaan atas pengetahuan karena ia bisa sepenuhnya merencanakan, memilih, dan mengevaluasi informasi yang diinginkan dan dibutuhkannya.

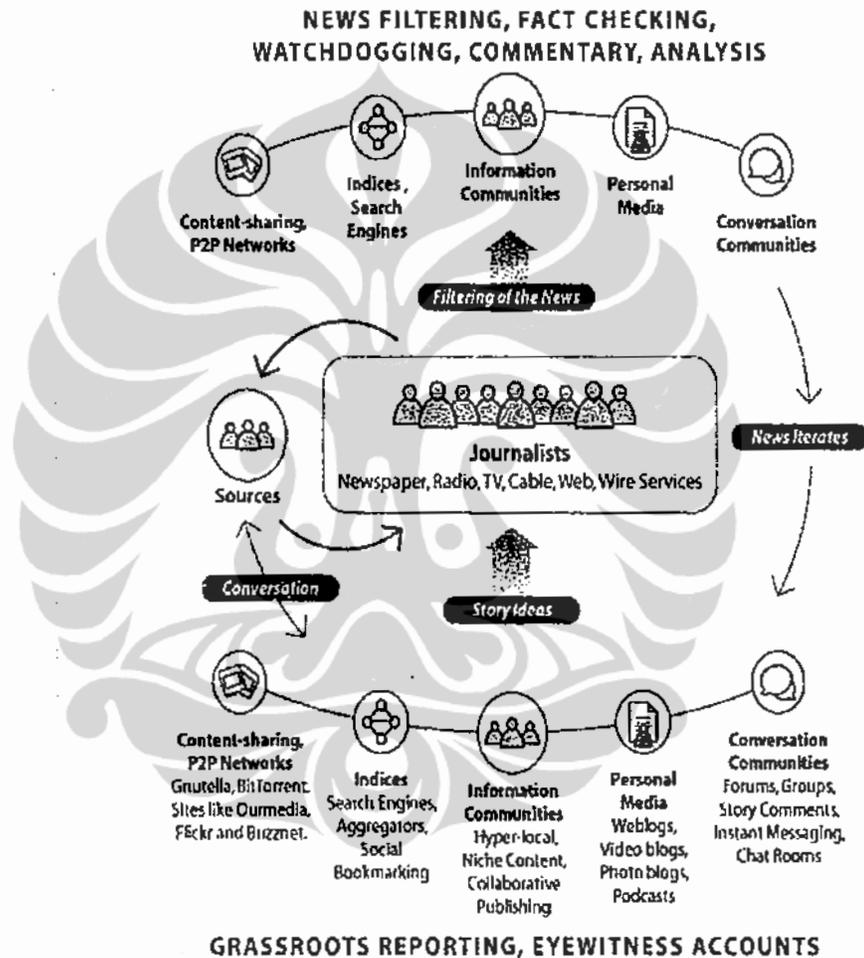
Berikut adalah alur yang dapat menjelaskan bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin dalam penyampaian informasi antara media massa mainstream dengan *citizen journalism*:

Gambar 1

## The Emerging Media Ecosystem

## The Emerging Media Ecosystem

The relationship between citizen media and mainstream media is symbiotic. Information communities and weblogs discuss and extend the stories created by mainstream media. These communities and the blogosphere also produce citizen journalism, grassroots reporting, eyewitness accounts, annotative reporting, commentary, analysis, watchdogging and fact-checking, which the mainstream media feed upon, developing them as a pool of tips, sources and story ideas.



Source: Based in part on "Blogosphere, the emerging Media Ecosystem" by John Hitt, *Management News*

Graphic by Shayne Bowman and Chris Wilks

#### II.4 Aktivitas *Citizen Journalism*: Elemen *Civil Society*

Aktivitas *citizen journalism* dalam situs Politikana.com dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari kontrol publik. Kontrol publik merupakan istilah yang

diadopsi dari konsep dasar *civil society*<sup>1</sup>, yang menggambarkan sebuah kekuatan dan keberdayaan masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap suatu kebijakan atau keputusan yang berhubungan dengan publik (*public policy*) serta kemampuan masyarakat untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya (*public interest*) di hadapan pemilik otoritas politik, ekonomi maupun sosial budaya. Pemilik otoritas itu diartikan sebagai pihak dalam suatu struktur sosial yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penetapan suatu keputusan berdasarkan penafsiran mereka yang keputusan itu akan mengikat dan berdampak pada publik.

Keberdayaan masyarakat untuk mampu melakukan aksi berupa kontrol itu terjadi kerana muncul kesadaran akan keharusan adanya *social movement* atau pergerakan sosial, dimana masyarakat mampu memberdayakan dirinya menghadapi segala macam tantangan. *Civil society* tidak lain merupakan institusialisasi dari *social movement* ini, dimana masyarakat dibayangkan sebagai “wilayah sosial” yang mandiri dan integratif serta sikap cultural yang kreatif, progresif, pluralis serta didukung oleh sistem kepemimpinan yang berwibawa dan bertanggungjawab sehingga akan menghasilkan suasana dan sistem politik yang demokratis (Efendi, dkk, 1998).

Sebagai sebuah konsep, *civil society* telah menjadi perdebatan menarik para peletak dasar ilmu sosial. Hegel (1770-1831) merupakan orang pertama yang secara tegas telah memberikan pembedaan antara konsep negara dengan *civil society*. Menurutnya *civil society* adalah suatu wilayah (*sphere*) perantara dia antara wilayah ‘keluarga’ dan wilayah ‘negara’, dimana kaum borjuis mulai melepaskan diri dari berbagai kungkungan kekuasaan negara feodal maupun keluarga hingga tercipta wilayah sosial baru yang ditandai oleh adanya berbagai

<sup>1</sup> *Civil society* sendiri mengandung pemahaman akan keharusan atau berkembangnya sebuah tatanan sosial serta sikap cultural yang bertolak dari ide pemberdayaan. Asal-usul konsep *civil society* memiliki akar perjalanan sejarah kebudayaan Eropa, khususnya tradisi pada abad ke-18, dimana terdapat istilah mengandung pengertian sama seperti *koinonia politike* dalam bahasa Yunani dan *societes civilis* dalam bahasa Jerman yang semuanya memberi pengertian sama mengenai *civil society* dengan negara. Pada masa itu, seorang anggota *civil society* atau masyarakat kota dengan sendirinya juga berarti warga dari suatu negara (*citizen*) setempat (Aminuddin, 1998).

persaingan ekonomi dalam bentuk kerja, produksi, pertukaran jasa dan barang serta perolehan harta.

Karl Marx melanjutkan pemikiran Hegel untuk menyempurnakan teorinya mengenai masyarakat kapitalis. Berbeda dengan Hegel, Marx melihat *civil society* sebagai bentukan sosial (*social formation*) masyarakat borjuis. Sementara Antonio Gramsci menganalisis *civil society* dengan menggunakan konsep hegemoni yang mengkritik determinisme ekonomi Marx. Gramsci menggambarkan bahwa ajang pembentukan hegemoni justru terletak pada wilayah *civil society* dan bukan terletak pada wilayah negara. Untuk mempertahankan kekuasaan kelas sosial yang dominan, mau tidak mau mereka harus bernegosiasi dan membuat kompromi-kompromi dengan kelompok sosial lainnya di dalam arena *civil society*.

Pemikiran Gramsci ini banyak berpengaruh pada ilmuwan sosial masa kini seperti John Keane yang menolak determinisme ekonomi dan melihat *civil society* sebagai arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan (*freedom*), perserikatan sukarela (*voluntary association*) dan keragaman pemerintah. Gramsci, Keane dan ilmuwan liberal lainnya melihat hubungan yang setara antara negara dan *civil society* mengandung distribusi kekuasaan ke aneka ragam wilayah publik yang terdapat di dalam dan di antara negara dan *civil society*.

Amiruddin (1998) menarik benang merah yang menghubungkan beberapa pemikiran di atas. Pertama, bahwa konsep *civil society* adalah otonom, artinya ia memiliki kemandirian terhadap negara tetapi di antara keduanya sekaligus terdapat hubungan timbal balik. Kedua, bahwa *civil society* merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda tetapi sekaligus juga memungkinkan terjadinya negosiasi terus menerus secara bebas.

Sofian Efendi, dkk (1998) mengarahkan agar *civil society* dipahami dalam konteks hubungan negara (*state*) dengan masyarakat (*society*), bukan pada konteks masyarakat pada dirinya sendiri. Negara dapat dibayangkan sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang dipelihara oleh seperangkat peraturan perundangan dan alat pelaksana serta pemaksa dan sangat dominan dalam

Universitas Indonesia

kehidupam individu warga negara. Sementara masyarakat diartikan sebagai kelompok yang jauh lebih besar jumlahnya tetapi harus tunduk kepada penguasa.

Soal penguatan peran kekuasaan negara, Hikam (1997) menuliskan bahwa negara modern telah tumbuh dan berkembang menjadi etintas otonom dan bahkan dapat “mengatasi” masyarakat yang notabene adalah sang penciptanya. Negara bukan saja pelaksana kepentingan-kepentingan warga negara (konsep liberal) atau kelas borjuis (konsep Marxian), tapi ia lambat laun mengembangkan kepentingan sendiri yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan kedua pihak yang terakhir itu.

Itulah sebabnya, negara modern memiliki otonomi relatif *vis a vis* masyarakat. Otonomi yang “relatif” itu selanjutnya bisa membesar dan mengatasi masyarakat ketika negara menjadi kelewat berkembang (*overdeveloped*). Di dalam masyarakat pasca-terjajah seperti Indonesia, kekuasaan negara menjadi cepat membesar, karena adanya sebab akibat struktural dan kultural. Yang pertama adalah warisan birokrasi kolonial yang masih dipertahankan. Sedangkan yang kedua adalah lemahnya perkembangan *civil society* sebagai kekuatan yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara. (<http://www.tempo.co.id/ang/min/02/05/kolom2.htm>)

Frans Magnis Suseno (1997) mendeskripsikan *civil society* sebagai “wilayah-wilayah” kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadayaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik *civil society* adalah suatu wilayah yang berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, dan tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat (Hikam, 1996: 3). Yang juga penting: *civil society* perlu dipahami

sebagai proses, bukan sebagai sesuatu yang jadi.

(<http://www.fortunecity.com/millennium/oldemil/498/civils/FMSuseno.html>)

Dalam konteks yang lebih luas, adanya kontrol dari masyarakat atas kekuasaan negara menjadi salah satu bagian penting dari demokrasi yang kini dikembangkan di semua negara dunia (Sofian Effendi, dkk, 1998).

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa konsepsi dasar *civil society* adalah menolak otoriterisme penguasa dalam menjalankan kehidupan bernegara, dan perlunya menanamkan kehidupan berdemokrasi. Ardianto (1998) mengemukakan bahwa di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, *civil society* menjadi terpinggirkan karena negara (rezim Orde Baru) dalam melakukan komunikasi politiknya menggunakan paradigma komunikasi yang mekanistik, dimana komunikator (penyelenggara negara) sangat perkasa (otoriter) dan masyarakat (rakyat) menjadi pasif. Sehingga semua program kehidupan bernegara, baik dalam komunikasi politik, komunikasi pembangunan, komunikasi hukum, komunikasi ekonomi/bisnis, komunikasi sosial, komunikasi budaya dan bentuk komunikasi lainnya selalu datang dari atas (*top down communications*), bukannya dari bawah (*bottom-up communications*).

Untuk mendukung penguatan *civil society*, lebih lanjut Ardianto (1998) dengan mengutip paradigma komunikasi yang dikemukakan oleh B. Aubrey Fisher, menyarankan agar negara meninggalkan paradigma komunikasi politik yang mekanistik dan beralih kepada paradigma lainnya yakni paradigma komunikasi psikologis, interaksionis dan pragmatis yang dinilai lebih manusiawi. Dengan ketiga paradigma komunikasi itu maka dapat dilihat adanya *bargaining position* dan *bargaining power* antara penguasa negara dengan rakyatnya. Munculnya bargaining tersebut, maka akan berdampak pada munculnya kekuatan dan keberanian dari rakyat untuk melakukan partisipasi politik dalam bentuk penyaluran aspirasi maupun melakukan koreksi dan kontrol terhadap kebijakan yang dibuat oleh otoritas negara.

Sebagaimana negara, media (disebut juga dengan pers) merupakan sebuah otoritas atau kekuasaan yang juga dibutuhkan kontrol dari masyarakat, khususnya di era pers bebas dimana negara tidak lagi melakukan represi pada media. Kontrol masyarakat dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap hegemoni yang berpotensi dilakukan oleh media mengingat besarnya kekuasaan media di bidang informasi yang karena kekuatannya dapat digunakan untuk kepentingan tertentu dalam rangka mempengaruhi masyarakat dan juga negara. Masyarakat dapat melakukan kontra hegemoni atas hegemoni yang dilakukan oleh media.

Konsep hegemoni media diadopsi dari konsep hegemoni dicetuskan oleh Antonio Gramsci (1891-1937) yang merupakan hubungan antar kelas dengan kekuatan sosial lain. Hegemoni terjadi apabila suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan persuasi. Sementara *counter-hegemony* atau hegemoni tandingan merupakan aktivitas dalam *civil society* sebagai wadah perjuangan kelas, dimana kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (*subordinate*) menyusun perlawanan terhadap pengaturan konsensus atau hegemoni yang dilakukan oleh kelompok sosial dominan. (Simon, 1999)

## 2.5 Demokratisasi Komunikasi: *Citizen Journalism* dalam Sistem Demokrasi

### 2.5.1 Definsi Demokrasi

Kata “*demokrasi*” yang berasal dari bahasa latin “*demos*” dan “*cratein*” atau “*cratos*”, kemudian diserap dalam bahasa Inggris “*democracy*” kini sudah menjadi kosa kata umum yang sudah terbiasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian demokrasi merupakan konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan manakala rezim-rezim totaliter dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri. (USIS, 1991: 4)

Di dalam "The Advanced Learner's Dictionary of Current English (Hornby, dkk: 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "democracy" adalah:

*(1) Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representative. (2) Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) Society in which there is treatment of each other by citizens as equals".*

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "rule of law", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. (Winataputra, 2002: 117)

Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan "dari, oleh, dan untuk rakyat" maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971, 2006; Coppedge dan Reinicke 1993).

Dalam prakteknya, yang menjalankan pemerintah bukan rakyat, tapi elite yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat jauh lebih banyak dan yang mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian "demokrasi populistik" hendak tetap dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep "poliarki" sebagai pengganti dari konsep "demokrasi

Universitas Indonesia

populistik” tersebut. Poliarki dinilai lebih realistis untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” bukan oleh “semua rakyat”, oleh “banyak orang” bukan “semua orang”.

Demokrasi dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut: Adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk 1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi; 2) berekspresi atau berpendapat; 3) menjadi pejabat publik; 4) persaingan atau kotestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting; 5) memberikan suara dalam pemilihan umum; 6) ada pemilihan umum yang jujur; 7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah; dan 8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl, 1971: 3).

Sederhananya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Demokrasi pada dasarnya bukan kesejahteraan ekonomi, bukan penegakan hukum, bukan pemerintahan yang bersih, bukan pemerintahan yang efektif dan efisien, meskipun semuanya bisa berkaitan dengan demokrasi. Oleh karena itu, dapat dipahami kemudian mengapa Singapore, Saudi Arabia, atau China sekarang yang jauh lebih sejahtera, pemerintahannya lebih efisien dan efektif, dan penegakan hukumnya dinilai jauh lebih baik dibanding India atau Indonesia misalnya, dinilai bukan negara demokrasi, atau dinilai kurang demokrasi dibanding India dan Indonesia sekarang. Di Singapore, Saudi Arabia, dan China kebebasan itu yang tidak ada meskipun secara ekonomi lebih sejahtera,

dan pemerintahannya lebih efektif dan efisien. (Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, UNDP-Bappenas, 2008)

Demokrasi mengandung elemen-elemen dasar yang perlu diperhatikan, yaitu: (Tim Penulis FES & TRI, 2003: 9)

- Demokrasi mengakui kesetaraan setiap individu. Artinya setiap orang (warga negara) memiliki kedudukan yang setara, tidak ada yang tinggi atau rendah. Itu adalah elemen mendasar yang merupakan inti dari demokrasi.
- Nilai-nilai yang ada pada setiap individu mengatasi nilai-nilai yang ada pada demokrasi. Maknanya adalah, demokrasi tidak merupakan sebuah wadah kosong, tetapi sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya.
- Pemerintah bukanlah penguasa yang sesungguhnya, karena dalam demokrasi, pemerintah merupakan pelayan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan yang sejati.
- Toleransi dari yang mayoritas kepada minoritas. Di sini tercermin pula saling melindungi, menghormati, menghargai dan yang besar mengayomi yang kecil.
- Adanya musyawarah dalam memutuskan setiap persoalan, bukan ditentukan sendiri oleh kelompok yang mayoritas, karena akan berubah menjadi tirani mayoritas.
- Adanya aturan hukum yang diterapkan untuk semuanya. Demokrasi tanpa aturan hukum akan menjadi anarkis. Karena itu, hukum merupakan dasar yang paling penting.
- Adanya cara untuk mencapai tujuan bersama, apakah itu prosedur atau mekanisme maupun tata caranya. Semuanya harus mengikuti kaidah-kaidah demokrasi. Demokrasi yang baik harus pula dilakukan dengan cara yang baik.

Menurut Thomas R. Dye dan Harmon Zeilgler (1996: 7), ide dasar dari demokrasi merefleksikan empat hal. *Pertama*, merupakan partisipasi rakyat di dalam keputusan yang membentuk kehidupan individu-individu dalam suatu masyarakat. *Kedua*, merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas dengan pengakuan hak-hak minoritas, yaitu hak kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, mendapatkan informasi, membentuk partai oposisi, dan menjalankan jabatan-jabatan publik. *Ketiga*, merupakan komitmen untuk menghargai martabat individu dan menjamin nilai-nilai kehidupan yaitu, kebebasan dan kepemilikan. *Keempat*, suatu komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dirinya. (Tim penulis FES & TRI, 2003: 10)

Noberto Bobbio, ilmuwan sosiologi asal Italia (seperti dikutip McNair, 2003: 17) mengemukakan bahwa:

*"Liberal democracy assumes that citizens, 'once they are entrusted with the right to choose who govern them', are sufficiently well-informed 'to vote for the wisest, the most honest, the most enlightened of their fellow citizens'.*

Dalam hal ini tugas jurnalis adalah menyediakan informasi yang esensial bagi masyarakat sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*) (Mencher, 2000: xi). Dari sini partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan tersebut menjadi efektif karena mereka mempunyai pemahaman yang memadai mengenai apa yang hendak diputuskan oleh para pejabat publik.

Terkait dengan demokrasi, *citizen journalism* mengandung nilai-nilai demokrasi. Menurut Amien Rais (1986), paling tidak terdapat sepuluh kriteria demokrasi, adalah sebagai berikut: (1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan; (2) Persamaan di depan hukum; (3) Distribusi pendapatan secara adil; (4)

Kesempatan pendidikan yang sama; (5) Empat macam kebebasan (yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama); (6) Ketersediaan dan keterbukaan ekonomi; (7) Mengindahkan tata krama politik (*fatsoen* politik); (8) Kebebasan individu; (9) Semangat kerjasama; (10) Hak untuk protes.

Salah satu kriteria demokrasi menekankan pada faktor kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, yang menyebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Negara Amerika sebagai salah satu negara pelopor penegakan kebebasan pers memiliki amandemen yang menjamin kebebasan tersebut. Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan pers menyebutkan: “Kongres tidak boleh membuat peraturan apa pun yang dapat menghambat kebebasan berbicara (*freedom of speech*) atau kebebasan pers.” (Rivers, dkk, 2004: 3)

Peran pers didudukkan berdasarkan konsepsi manusia dan negara itu. Jefferson berpendapat pers memiliki dua fungsi, yakni mencerdaskan publik dan menjaga kemerdekaan personal. Pada tahun 1823 Jefferson menulis: “Pers adalah instrumen terbaik untuk mencerdaskan orang, sekaligus meningkatkan harkatnya sebagai makhluk rasional, moral dan sosial.” Demokrasi memberi beban berat kepada warga masyarakat untuk terus aktif menjaganya. Pers adalah bantuan penting yang diperlukan untuk menanggung beban tersebut. Jefferson pun berpendapat pers juga harus mengawasi pemerintah. Kebebasan individu merupakan inti demokrasi, namun pemerintahan demokratis pun memberangus hak-hak warganya. Karena itu pers juga harus menjaga kebebasan perorangan itu, dan meningkatkan semua orang jika hal itu terancam. Untuk berfungsi sebagai pendidik dan pengawas, pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya.

Jefferson berpendapat pemerintah tidak boleh menghalangi pers. (Mencher, 2000: 89).

Kebebasan akan arus informasi juga dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UDHR- Universal Declaration of Human Rights, 1948):

- Article 19, "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media regardless of frontiers.*"
- Article 29 (ayat 2), "*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*"

Mengacu pada penjaminan kebebasan arus informasi, *citizen journalism* atau jurnalisme warga, menjadi kegiatan yang paling memenuhi keinginan masyarakat demokratis dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Masyarakat bukan hanya bertindak sebagai pembaca atau pemirsa media, tetapi juga menjadi reporter, penulis, editor, bahkan distributor berita. Trevor Barr, profesor dari Swinburne University of Technology Australia, menyatakan hal itu dengan kalimat "*the audience become the authors*" (2002:122)

Hachten (2005: xiv) mengemukakan bahwa informasi yang penting atau berguna akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Bidang-bidang seperti ekonomi, pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsinya tanpa adanya aliran berita dan informasi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, menurut Hachten, berita dan informasi menjadi semacam *lifeblood* dalam tubuh politik (*our body politic*). Dalam ungkapan Hachten, "*...democratic society without independent news media is imposible to imagine*". Arti penting informasi dalam sistem politik demokrasi juga dapat pada kutipan berikut:

Universitas Indonesia

*The democratic form of society...assumes that (its members) are sufficiently well informed...to be able to form the broad judgements required by an election, and to maintain between elections the vigilance necessary in those whose governors are their servants and their master...democratic society, therefore needs a clear and truthful account of events, of their background and their causes" (Deklarasi A 1949 Royal Commission on The Press, dikutip dari Hachten, 2005:271).*

Deutsh dan Lipset (1950s dalam Denny, 1999: 1-2) selain "economic development" yang juga berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi adalah "exposure to mass media, literacy, urbanization education", karena hak-hak tersebut akan mempengaruhi "...the political well being of people". Walaupun demikian tidaklah berarti bahwa "...poor country cannot be democracies or that rich countries will always be democratic. Wealth does not in itself cause democracy". Tidaklah berarti bahwa negara miskin tidak bisa menjadi negara demokrasi, demikian pula sebaliknya tidak selalu negara kaya itu demokratis. Kemakmuran itu penting, tapi tidak dengan sendirinya menjamin untuk menjadi negara demokrasi.

### 2.5.2 Demokratisasi Komunikasi

Seperti yang telah disebutkan oleh Deutsh dan Lipset, bahwa salah satu yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di sebuah negara adalah *exposure to mass media*, yang akan mempengaruhi kesadaran seseorang untuk berpolitik. Oleh sebab itu, perlu dipahami demokratisasi dalam komunikasi sebagai bentuk dari perkembangan demokrasi melalui media massa.

Secara ideal tren kebijakan komunikasi global yang patut dipertimbangkan adalah pendekatan demokratisasi komunikasi seperti yang dikemukakan MacBride (1980: 66), yaitu:

*"Demokratisasi komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana: pertama, individu-individu menjadi mitra yang aktif dan bukan semata-*

*mata sebagai objek komunikasi; kedua, meningkatnya pertukaran berbagai jenis pesan; ketiga, meningkatnya derajat kualitas representasi dan partisipasi masyarakat dalam komunikasi publik.”*

Menurut Spichal (1995: 5), demokratisasi komunikasi dalam berbagai konteksnya selalu didasarkan pada 4 asumsi, yaitu:

1. Warga negara bersifat *well informed*,
2. Tumbuhnya kesadaran politik warga negara;
3. Adanya kesetaraan hak untuk berbicara dan berpartisipasi dalam berbagai pembuatan keputusan;
4. Adanya keterbukaan ruang publik.

Berdasarkan uraian tersebut, sebuah kelompok, komunitas maupun masyarakat, secara ideal diharapkan memiliki kondisi yang demokratis dalam berkomunikasi. Artinya, narasumber informasi, komunikator hendaknya memberikan kesempatan dan peluang yang sama pada khalayak sasarannya untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, keinginannya dalam sebuah proses komunikasi sehingga komunikasi yang bersifat interaktif dan konvergensi akan lebih penting dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. (Rachmiate, 2007: 12)

### **2.5.3. Teori Demokratisasi Komunikasi**

#### **2.5.3.1. Teori Jurgen Habermas**

Dalam mengkaji demokratisasi komunikasi, pijakan teoretis yang digunakan dan dianggap tepat untuk menggambarkan realitas digunakan dan dianggap tepat untuk menggambarkan realitas tersebut adalah teori “pragmatik universal” dan “transformasi masyarakat” dari Jurgen Habermas.

Habermas menguraikan bahwa masyarakat harus dipahami sebagai campuran dari 3 kepentingan besar, yaitu: pekerjaan, interaksi dan kekuasaan.

*Pertama*, pekerjaan, terdiri dari usaha-usaha untuk menciptakan sumberdaya material. Sifatnya sangat instrumental untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terlihat dan mencapai sasaran-sasaran konkret. Ia meliputi rasionalitas instrumental dan diwakili oleh ilmu-ilmu yang bersifat empiris-analitis. Dengan kata lain, teknologi digunakan sebagai sebuah instrumen untuk mencapai hasil-hasil praktis dan didasarkan pada kajian ilmiah.

*Kedua*, interaksi atau penggunaan bahasa dan sistem simbol-simbol lainnya dari komunikasi, kerja sama sosial yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, sehingga Habermas menamainya sebagai “kepentingan praktis”. Kepentingan interaksi dapat dilihat dalam pembicaraan, konferensi, hubungan keluarga dan banyak usaha lainnya yang mengandung kerja sama.

*Ketiga*, kekuasaan. Tatanan sosial umumnya mengarah pada distribusi kekuasaan. Meskipun semua manusia juga menginginkan bebas dari dominasi, kekuasaan akan mengarah pada komunikasi yang menyimpang. Dengan mewaspadaikan ideologi-ideologi yang mendominasi kekuasaan dalam masyarakat, kelompok-kelompok dapat diberdayakan untuk melakukan perubahan sosial. Akibatnya, kekuasaan menjadi sebuah kepentingan emansipatif. Bagi Habermas, jenis kajian yang dilakukan oleh para ahli teoretisi kritis bersifat emansipatif karena ia dapat memberdayakan kelompok-kelompok yang mestinya tidak berdaya. Berikut rangkuman tiga kepentingan masyarakat:

**Tabel 5**  
**Tiga Kepentingan Masyarakat**

No	Tipe	Sifat Kepentingan	Rasionalitas	Ilmu yang Terkait
1	Pekerjaan	Teknis	Instrumen	Ilmu-ilmu Empiris
2	Interaksi	Praktis	Praktis	Sejarah
3	Kekuasaan	Emansipatif	<i>Self Reflection</i>	Teori Kritis

*Sumber: J. Habermas (1989)*

Menurut Habermas, situasi pembicaraan di masyarakat harus dimodelkan sebagai berikut:

- Situasi pembicaraan yang ideal menuntut kebebasan berbicara, tidak boleh ada kekangan terhadap apa yang bisa diungkapkan.
- Semua individu harus dimiliki akses yang sama untuk berbicara.
- Norma-norma, kewajiban-kewajiban masyarakat tidak berisi satu, tetapi terdistribusi secara sama pada semua lapisan masyarakat.

Bila persyaratan di atas telah dicapai, akan terbentuk komunitas emansipatif yang diperlukan untuk melakukan perubahan sosial sehingga kebutuhan individu dapat dipenuhi.

Dalam konteks penelitian, demokratisasi komunikasi berkaitan dengan bagaimana warga negara dapat merealisasikan atau mewujudkan kewarganegaraannya. Dalam hal ini, kita perlu merujuk pada konsep kewarganegaraan yang dikembangkan oleh T.H. Marshall. Menurut Marshall (seperti dikutip oleh Murdock dan Golding, 1989: 18-34), paling tidak ada tiga dimensi kewarganegaraan: *sipil*, *politik* dan *sosial*.

*Pertama*, hak-hak sipil berkaitan dengan kebebasan gerak individu dalam ruang masyarakat sipil (*civil society*). Termasuk didalamnya kebebasan untuk berbicara, berpikir, beragama, bergerak dan berasosiasi, serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya.

*Kedua*, hak-hak politik berkenaan dengan kondisi yang menjamin untuk berpartisipasi dalam menggunakan kekuatan politik dengan menguasai lembaga negara. Memilih anggota-anggota dewan perwakilan yang merumuskan kebijakan dan mengeluarkan berbagai aturan, serta melibatkan diri dalam pelaksanaan hukum melalui keanggotaan sebagai 'juri'. Dengan demikian, warga negara diasumsikan sebagai seseorang yang berhak berpartisipasi dalam proses politik. Warga negara memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk memerintahnya.

*Ketiga*, hak sosial berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan standar dasar kehidupan dan kesejahteraan. Ini biasanya

Universitas Indonesia

direalisasikan melalui pelebagaan kesejahteraan negara (*welfare state*). Murdock dan Golding memberi intepretasi baru terhadap hak ketiga ini. Menurut mereka, warga negara juga berhak memperoleh akses universal pada fasilitas komunikasi dan informasi karena hal ini menyangkut kondisi-kondisi yang memungkinkan rakyat mewujudkan hak-hak kewarganegaraan mereka yang lainnya, seperti hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, hak untuk akses terhadap komunikasi dan informasi menjadi prasyarat dasar bagi perealisasiian kewarganegaraan.

## 2. 6 Alur Kerangka Teoritis

Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang telah diuraikan diatas membentuk alur pemikiran bahwa Jurnalisme sebagai landasan dari aktivitas *citizen journalism* bagi warga untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi. Sebagai wahana dari gerakan *civil society*, aktivitas *citizen journalism* membawa prinsip nilai demokrasi yang mengandung unsur kebebasan untuk berpendapat sebagai salah satu pemenuhan dari hak-hak kewarganegaraan, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam politik dan hak terhadap akses komunikasi dan informasi.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan penulis dalam penyusunan tesis ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian semacam ini dikembangkan dalam ilmu pengetahuan sosial untuk menelaah fenomena kultural dan sosial (Myers, 1997: 241-242).

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif: suatu upaya untuk memelihara (*to preserve*) bentuk dan isi tingkah laku manusia dan untuk menguraikan (*to analyze*) kualitas-kualitasnya. (Lindlof, 1995: 21)

Kualitatif cenderung berasumsi bahwa realitas sosial selalu berubah-ubah dan merupakan hasil konstruksi sosial yang berlangsung antara para pelaku dan institusi sosial. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif sebagai tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. (Moleong, 2000: 3)

Adapun karakteristik penelitian kualitatif adalah: (Moleong, 2000: 6)

1. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar ilmiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*).
2. Melakukan analisis data secara induktif.
3. Penelitian kualitatif menggunakan teori dari dasar (*grounded theory*).  
Penyusunan teori berasal dari data yang ada karena tidak ada teori *a priori* yang mencakup kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi.

4. Lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil karena hubungan bagian-bagian yang diteliti akan jauh lebih jelas diamati dalam proses.
5. Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan lazim digunakan pada penelitian klasik.
6. Menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.

### 3.3 Paradigma Penelitian

Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berpedoman pada paradigma kritis. Dalam hal ini, telaah dilakukan atas fenomena-fenomena sosial yang muncul ke permukaan dalam aliran alami kehidupan sosial. Paradigma kritis mengasumsikan bahwa realitas sosial bergantung pada kejadian-kejadian dalam sejarah yang diproduksi dan direproduksi kelompok-kelompok kepentingan. Meskipun masyarakat secara sadar bertindak untuk mengubah kondisi sosial ekonomi mereka, paradigma kritis melihat bahwa kapasitas masyarakat dibatasi oleh beragam bentuk dominasi sosial, kultural, dan politik (Myers, 2000). Paradigma kritis lebih lanjut melihat struktur sosial sebagai konteks yang sangat menentukan realitas, protes, dan dinamika komunikasi, termasuk komunikasi massa. Tugas utama seorang peneliti kritis adalah berlaku sebagai kritikus sosial, di mana kondisi alienasi dan restriksi dari *status quo* diangkat ke permukaan (Eriyanto, 2001 48-49)

Paradigma dapat didefinisikan sebagai:

*"... a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principles... a world view that defines, for its holder, the nature of the 'world'..."*. (Denzin & Lincoln, 1994: 107)

Menurut Bodan dan Biklen, paradigma diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian (Moleong, 2000: 8).

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk menjelaskan realitas tidak ada yang benar-benar nyata karena realitas yang muncul sesungguhnya adalah realitas semua yang terbentuk karena proses sejarah dan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Realitas yang ada dalam wacana dianggap sebagai realitas yang bersifat “semu”. Paradigma kritis melihat ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap “*the real structures*” di balik ilusi, *false needs*, yang dinampakkan dunia materi.

Sementara itu, Erna Widodo dan Mukhtar (2000) menyebutkan bahwa posisi paradigma sangat penting dalam penelitian karena paradigma akan berimplikasi pada tataran filosofis, abstrak konseptual, operasional dan praktis. Mengenai peranan paradigma ini, Guba dan Lincoln menjelaskan bahwa paradigma dapat menundukkan posisi kita bagaimana sebaiknya dalam mendeskripsikan tipe dan metode penelitian. Paradigma merupakan sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti dan merupakan panduan bagi peneliti. Menurutnya paradigma tidak saja berfungsi untuk memilih metode penelitian, namun juga akan menentukan secara ontologis, epistemologis, dan metodologis yang mendasari sebuah penelitian.

Pendekatan teori kritis termasuk pendekatan era post-positivisme yang mencari makna di balik empiris dan menolak *valuefree*. Pendekatan teori kritis mempunyai komitmen yang tinggi pada tata sosial yang lebih adil. Dua asumsi dasar yang menjadi landasan, yaitu, *pertama*, ilmu sosial bukan sekedar memahami ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan distribusi *resources*, melainkan beruaya untuk membantu menciptakan kesamaan dan emansipasi dalam kehidupan. *Kedua*, pendekatan teori kritis memiliki keterikatan moral untuk mengkritik *status quo* dan membangun masyarakat yang lebih adil (Muhadjir, 2000: 197)

Menurut Littlejohn (2002: 207), teori kritis dicirikan oleh tiga hal, yaitu:

1. Adanya upaya untuk memahami pengalaman kehidupan orang-orang dalam konteks sosialnya.
2. Adanya upaya untuk menemukan ketidakbenaran dalam suatu konstruksi sosial kemasyarakatan yang biasanya terdapat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya upaya yang sadar untuk menyatukan teori dan tindakan. Upaya pertama dapat dilakukan dengan meminjam gagasan dan metodologi dari pendekatan interpretasi dengan memberikan penekanan pada persoalan penindasan. Upaya kedua dapat dilakukan dengan meminjam gagasan dan metodologi dan pendekatan strukturalisme. Sedangkan upaya ketiga bersifat normatif.

Sementara Guba (1994) dalam Hidayat (2006) menyebut ciri-ciri paradigma kritis berdasarkan asumsi *ontology*, *epistemology*, dan *methodology*, yakni (1) secara ontologis, memandang realitas yang teramati (*virtual reality*). Sebagai realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik.; (2) secara epistemologis, peneliti dalam penelitian kritis memandang pemisahan antara nilai-nilai subyektif yang dimilikinya dengan fakta obyektif yang diteliti adalah hal yang tak mungkin dan tak perlu dilakukan. Hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan temuan yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu (*value imeediated findings*); (3) secara metodologis, mempertanyakan bagaimana seharusnya peneliti memperoleh informasi tentang obyek studi. Peneliti mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan *multi-level analysis*. Kualitas penelitian dilihat sejauh mana penelitian memperlihatkan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Pendekatan kritis seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi kepentingan di masyarakat dan bersifat ekonomi politis. Dalam melakukan analisis, pendekatan kritis banyak berhubungan dengan

persoalan komunikasi sebagai suatu subsistem dan sistem kemasyarakatan secara menyeluruh.

Teori kritis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strukturalis dan pascastrukturalis. Teori kritis yang strukturalis melihat bahwa struktu-struktur sosial bersifat nyata. Pendekatan ini mencoba menjelaskan proses terjadinya struktur yang menindas masyarakat. Teori yang kedua melihat bahwa tidak ada realitas/makna sentral. Jika ada suatu perjuangan, maka yang terjadi bukanlah perjuangan antara ideologi-ideologi yang monolitik atau tunggal. Perjuangan dalam konteks teori kritis pasca-strukturalis merupakan perjuangan gagasan dan kepentingan yang cair.

Golding dan Murdock membedakan teori kritis menjadi instrumentalisme dan strukturalisme. Instrumentalisme memfokuskan pada cara-cara kaum kapitalis menggunakan kekuasaan ekonomi mereka dengan suatu sistem pasar komersial untuk menjamin aliran informasi publik sesuai kepentingan mereka. Sedangkan strukturalisme tidak melihat struktur sebagai bangunan yang solid dan permanen, tetapi struktur dapat dilihat sebagai formasi-formasi dinamis yang secara tetap direproduksi dan diubah melalui tindakan praktis. Analisa dengan menggunakan perspektif struktural akan mengarahkan pada kenyataan bahwa makna dibuat kembali melalui aktivitas-aktivitas konkret dari produsen ke konsumen. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana struktur dibentuk melalui tindakan dan secara bergantian bagaimana tindakan dibentuk secara struktural.

Salah satu dasar dari teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondisi masyarakat dewasa ini. Kondisi masyarakat yang kelihatannya produktif dan bagus tersebut sesungguhnya terselubung struktur masyarakat yang menindas dan menipu kesadaran khalayak.

Penelitian dalam tradisi ini terutama melihat media sebagai kekuatan besar yang berperan dalam memanipulasi kesadaran dan kenyataan. Dalam pemikiran Frankfurt, media dimiliki dan didominasi oleh kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat, dan menjadi sarana untuk meneguhkan kelompok dominan

sekaligus memarjinalkan dan meminggirkan kelompok-kelompok minoritas. Karena media dikuasai oleh kelompok dominan, realitas yang sebenarnya telah terdistorsi dan palsu. Oleh karena itu, penelitian media dalam perspektif ini terutama diarahkan untuk membongkar kenyataan palsu yang diselewengkan dan dipalsukan tersebut oleh kelompok dominan untuk kepentingannya.

Peneliti dari kubu kritis melihat bahwa pemisahan antara nilai-nilai subjektif yang dimiliki peneliti dan fakta objektif yang diteliti merupakan sesuatu yang mungkin dan tidak perlu dilakukan. Sebab pemilihan apa yang diteliti selalu melibatkan *value judgement* dan keberpihakan pada nilai-nilai tertentu. Selain itu, penelitian ini juga melihat bahwa objek atau realitas sosial merupakan realitas semu (*virtual reality*) atau sekedar ekspresi kesadaran palsu (*false consciousness*) yang dimiliki manusia, bukan merupakan suatu realitas objektif. Tujuannya adalah untuk memperoleh temuan yang memiliki signifikansi sosial seperti penyadaran, pemberdayaan, atau transformasi sosial.

Dalam pembentukan realitas tersebut, ada dua titik perhatian seperti yang dikemukakan oleh Start Hall (Eriyanto, 2001: 29 dan James Curan, 1992: 82). *Pertama*, bahasa, bahasa sebagaimana dipahami oleh kalangan strukturalis merupakan penandaan, realitas dapat ditandakan secara berbeda pada peristiwa yang sama. Bagaimana pemberian makna tersebut dibentuk? Kalau pemaknaan atas suatu realitas bisa memungkinkan banyak perbedaan penafsiran, kenapa hanya satu makna yang akhirnya kita terima? Bagaimana satu makna bisa memenangkan dan lebih diterima dibandingkan dengan pemaknaan lain? Kenapa pemaknaan alternatif di luar pemaknaan dominan itu menjadi marjinal dan terpinggirkan? Menurut Hall, ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana wacana dominan membentuk, menghitung definisi dan membentuk batas-batas dari pengertian tersebut. Makna itu timbul dari proses pertarungan sosial di mana masing-masing pihak atau kelompok saling mengajukan klaim kebenarannya sendiri.

Bahasa sangat berpengaruh pada persepsi dan cara pandang kita terhadap suatu hal. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi saja, melainkan merupakan kesatuan konseptual yang kuat sebagai pengantar prasangka sosial, dan bahasa membentuk pikiran kita tentang sesuatu hal.

Ketika bahasa digunakan oleh media massa, maka ia memiliki tanggungjawab yang besar karena ketersebaran yang luas dan rutin dalam menanamkan stereotipe atau prasangka tertentu.

Paradigma kritis menurut Horkheimer dianggap mencukupi apabila memenuhi tiga kriteria, yakni *explanatory*, *practical*, dan *normative*. *Explanatory* menjelaskan apa yang salah dengan realitas sosial, atau berarti adanya muatan *judgement* dalam teori, tentang apa yang benar dan salah, yang seharusnya dan tidak seharusnya, yang wajar dan tak wajar. Kriteria *Practical* mengidentifikasi aktor-aktor sosial yang mampu mengubah dan mengoreksi realitas sosial. Kriteria *normative* terkait dengan dua dimensi terdahulu, suatu teori kritis jelas harus menyajikan norma-norma yang jelas yang baik yang digunakan sebagai dasar kritik terhadap suatu realitas sosial, maupun tujuan-tujuan praktis yang bisa dipakai melalui suatu transformasi sosial (Hidayat, 2005: 4)

Dalam penelitian ini, kriteria *explanatory* dijelaskan melalui

Dalam penelitian yang menggunakan paradigma kritis, terdapat empat kriteria kesahihan, yakni: *pertama*, kriteria *confirmation* atas teori yang artinya 'kebenaran' tentang realitas yang dikaji ada dalam teori itu sendiri. Atau apa yang dinyatakan teori itulah realitas yang sebenarnya. Teori kritis akan dianggap valid jika teori ini bisa diterima dan bertahan sebagai refleksi diri para pelaku sosial yang dirujuk teori, dan teori tersebut digunakan sebagai dasar melakukan transformasi.

*Kedua*, *historical statuadness*. Sebagai sebuah penelitian yang coba membongkar kesadaran palsu yang disebabkan oleh hegemoni ideologi dominan,

maka suatu fenomena tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik dan ekonomi, etnis, jender, yang melatarbelakanginya.

*Ketiga, enlightenment dan empowerment*, yakni pencerahan/penyadaran dan pemberdayaan bagi agen sosial yang dirujuk teori termasuk kriteria yang masuk dalam paradigma wilayah kritis.

*Keempat, holistik*. Sifat penelitian ini harus holistik, dalam arti, suatu persoalan tak dapat dilepaskan struktur besarnya. (Hidayat, 2005: 6-10).

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data adalah prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya riset. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi riset. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dimana dalam riset kualitatif dikenal metode pengumpulan data: observasi (*fiels observations*), *focus group discussion*, wawancara mendalam (*intensive/depth interview*) dan studi kasus (Wimmer, 2000: 110; Sendjaya, 1998: 32). Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil penelitian. Hasil penelitian lebih bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sewaktu riset dilakukan. Karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal istilah sampel. Sampel pada penelitian kualitatif disebut informan atau subjek penelitian.

Pada penelitian ini, data diperoleh dari teks yang dikutip dari tulisan-tulisan dari pada *citizen journalist* yang memposting tulisan-tulisannya di situs Politikana.com selama periode bulan April-Mei 2009. Penentuan periode ini disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia yang pada saat itu tengah melakukan pesta demokrasi pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif yang akan dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang memiliki kompetensi dibidang *citizen journalism* dan juga beberapa narasumber yang menjadi penulis di situs Politikana.com untuk mendukung temuan penelitian.

### 3.5 Critical Discourse Analysis

#### 3.5.1 Analisis Wacana

Littlejohn dalam bukunya *Theories of Human Communication* membicarakan mengenai *discourse* sebagai unit yang lebih besar dalam komunikasi yang melibatkan sign tunggal dan kombinasi berbagai macam tanda (Littlejohn, 1992: 85). Menurut Hawthorn (1992), wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai aktivitas sebuah pertukaran diantara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya.

Gee (1991) membedakan Discourse dan discourse. '*discourse*' dengan d kecil melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Maksudnya, penggunaan bahasa atas dasar-dasar linguistik. Sedangkan Discourse dengan D besar merangkaikan unsur linguistik tadi (*discourse* dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Non-linguistik tadi adalah cara beraksi, teraksi, perasaan, kepercayaan, penilaian, untuk mengenali atau mengakui diri sendiri dan orang lain yang bermakna dan penuh arti dengan cara-cara tertentu. (Gee, 1999: 17)

Wacana merupakan hasil bentukan melalui proses yang disebut proses konstruksi realitas yang melibatkan banyak faktor dan komponen di dalamnya. Hasilnya adalah teks. Dalam proses ini terjadilah pemilihan dan pemilihan fakta yang akan dimasukkan ke dalam teks melalui mekanisme framing strategis serta kesadaran memakai simbol bahasa, dimana kedua aspek ini bisa dipengaruhi oleh

faktor internal dan faktor eksternal pihak yang mengkonstruksikan realitas. (Gee, 1999: 17)

Meski ada beberapa elemen analisis wacana, ada beberapa hal yang utama. Pertama, semua memiliki fokus dengan cara apa wacana diorganisasikan. Ini berarti menemukan aturan yang digunakan oleh komunikator. Kedua, wacana dipandang sebagai aksi. Para pengamat diskursus berasumsi bahwa pengguna bahasa tidak hanya mengetahui peraturan tata bahasa dalam kalimat tetapi juga aturan penggunaannya dalam segmen yang lebih besar untuk mencapai tujuan pragmatis dalam situasi sosial. Artinya bahasa digunakan secara strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, analisis wacana adalah pencarian terhadap suatu prinsip-prinsip yang digunakan komunikator dari perspektif mereka. (Littlejohn, 1992: 85). Isi media pada dasarnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sesungguhnya, bahasa bukan saja alat untuk merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief apa yang akan diciptakan bahasa untuk mengungkapkan realitas. Akibatnya, media massa mempunyai peluang besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya.

Bahasa yang dipakai media mampu mempengaruhi cara melafalkan, tata bahasa, susunan kalimat, perluasan dan modifikasi perbendaharaan kata, dan akhirnya mengubah atau mengembangkan percakapan, bahasa dan makna. Melalui bahasa, orang mencipta realitas. Bahasa bekerja secara kolektif bersama makna. Stuart Hall menyatakan makna adalah suatu produksi sosial, suatu praktik konstruksi. Media massa menurut Hall, pada dasarnya tidak memproduksi, melainkan menentukan (*to define*) realitas melalui pemakaian kata-kata yang terpilih. Secara makro, fungsi bahasa ialah: (Halliday dalam Lyons, 1972: 149-165)

1. Fungsi ideasional: untuk membentuk, mempertahankan dan memperjelas hubungan diantara anggota masyarakat

2. Fungsi interpersonal: untuk menyampaikan informasi di antara anggota masyarakat
3. Fungsi tekstual: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus yang relevan dengan situasi.

Konsep wacana menurut Michael Foucault adalah sesuatu yang memproduksi yang lain, yang bisa dideteksi karena dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Foucault mengatakan bahwa hubungan antara simbol dan yang disimbolkan sebagai hasil produktif dan kreatif. Simbol yang dihasilkan wacana antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, dan lainnya yang tidak hanya mengacu pada sesuatu tetapi juga menghasilkan perilaku, nilai-nilai dan ideologi (Eriyanto, 2001: 71)

Mills dengan mengacu pada pendapat Foucault membedakan pengertian wacana menjadi tiga macam, yakni wacana dilihat dari level konseptual teoretis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan.

Berdasarkan level konseptual teoretis, wacana diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai makna yang mempunyai efek dalam dunia nyata. Dalam konteks penggunaannya, wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu. Hal ini menekankan pada upaya untuk mengidentifikasi struktur tertentu dalam wacana. Dilihat dari metode penjelasannya, wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan. Dalam prosesnya, bahasa menjadi mediasinya. (Sobur, 2002: 11)

Ringkasnya, teori wacana menjelaskan sebuah peristiwa terjadi seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. (Heryanto, 2000: 344). Analisis wacana lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan struktur pada level kalimat. Bagi teks tertulis, analisis wacana yang dilakukan bertujuan untuk

mengeksplisitkan norma dan aturan-aturan bahasa yang implisit. Selain itu, analisis wacana juga bertujuan untuk menemukan unit-unit hierarkis yang membentuk suatu struktur diskursif. (Sobur, 2002: 13)

Althusser dan Gramsci melihat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, tetapi berkaitan dengan realitas sosial. Jadi, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Selain kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, di dalam media massa juga terselubung kepentingan lain, misalnya kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (sustainabilitas) dan sebagainya. Dalam keadaan ini, bias berita di media massa menjadi sesuatu yang sulit dihindari; dia juga sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan dan pemihakannya.

### 3.5.2 Wacana Kritis Fairclough

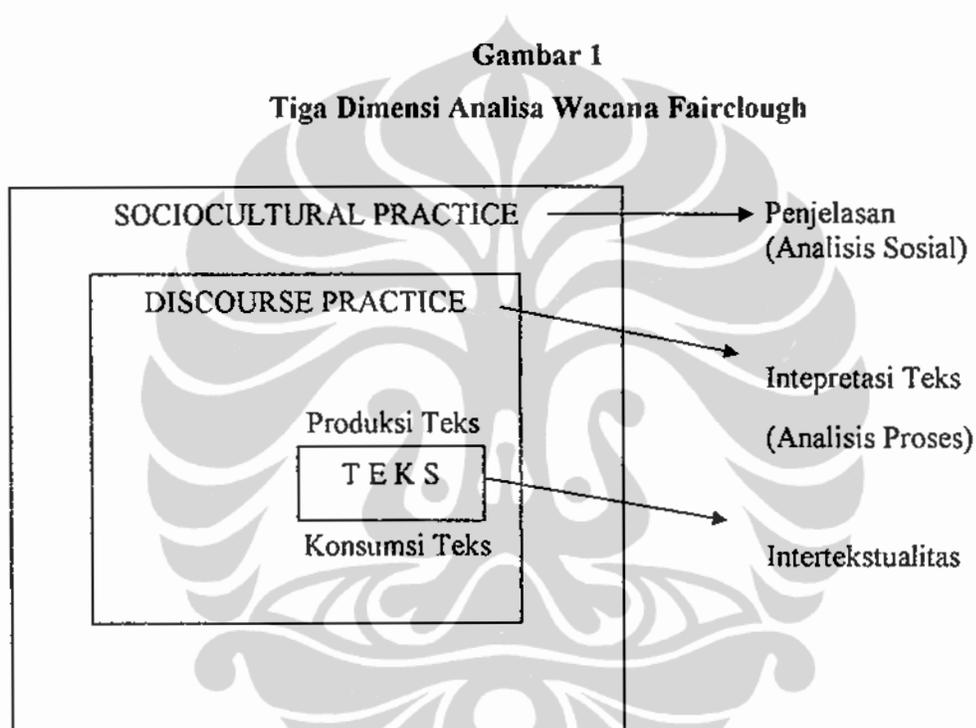
Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis/CDA*) diperkenalkan oleh Fairclough dan Wodak. Analisis wacana kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu dianggap sebagai subyek netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya karena berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. (Eriyanto, 2001: 7)

Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Bahasa dianalisis bukan dilihat dari aspek kebahasaannya saja, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan. Melalui wacana,

ketimpangan dari kehidupan sosial dipandang sebagai suatu *common-sense*, kewajaran/alamiah, dan memang seperti itu kenyataannya. (Eriyanto, 2001: 6)

Titik besar perhatian Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: teks, *discourse practice* dan *Socio-cultural practice*. Ketiga dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



### 3.5.2.1 Teks

Fairclough melihat teks dalam berbagai tingkatan. Ada tiga elemen dasar dalam model Fairclough, yaitu:

a. Representasi

Representasi tertentu yang ingin disampaikan dalam teks umumnya membawa muatan ideologis tertentu.

b. Relasi

Bagaimana konstruksi hubungan diantara wartawan dengan pembaca, seperti apakah teks disampaikan secara informal atau formal, terbuka

atau tertutup. Setidaknya ada tiga partisan utama dalam media yaitu wartawan, khalayak media dan partisipan publik. Media dipandang sebagai arena sosial karena semua kelompok yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan pendapat dan gagasannya masing-masing.

c. Identitas.

Konstruksi tertentu dari identitas wartawan dan pembaca, serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan. Menurut Fairclough yang menarik ialah bagaimana wartawan menempatkan dan mengidentifikasi dirinya dengan masalah yang ada.

### 3.5.2.2 Intertekstualitas

Intertekstualitas adalah sebuah istilah dimana teks dan ungkapan dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya, saling menanggapi dan salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi lainnya. Semua pernyataan/ungkapan didasarkan oleh ungkapan yang lain, baik eksplisit maupun implisit. Di sini kata-kata lain dievaluasi, diasimilasi, disuarakan dan diekspresikan kembali dengan bentuk lain.

Intertekstualitas secara umum dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu *manifest intertextuality* (teks atau suara lain itu muncul secara eksplisit dalam teks, misalnya dalam bentuk kutipan); dan *interdiscursivity* (teks-teks lain tersebut mendasari konfigurasi elemen yang berbeda dari *order of discourse*). Fairclough menyatakan, prinsip dari interdiskursif tersebut dijalankan pada berbagai level: pada tingkat *societals*, institusional, personal dan sebagainya.

### 3.5.2.3 Discourse Practice

Analisis *discourse practice* memusatkan pada bagaimana produksi (di pihak media) dan konsumsi teks (di pihak khalayak). Praktik diskursus dengan proses yang rumit dan kompleks inilah yang menentukan bagaimana teks tersebut terbentuk. Sebuah teks pada dasarnya dihasilkan lewat proses produksi teks yang

berbeda, seperti bagaimana pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas dalam menghasilkan berita. Baik produksi dan konsumsi teks juga melibatkan berbagai aspek praktik diskursif. Di sini ada tiga aspek yang dilihat, yakni:

- Sisi individu wartawan itu sendiri, meliputi latar belakang pendidikan, perkembangan profesional, orientasi politik dan ekonomi para pengelolanya, dan keterampilan mereka dalam memberitakan secara akurat.
- Bagaimana hubungan antara wartawan dengan struktur organisasi, baik dengan sesama anggota redaksi maupun dengan bidang lain dalam satu media. Struktur organisasi ini meliputi bagaimana bentuk organisasinya, bagaimana promosi dan jenjang orang-orang, bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat, khususnya hal-hal yang berada di luar proses rutinitas media.
- Praktik kerja atau rutinitas kerja dari produksi berita sampai tulisan tersebut muncul di media, dimana proses ini melibatkan banyak orang dan tahapan. Rutinitas berita meliputi berbagai hal, dari bagaimana mendapatkan berita sampai penulisan dan editing berita.

Ketiga elemen ini saling terkait dalam memproduksi suatu wacana berita.

#### 3.5.2.4 *Sociocultural*

Analisis *sociocultural practice* didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul dalam media. *Sociocultural practice* ini memang tidak berhubungan dengan produksi teks tetapi ia menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. *Sociocultural practice* menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat memaknai dan menyebarkan ideologi yang dominan dalam masyarakat.

Menurut Fairclough terdapat tiga level analisis pada *sociocultural practice*, yaitu:

➤ Situasional

Ketika teks tersebut diproduksi, aspek situasional menjadi pertimbangan. Aspek situasional ini mengarah pada waktu dan suasana yang mikro (konteks peristiwa saat teks berita dibuat).

➤ Institusional

Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Institusi bisa berasal dalam media itu sendiri, dan juga bisa berasal dari kekuatan-kekuatan eksternal di luar media yang menentukan proses produksi berita. Institusi yang penting adalah institusi yang berhubungan dengan ekonomi media. Selain ekonomi media, faktor politik juga memberikan pengaruh terhadap institusi tersebut.

➤ Sosial

Fairclough menegaskan bahwa wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh perubahan masyarakat. Dalam level sosial, budaya masyarakat, misalnya turut menentukan perkembangan dari wacana media. Aspek sosial lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

Istilah *citizen journalism* muncul akibat adanya perlawanan warga masyarakat Amerika Serikat terhadap proses pemilihan presiden pada tahun 1988. Di Korea Selatan, istilah ini menjadi *booming* setelah didirikannya suatu situs yang berbasis *User Generate Content*<sup>1</sup> yaitu Ohmynews.com oleh seorang wartawan profesional Korea yang kecewa terhadap media massa mainstream, Oh Hyeon Hoo.

Berita-berita yang dihasilkan oleh para *citizen journalist* bisa berupa berita apa saja, berikut kutipan dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang wartawan senior yang aktif bergelut dalam dunia *citizen journalism*:

*“Apa yang diberitakan oleh citizen journalist sebenarnya tidak melulu berita yang sifatnya straight news, atau peristiwa hot news, kayak ada peristiwa tabrakan, bencana, itu kan straight news. Tapi juga bisa menggali sendiri. Misalnya kesehatan ibu dan anak, ini kan peristiwa penting tapi tidak diliput oleh media-media massa mainstream, kalau mengangkat isu tentang posyandu, mana orang mau baca, lebih bagus ya berita presiden, lebih seksi, misalnya politik..... Jadi intinya menurut saya yang namanya citizen journalism itu memberitakan hal-hal sepele, hal-hal kecil yang dianggap ngga penting, tapi berguna bagi masyarakat.” (Pepih Nugraha, 21 April 2009)*

Atas dasar itu, pada bab ini akan diuraikan mengenai temuan dan analisa hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan aktivitas *citizen journalism* pada situs Politikana.com. Penelitian dilakukan terhadap situs Politikana.com karena situs ini mengedepankan permasalahan terkait isu politik

<sup>1</sup> UGC (User Generate Content) intinya adalah konten dalam hal ini adalah berita/foto yang dikirim atau dicreate (dibuat) oleh para pembacanya itu sendiri. Pengertian ini dan informasi mengenai asal mula *citizen journalism* diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang wartawan media massa mainstream.

dan demokrasi di Indonesia yang menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh *citizen journalism* dalam mendukung proses demokrasi. Dunia politik sangat menginginkan media interaktif dengan *two-way communication*, terbukti dengan banyaknya situs-situs berita atau bahkan sosial media dengan kampanye-kampanye dan diskusi-diskusi elit politik, termasuk juga pemanfaatan facebook sebagai sarana kampanye partai politik.

Melalui analisa teks yang dilakukan terhadap tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para *citizen journalist* yang tergabung dalam anggota milis Politikana.com, peneliti berusaha menguraikan teks dan konteks yang terkandung dalam pemberitaan atau informasi yang disampaikan oleh seorang narasumber kepada khalayak luas, dimana masing-masing pelaku dapat berperan sebagai produsen sekaligus konsumen terhadap sebuah berita.

Dalam produksi pemberitaannya, situs Politikana.com menggunakan tagline Politikana.com, politik 2.0, dimana pembicaraan politik tidak lagi dimonopoli oleh segelintir orang. Dan kini semua orang bisa saling melempar wacana dengan lebih mudah, tanpa harus menunggu forum/event tertentu untuk diselenggarakan. Tidak ada tim editor dari situs Politikana yang bertugas mengedit berita-berita atau postingan-postingan tulisan yang masuk. Yang menjadi editor adalah para pembaca lain yang mengomentari postingan sebuah tulisan. Sebuah berita atau tulisan yang diposting akan dinilai atau diberi rating berdasarkan kategori Ngga penting, Basi, Cari Masalah, Biasa, Penting, Menarik, Bagus, dan Terkini.

Berikut kutipan salah seorang pengelola dalam situs Politikana.com dari hasil wawancara:

*"Di situs politikana.com, sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan menjadi suatu hal yang penting. Di sini orang akan terbuka wawasannya tentang politik dari sudut berbeda."*

Hasil temuan dan analisa yang peneliti lakukan terhadap sebuah pemberitaan dalam situs Politikana.com, terbagi menjadi beberapa kategorisasi, yaitu: (1) Demokrasi Indonesia dalam Teks; (2) Pemilihan Umum di Indonesia; (3) Aktor-aktor dalam Pemilihan Umum Legislatif. Tulisan-tulisan yang diambil merupakan tulisan yang diposting pada periode bulan April – Mei 2009, karena pada periode ini rakyat Indonesia sedang merayakan pesta demokrasi, yaitu melalui Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif.

#### **4. 1 Politikana: Politik dan Demokrasi dalam *Citizen Journalism***

##### **4.1.1 Demokrasi Indonesia dalam Teks**

###### **4.1.1.1 Demokrasi untuk diri sendiri**

Dalam pemahaman yang umum dikenal, demokrasi merupakan sistem pengorganisasian kekuasaan dengan berbasiskan pada rakyat. Ia dikenal dengan ungkapan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan yang dijalankan merupakan amanah yang diberikan rakyat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Kekuasaan itu lalu dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada di parlemen. Anggota parlemen itu sendiri dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian parlemen dan pemerintah menyusun aneka kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat.

Namun, salah seorang penulis dalam Politikana (She, 23/April/2009) dalam tulisannya yang berjudul 'Demokrasi versus Egokrasi' melihat bahwa demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia selama ini lebih banyak ditujukan bagi kepentingan diri sendiri (elit politik) daripada kepentingan rakyat. Menurutnya:

*“... Tapi yang gw sangat sayangkan adalah banyak orang gak ngerti kalo Indonesia tuh milik kita bersama. Sometimes demokrasi yang adalah dari kita, untuk kita dan oleh kita itu akhirnya jadi omong kosong. Hari-hari justru ini yang menjadi arti dari demokrasi adalah dari saya, oleh saya dan untuk saya.”*

Penulis melihat adanya perbedaan antara gagasan ideal demokrasi dengan praktik demokrasi. Secara sewenang-wenang, ia mengistilahkan praktik demokrasi di Indonesia tersebut sebagai “egokrasi”. Maksudnya, ialah pelaksanaan praktik demokrasi yang terjadi saat ini ditujukan untuk kepentingan diri sendiri (elit politik), bukan untuk kepentingan rakyat. Hal ini tercermin dalam tulisannya yang menyebutkan:

*“Ketika keegoisan udah mulai muncul maka demokrasi pun luntur. Yang justru timbul adalah asas egokrasi yaitu asas dari saya, untuk saya, dan oleh saya! Trus apa ini yang disebut mentingin rakyat??? Balikin lagi donk demokrasinya!!”*

Disamping itu, dalam pengertiannya (seperti yang juga telah dijelaskan dalam Bab II Kerangka Teori) bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dengan salah satu ciri yaitu adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, Namun, pada kenyataannya seperti yang kita ketahui bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan umum calon anggota legislatif masih banyak warga negara masyarakat yang seharusnya memiliki hak untuk memilih tidak terpenuhi haknya karena alasan teknis (seperti tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap) dan juga masih banyak warga yang memang memilih untuk tidak memilih atau dengan istilah lain menjadi ‘golongan putih’ (golput). Hal ini diperkuat dengan pernyataan berikut:

*“Masih segar di ingatan kita tentang pesta demokrasi yang baru saja kita lewati. Mungkin bagi sebagian orang pemilu adalah sebuah ajang untuk*

*berpesta demokrasi, namun sangat disayangkan banyak orang yang gak ikut serta dalam pesta tersebut.”*

Dalam pernyataannya itu, penulis menyayangkan bahwa masih banyak warga negara yang tidak mengikuti pemilihan umum yang menurutnya sangat penting sebagai salah satu bentuk dari perwujudan sebuah pesta demokrasi di Indonesia.

Hal menarik lainnya yang dapat dikaji dari tulisan berjudul ‘Demokrasi atau Egokrasi’ ini adalah pernyataan sebagai berikut:

*“Bagi gw pribadi, kadang2 gw geregetan ma kondisi Indonesia sekarang. Mungkin gw mang masih anak SMA yang belum punya KTP n gak ngerti apa2. Tapi yang gw sangat sayangkan adalah banyak orang gak ngerti kalo Indonesia tuh milik kita bersama.”*

Dalam kutipan-kutipannya, penulis yang berperan sebagai citizen journalist ini menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran yang baik terhadap sebuah pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan umum, meskipun berdasarkan usia, penulis belum memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang itu berarti ia belum dapat turut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi, tetapi melalui aktivitas *citizen journalism* sebagai wadah komunikasi (ruang publik) yang disediakan oleh situs Politikana.com, penulis dapat secara bebas memberikan pendapatnya sekaligus menunjukkan ekspresinya yang disampaikan melalui tulisan tersebut. Hal ini mendukung salah satu prinsip demokrasi yang disampaikan oleh Dahl (1971), yaitu adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk berekspresi atau berpendapat.

Bukan hanya sepihak, interaksi yang terjadi dalam ruang publik terjadi secara timbal balik. Dalam aktivitas yang dilakukan oleh *citizen journalism*, teks

yang diproduksi oleh salah seorang penulis dalam Politikana.com tersebut mendapat banyak tanggapan dari pihak lain yang mengkonsumsi teks tersebut.

Gagasan “egokrasi” yang disampaikan oleh penulis (yang berperan sebagai produsen berita) mendapatkan beragam respon dari pembaca Politikana.com lainnya (yang berperan sebagai konsumen berita). Bahkan ada yang mempertegas gagasan tersebut dengan menawarkan istilah “kremasi”. Hal ini misalnya dapat dilihat dari tanggapan yang disampaikan oleh salah seorang pembaca Politikana.com:

*“... Tiada yg abadi kata Peterpan...nothing last forever kata sidney sheldon...mungkin demokrasi pun seperti itu...ga kekal..terus berevolusi, demokrasi. ... egokrasi ...sampai akhirnya di kremasi....”* (W, Politikana, 23 April 2009)

Dari pernyataannya tersebut, W mencoba mengungkapkan bahwa apapun bentuk sebuah pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah negara, penerapannya tidak berlangsung selamanya, dengan kata lain akan mengalami evolusi hingga pada akhirnya di’kremasi’. Seperti yang kita ketahui, di’kremasi’ mengandung pengertian sebuah prosesi pembakaran mayat sebagai salah satu bentuk adat istiadat dalam masyarakat pada wilayah tertentu untuk menghilangkan wujud kebendaannya (manusia menjadi abu). Menurut W, demokrasi pun pada akhirnya akan mengalami hal yang serupa, berevolusi menjadi egokrasi (mendukung pernyataan She) dan pada akhirnya dikremasi (dihilangkan). Penggunaan istilah di’kremasi’ juga disesuaikan dengan bunyi pada akhir kata yang mengandung akhiran *-asi* (demokr-*asi*, egokr-*asi*, krem-*asi*).

Pembaca lain yang juga memberikan komentarnya, sepatutnya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh dua penulis sebelumnya: *“demokrasi ... egokrasi ... sampai akhirnya di kremasi ... Setuju”* (W, Politikana, 23 April 2009)

#### 4.1.1.2 Demokrasi adalah Demonstrasi

Seiring dengan pengertian demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat” yang pelaksanaannya dikuasakan kepada pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat. Namun pada kenyataannya, penggunaan kekuasaan yang telah dipercayakan itu seringkali tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga muncul demonstrasi sebagai bentuk protes dari masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Menurut salah seorang penulis di situs Politikana.com yang berdomisili di Jakarta dalam tulisannya yang berjudul ‘Demokrasi versus Demonstrasi’:

*“Kita (khususnya yang tinggal di Jakarta) pasti sering sekali ketemu nih sama yang namanya demonstrasi... sebetulnya ada 3 hal menurut saya yang menjadikan rakyat banyak berdemonstrasi. Yang pertama Pemerintah belum menemukan cara yang efektif untuk menampung aspirasi rakyat. Yang kedua, sebetulnya udah ada cuma pemerintahnya aja yang ogah, giliran beritanya udah booming di koran haru deh bertindak. Yang ketiga sebetulnya pemerintah mau menjalankan aspirasi tersebut tetapi ada kepentingan suatu golongan atau pribadi yang menghalangi.” (Mr.RHR, Selasa, 28 Apr '09 21:38)*

Dalam tulisan tersebut, penulis mencoba menjabarkan alasan-alasan masyarakat melakukan demonstrasi terhadap pemerintah yang dianggap belum bisa menjalankan amanat dengan baik. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh partai politik dalam pemilihan umum sebagai calon anggota parlemen yang akan menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan.

*“Seperti yang kita lihat di sekitar jalan saat menjelang Pemilu Calon Legislatif banyak sekali CALEG-CALEG yang mempromosikan dirinya dengan kata kata “Siap berjuang untuk rakyat!”, “Dukung yang Pro-Rakyat!” dan kata kata lain yang mengandung membela rakyat.”*

Promosi para calon legislatif mengumbar esensi demokrasi sebagai janji, yaitu berjuang untuk mendukung dan membela rakyat. Hanya saja saat ini yang nampak adalah demokrasi yang disertai demonstrasi, dengan kata lain belum terpenuhinya janji-janji yang pro-rakyat sehingga membuat rakyat marah dan melakukan aksi demo untuk memprotes kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat tanpa disertai demonstrasi seringkali hanya dianggap sebagai opini publik belaka.

*"Coba lihat apa yang sekarang terjadi di negeri ini. Setiap kita rakyat mempunyai tuntutan, ribuan mahasiswa atau rakyat harus turun ke jalan dulu untuk melakukan demonstrasi. Coba kita cari jalan selain demonstrasi, paling hanya dianggap opini publik saja. Seperti kita ambil contoh sebelum kenaikan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Rakyat yang tidak mengerti politik akan berasumsi bahwa Pemerintah telah bekerja bagus! benar benar pro rakyat! tapi ketika saya berbicara dengan mahasiswa yang aktif dalam berpolitik berkata lain 'Pemerintah itu payah! mungkin jika kita tidak demo pemerintah tidak akan menetapkan hal itu!'"*

Keprihatinan penulis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia merujuk pada adanya anggapan bahwa pemenuhan janji-janji sebagai wujud dalam demokrasi harus disertai dengan demonstrasi, terutama demonstrasi yang menggunakan kekerasan bahkan berujung pada kematian. Demonstrasi yang tidak menggunakan kekerasan memberikan kesan tidak akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Berikut kutipan yang mengisyaratkan hal tersebut:

*"Saya ingin menanyakan apakah jika kita ingin berdemokrasi kita harus ber demonstrasi? biasanya demo yang berhasil adalah demo yang menggunakan kekerasan seperti demo yang memakan korban ketua DPRD di SUMUT. Namun demo yang terkesan lembek selalu di acuhkan. Seperti demo tentang RUU BHP yang bikin calon mahasiswa seperti saya ini sudah sulit semakin sulit lagi untuk kuliah karena biayanya mahal. padahal rakyat tidak ada tuh yang minta disah-kan UU tersebut. Ingat loh kata orang Yunani "vox populi vox dei" artinya suara rakyat suara Tuhan.*

*berarti yang minta disah-kan UU tersebut Tuhan apa pemerintah? Demokrasi Indonesia benar benar terancam punah seperti nya."*

Senada dengan komentar W (dalam tulisan yang berjudul 'Demokrasi atau Egoisasi') yang menggunakan istilah di 'kremasi', Mr.RHR juga menyatakan pendapat yang sama mengenai demokrasi Indonesia yang terancam punah akibat ketidaksesuaian janji pemerintah dengan kesejahteraan rakyat yang dimunculkan melalui bentuk demonstrasi yang memiliki unsur tindakan-tindakan anarkis. Sehingga dalam kesimpulannya, demokrasi tidak ada bedanya dengan demonstrasi, dengan kata lain demonstrasi adalah demokrasi itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya elemen dalam demokrasi, terutama mengenai adanya aturan hukum yang ditetapkan untuk semuanya, sebab demokrasi tanpa aturan hukum akan menjadi anarkis. Karena itu, hukum merupakan dasar yang paling penting. Demokrasi yang baik harus pula dilakukan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan bersama, bukan dengan kekerasan.

Terkait dengan hal ini, tulisan 'Demokrasi versus Demonstrasi' mendapat tanggapan yang baik dari para pembaca Politikana.com lainnya. Tulisan ini mendapatkan rating yang dinilai sendiri oleh para pembaca dengan kategorisasi Penting, Menarik, dan Bagus. Berikut salah satu komentar dari pembaca lain:

*"Saya setuju bahwa Demonstrasi sudah jadi kurang efektif belakangan ini, dan persepsi rakyat terhadapnya jadi tidak lebih sebagai "noise" yang gak penting semata. Ia adalah metode yang tidak efektif, dan harus dicari metode yg lain."* (GPA, Politikana, 28 April 2009)

Demonstrasi dianggap sebagai 'noise' atau gangguan terhadap publik, dan merupakan metode yang sudah lagi kurang efektif dalam mendukung demokrasi. Meskipun begitu, demonstrasi adalah nafas dari demokrasi, kebebasan rakyat

untuk berpendapat atau beropini dalam bentuk apapun selama tidak melanggar hukum. Menurutnya:

*"Apapun yg terjadi saya ngga mau demonstrasi hilang dari jalanan ibukota, karena ia berdiri sebagai landmark sejarah pengingat apa yang jadi pencapaian terbaik kita di era reformasi. Kebebasan beropini."*

Teks tersebut menunjukkan perjuangan mahasiswa di era reformasi 1998 yang diperjuangkan melalui demonstrasi berdarah yang menelan korban nyawa mahasiswa. Demonstrasi tersebut sebagai wujud dari kebebasan beropinin terutama setelah Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan membuat rakyat Indonesia menjadi *voiceless*.

Terkait dengan komentar yang disampaikan perihal wacana era reformasi, konsep *citizen journalism* di Indonesia juga sangat mempengaruhi perkembangan era reformasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh salah seorang narasumber, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, bapak Wilson Lalengke menyebutkan:

*"...bahwa di Indonesia sebenarnya sistem ini juga (citizen journalism) yang mempengaruhi era reformasi, karena seingat saya tahun 1995/1996 ketika internet sudah mulai masuk ke ranah publik, orang kan berbagai cerita, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan. Nah itu menjadi milik publik, sehingga masyarakat akhirnya terdorong untuk melakukan gerakan-gerakan publik seperti demo-demo, bahkan sampai pembakaran yang menurut kita sebenarnya itu tidak harus sampai segitu. Tapi paling tidak bahwa masyarakat akhirnya terbuka wawasan dan pikirannya terhadap bahwa dia itu sebenarnya selama ini, katakan mungkin "dikadalin" oleh pemerintah (orde sebelumnya) dengan sistem yang ada pada saat itu." (wawancara dengan Wilson Lalengke, 13 April 2009)*

Demonstrasi sepertinya memang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan proses demokrasi di negara kita, tetapi pelaksanaan demonstrasi harus mencari jalan damai, bukan dengan kekerasan apalagi yang berujung pada kematian. Pemerintah pun seharusnya memahami aspirasi yang ingin disampaikan rakyat melalui demonstrasi, dan mencari jalan keluar yang pro pada rakyat banyak.

Aktivitas *citizen journalism* dapat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk berdemonstrasi menyampaikan aspirasinya melalui tulisan dan diharapkan dapat memberikan sumbang pikir terhadap kebijakan yang diambil oleh para pemangku jabatan negeri ini. Dalam kutipannya, beliau juga menambahkan bahwa aktivitas *citizen journalism* memberikan dampak bagi tatanan kebangsaan dan kenegaraan:

*"Kalau buat saya citizen journalism di Indonesia itu mulainya dari tahun 1995/1996 dan itu memberikan dampak yang besar, bahkan merubah tatanan kebangsaan dan kenegaraan kita."*

#### **4. 1.1.3 Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat**

Meskipun dalam tulisan-tulisan sebelumnya menunjukkan sebuah sikap yang pesimis terhadap proses demokrasi, namun salah seorang penulis Politikana.com lainnya memiliki pandangan yang optimis terhadap demokrasi. Dalam tulisannya yang berjudul 'Demokrasi yang Kian Menghasilkan Buah', ia menilai bahwa masyarakat sudah semakin mengenal dan memahami arti dari demokrasi, berikut kutipannya:

*"Sekarang bukan lagi waktunya kita khawatir akan pemilu yang rusuh karena iklim demokrasi sudah mulai memasyarakat. Sebagai akibatnya stabilitas negara pun terjaga dan ekonomi bisa pelan-pelan tumbuh. Meskipun pada pokoknya, tetap pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berperan besar dalam menentukan arah bangsa ini ke depan, namun*

*rakyat bangsa kita sudah mulai bisa menilai para politisi berdasarkan kebijakan-kebijakan yang mereka buat."*

Menurut penulis, walaupun pelaksanaan pemilihan umum yang lalu menuai banyak kritik karena dianggap banyak mengandung kecacatan<sup>2</sup>, namun ada hal lain yang menunjukkan eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat. Berikut apa yang penulis coba sampaikan berkaitan dengan hal tersebut:

*"Kita bisa melihat dalam pemilu kemaren dimana MK membuat keputusan yang benar dengan meloloskan caleg dengan suara terbanyak yang terpilih. Meski pada prakteknya masih terdapat banyak kecacatan, namun secara garis besar pelajaran yang bisa diambil ialah suara rakyat tidak bisa dibeli dengan uang. Dana kampanye yang jor-joran tidak menjamin elektabilitas dan tidak selamanya partai besar akan tetap besar."*

Dalam tulisan tersebut mengandung makna bahwa ternyata rakyat masih memiliki power, apabila keputusan sebelumnya adalah penetapan calon anggota legislatif berdasarkan pada nomor urut, namun dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi muncul kebijakan baru bahwa yang berhak terpilih untuk menjadi anggota legislatif adalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Mahkamah Konstitusi menilai, sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan nomor urut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

Berikut kutipan pernyataan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi (dalam HukumOnline, 24 Desember 2008):

<sup>2</sup> Disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam *Implementers Coordination Meeting* dengan Bappenas bersama lembaga donor UNDP (*United Nations Development Program*). kecacatan itu dapat berupa: kerusakan pada surat suara, nama pemilih yang tercatat lebih dari sekali, banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dan lain sebagainya.

*"Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat, jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif," Arsyad mengatakan: "dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak. Menurutny, memberlakukan sistem nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai pilihannya. Selain itu, sistem ini telah mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih".*

Salah seorang pembaca merasa tulisan yang disampaikan masih terlalu bersifat normatif, tidak sesuai dengan kenyataan kongkrit yang terjadi di masyarakat. Menurutny, pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilihan umum belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, berikut tanggapan yang disampaikan melalui tulisannya: *"Kog tulisannya seperti dengerin pidatonya birokrat yang normatif ya..."* (P, Politikana, 24 April 2009)

Hal tersebut menunjukkan sebagian warga masih pesimis terhadap pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dianggap masih belum merepresentasikan aspiras yang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia.

#### **4.1.2 Pemilihan Umum di Indonesia**

##### **4.1.2.1 Kualitas Pemilu Indonesia**

Proses pemilihan umum calon anggota legislatif yang baru pertama kali dilaksanakan oleh rakyat Indonesia, mendapat banyak tanggapan baik yang mendukung ataupun yang mengkritik.

Dalam postingannya yang berjudul "History has been made in Indonesia's political journey", Wimar Witoelar yang pernah menjabat sebagai juru bicara kepresidenan pada era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan pendapatnya:

*“Kehuar dari masalah-masalah teknis selama penyelenggaraan dan penghitungan, tapi fokus pada substansi hasil pemilu kali ini bisakah kita sebut bahwa pemilu kali ini adalah pemilu TERBAIK sepanjang sejarah?”*

Pernyataan tersebut muncul karena beberapa sebab, menurutnya:

- *“ Sipil telah menang melawan militer-ist. Kombinasi Gerindra & Hanura total meraih 8.04%, berarti suara sipil menikmati mayoritas 91.84%*
- *Partai sekular memenangkan pemilu dengan mayoritas besar dengan tinggal PKS yang membawa politik sektarian. PAN, PKB dan PPP partai dengan konten religius yang besar telah berkomitmen mendukung SBY capres yang non-sektarian*
- *Proses nominasi dan koalisi untuk menampilkan capres dilakukan secara terbuka, yang walaupun sebagian menganggap proses tersebut membosankan tapi sebenarnya proses tersebut adalah antitesis dari politik otoritarian gaya Soeharto*
- *Pemenang kursi di parlemen yang mengalami perubahan besar menunjukkan keinginan rakyat Indonesia akan PERUBAHAN.”*

Perubahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia terwujud melalui pemilihan umum yang ditilik dari kaca mata sejarah merupakan Pemilu memberikan corak tersendiri dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kemenangan sipil terhadap militer menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin melek politik dan yang terpenting memiliki kebebasan untuk memilih partai mana yang menurutnya sesuai. Sementara itu, yang kita ketahui selama 32 tahun Orde Baru memimpin, rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya partainya.

*“Sejarah tengah berjalan, dan walau lambat dan tertatih-tatih tapi harapan itu muncul karena hasil dan indikasi positif yang kita temui setiap hari.” (EN, Politikana, 10 Mei 2009)*

Demokrasi meskipun mengalami banyak hambatan, tetap membawa angin segar bagi masa depan rakyat Indonesia. Untuk itu, penulis memberi judul tulisannya 'Pemilu Terbaik Sepanjang Masa'.

#### 4.1.2.3 HAM dalam Pemilu

Setiap warga negara memiliki tiga hak dasar yang harus dijamin oleh negara, yaitu hak sosial (*social right*), hak sipil (*civil right*), dan hak politik (*political right*). Dalam negara yang demokratis, semua warga negara memiliki hak yang sama. Salah satunya adalah hak untuk beragama, sebagai bagian dari kepemilikan atas hak sipil.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 disebutkan :

*"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya"*

Pernyataan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi dan bukan sekuler. Seorang *citizen journalist* menyebutkan:

*"Di Indonesia, agama-agama memang menjadi primadona sejak era Suharto yg termasuk dalam rejim otoriter ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu kerjanya melalui lembaga-lembaga tradisional seperti agama yg menjadi anak emas. Tujuannya cuma satu, yaitu agar rakyat menjadi penurut.....Kalau anda mengikuti ajaran agama, maka otomatis anda akan mudah diatur oleh negara. Sedangkan negara dikuasai oleh para jendral dan kroninya. Kalau anda beragama, maka akan amanlah posisi penguasa sebab anda gampang ditakut-takuti dengan neraka as well as diiming-imingi dengan sorga."* (LR, dikutip oleh EN, 1 April 2009)

Meskipun hak warga negara terhadap kebebasan beragama sudah diatur dalam UUD 1945, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dari agama resmi yang sudah ditetapkan oleh negara.

*"Rejim otoriter ekstrim kanan seperti Indonesia di era Suharto bekerja dengan cara menggunakan lembaga-lembaga agama untuk mengontrol rakyat. Bukan karena agama-agama itu benar atau mencerdaskan rakyat, tetapi karena agama-agama itu merupakan sarana paling mudah untuk"*

*mengontrol pikiran rakyat. Pikiran anda itulah yg dikontrol oleh para pemuka agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu."*

Partai

*"Nah, tentu saja saya akan berpikir, apa bedanya partai Islam dengan partai non Islam? Apakah partai Islam akan otomatis menciptakan masyarakat yg adil dan sejahtera? Apakah benar ada partai Islam yg berwawasan kebangsaan?"*

#### IV.1.2.3 Masa Depan Indonesia dalam Pemilu

Pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 membawa euforia yang besar bagi hampir seluruh rakyat Indonesia yang selama Era Orde Baru berkuasa (32 tahun) tidak pernah dirasakan euforia tersebut. Hal tersebut juga dirasakan oleh salah seorang *citizen journalist* dalam situs Politikana.com yang menyatakan:

*"Pesta demokrasi negeri ibu pertiwi akan berlangsung hari ini. Gagap gempita gelaran ini sudah terasa memanas sejak tiga bulan lalu, saat KPU sudah mengizinkan siapa saja yang "berkepentingan" di ajang ini (termasuk RI-1) untuk mulai memperkenalkan diri ke publik yang lebih luas. Gelaran ini pun menghabiskan dana yang tidak sedikit, angka Rp. 18,6 trilyun muncul dalam pengajuan KPU. Yach, sebuah angka yang bisa jadi wajar ketika melihat apa yang direncanakan begitu dahsyat." (MQ Hid., 9 April 2009)*

Dana yang diperlukan untuk sebuah pelaksanaan pemilu sangatlah besar. Masalah ini merupakan suatu hal yang sangat penting. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) tidak mengatur mengenai perolehan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing calon anggota DPR/DPRD. Karena dianggap dana kampanye para calon tersebut berasal dari partai politiknya masing-masing, maka UU Pemilu hanya mengatur mengenai dana kampanye yang diperoleh dan digunakan partai politik peserta pemilu. Padahal bisa saja caleg tersebut langsung menggunakan dana

pribadi atau dana bantuan pihak lain yang diakuinya sebagai dana pribadi untuk membiayai kampanyenya.

Disinilah *loop hole* dari UU Pemilu kita. Para caleg dapat dengan bebas mencari sendiri dan menggunakan dana kampanye yang diperolehnya untuk membiayai kampanye mereka tanpa harus melapor ke KPU. Padahal hal ini rentan sekali dengan isu kolusi dan korupsi.

Meskipun demikian, sebuah mata uang selalu memiliki dua sisi, begitu pula pemilu yang akan membawa dampak positif maupun negatif. Menurutnya:

*“Sebuah dampak lain pun akan muncul, baik itu sisi positif maupun sisi negatif. Banyaknya orang yang menggangu dan tak punya perkerjaan, menjadikan pesta demokrasi ini menjadi lapangan pekerjaan yang cukup menggiurkan, mulai dari caleg, konfeksi, alat publikasi, hingga jurkam maupun (yang mungkin saja ada) calo suara dan bandar taruhan. Sisi positifnya? Yach, bisa jadi para politisi yang terpilih bisa dengan bijak dan amanah menjalankan apa yang sudah dijanjikannya saat berkampanye.”*

Kesadaran penulis terhadap situasi yang terjadi dalam pemilihan umum merupakan hal yang berkaitan dengan tingkat kesadarannya akan kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman akan sebuah pilihan dan konsekuensi menjadi kunci dari pemilihan umum yang akan menentukan nasib masa depan bangsa. Penulis mengatakan:

*“Apapun yang akan terjadi, sebenarnya bukanlah masalah yang besar (bagi saya). Asalkan semua pemilih sudah paham dan tahu akan konsekuensi dari pilihannya. Bukan malah kemudian memilih hanya untuk sekedar "ikut-ikutan" atau hanya karena beberapa lembar rupiah. Sangat disayangkan sekali jika hal ini yang terjadi...masa depan Indonesia yang sesungguhnya adalah pemahaman masyarakat akan apa yang dipilihnya beserta pilihan alternatif pemecahan masalah ketika permasalahan atas pilihan tersebut muncul. Jadi, golput atau tidak golput, pilih ini atau itu.*

*Semuanya tidak ada masalah, asalkan paham dan tahu akibatnya. Dan yang jelas pula, sudah ada rencana tindakan ketika pilihan tersebut menimbulkan resiko.”*

Meskipun tidak banyak komentar yang diberikan oleh pembaca lain, tetapi artikel ini mendapat rating yang cukup tinggi, hanya ada dua kategori rating yaitu bagus dan menarik.

#### IV.1.2.4 Ruang Publik dalam Pemilu

Jurgen Habermas memperkenalkan konsep ruang publik sebagai suatu tempat dimana publik bisa saling bertukar gagasan untuk menyelesaikan masalah politik melalui diskusi publik. Tempat-tempat seperti ini menjadi sangat vital bagi awal perkembangan demokrasi, seperti yang dituturkan oleh salah seorang *citizen journalist* dalam posting tulisannya:

*“Istilah ‘ruang publik’, mau tidak mau, membawa kita ke konsep demokrasi, sebuah kondisi kehidupan dimana masyarakat umum atau ‘publik’ memegang peranan yang sangat penting. Konsep demokrasi mengisyaratkan bahwa kekuasaan politik yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat adalah kekuasaan yang memang benar-benar berasal dari masyarakat itu sendiri demi kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat memiliki kekuasaan mengawasi tepat-tidaknya kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh siapapun yang mereka pilih untuk melakukannya. Masyarakat umum atau publik memiliki kekuasaan politik paling tinggi dalam sebuah kondisi kehidupan yang disebut sebagai demokrasi.”*

Sebuah pemerintahan yang melaksanakan prinsip demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga dalam hal ini rakyatlah yang seharusnya memiliki kekuasaan yang paling tinggi yang diwakilkan kepada aparat pemerintah. Masyarakat menjadi kontrol terhadap aparat pemerintah yang menjalankan amanat rakyat. Itulah yang disebut dengan demokrasi.

*Citizen journalism* merupakan sebuah ruang publik dimana seluruh lapisan masyarakat yang dapat mengakses internet (atau media massa lain yang

menyediakan ruang untuk aktivitas *citizen journalism*) memiliki kesempatan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, melalui pendapat atau kritik yang dilontarkan dalam postingan tulisan para *citizen journalist*. Terjadi interaksi di antara para *citizen journalist*.

### IV.1.3 Aktor-Aktor Dalam Pemilihan Umum Legislatif

#### IV.1.3.1 Jejak Rekam Calon Legislatif

Pada kategori ini akan ditelaah lebih lanjut bagaimana jejak rekam aktor-aktor yang menjadi calon anggota legislatif dalam pemilihan umum. Dalam tulisannya yang berjudul 'Kasino Besar Bernama Indonesia: Budaya Pop dan Fenomena Fans Club Pemilu 2009', seorang *citizen journalist* menyebutkan mengenai prediksi pemilihan umum:

*"Ibarat pasar taruhan, ada banyak prediksi. Di kasino pemilu 2009, prediksi itu adalah publikasi hasil survei empat lembaga survei (CSIS, LP3ES, LIPI, dan Puskapol UI) yang dirilis Maret lalu. Partai Demokrat mendapatkan 21,5 persen pemasangan taruhan, PDIP 15,21 persen, Partai Golkar 14,27 persen. Diikuti PPP dengan 4,15 persen, PKS 4,07 persen, PKB 3,25 persen, PAN 2,91 persen, dan Gerindra 2,62 persen."* (BBC, Kamis, 2 April 2009)

Menurutnya, pelaksanaan pemilihan umum ibarat sebuah kasino, karena banyaknya para calon yang mendaftarkan dirinya sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pemilihan umum dengan menggenbar-gemborkan janji-janjinya melalui kampanye. Gambaran kompetensi dari para caleg tersebut dianggap tidak jelas dan tidak memenuhi syarat sebagai seorang wakil rakyat. Ibarat sebuah pasar, para caleg tersebut menawarkan dagangannya dengan mengobral janji agar para pembeli (pemilih) mau membeli barang dagangannya tersebut dengan memberikan suaranya. Hal tersebut disampaikan melalui posting tulisan berikut ini:

*“Sejenak kita tanggalkan rasa khawatir dan gelisah setiap kali membayangkan wajah para legislator hasil pemilu legislatif 9 April 2009. Tentang gambaran kompetensi mereka yang tidak jelas, yang semakin kabur setelah memerhatikan pesan-pesan politik mereka yang bertabur di spanduk-spanduk dan billboard di jalanan. Kebanyakan mereka mirip para pedagang dadakan, yang mencari untung cepat dalam sebuah bazaar, pasar dadakan, pasar malam, atau pasar kaget yang bernama pemilu. Hanya, yang mereka tawarkan bukanlah sesuatu yang terukur nilai guna dan manfaatnya bagi si pembeli—yang dalam bazaar pemilu disebut sebagai pemilih—melainkan janji-janji yang seluruhnya bisa disimpulkan dalam satu kata: ketidakpastian.”*

#### **IV.2 Konteks: Produksi dan Reproduksi Teks**

Tulisan-tulisan yang diposting dalam situs Politikana.com diproduksi berdasarkan ketertarikan *citizen journalist* terhadap sebuah fenomena khususnya terkait isu-isu politik. *Citizen journalist* bebas mengemukakan pendapatnya terhadap suatu isu. Siapapun dapat mengirimkan tulisannya tanpa harus memperhatikan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya.

Di portal ini moderasi tetap diberlakukan, namun tidak terlalu ketat bahkan cenderung bebas. Anggota situs ini boleh mengeluarkan uneg-unegnya tentang masalah yang terjadi terhadap negara Indonesia. Jika nanti ada tulisan yang tidak mengena, maka anggota lain akan memberi penilaian negatif.

Kontrol dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dalam hal ini kontrol sosial berperan sangat penting, seperti yang diungkapkan oleh Wislon Lalengke selaku ketua umum Persatuan Pewarta Warga Seluruh Indonesia (PPWI):

*“kontrol sosial disini yang paling dominan, tapi kita sebagai sebuah organisasi tentu punya sikap, punya pandangan yang kita berikan kepada masyarakat bahwa untuk mewartakan sebuah informasi kepada masyarakat tentu ada etika-etika, kurang lebih sama dengan wartawan. Itu kan sifat-sifat, nilai-nilai universal bahwa beritanya harus benar, harus faktual, jangan ngarang, jangan bohong, itu kan*

*sifat-sifat universal. Nah, tapi kita tidak memaksa pewarta warga untuk melakukan hal seperti itu, kita hanya mengarahkan, kalau anda langgar, kita juga tidak punya hak untuk memberikan sanksi. Jadi sanksi itu lebih diserahkan kepada mekanisme, kalau itu berkenaan dengan hal-hal yang bersifat kriminal misalnya pencemaran nama baik, ya kan bisa klaim, laporkan ke polisi. Polisi lah yang memproses, bukan kita. Terus kalau itu hanya menyangkut persoalan-persoalan nilai susila dan sebagainya, sanksi masyarakat malah lebih berat."*

Ia menambahkan bahwa:

*"Di sistem Jurnalisme Warga juga kita punya etika, kita punya koridor-koridor yang menjadi panduan warga untuk melaksanakan aktifitasnya, bukan tugas. Kalau wartawan ada sanksi-sanksi hukum yang lebih ketat."*

Wajah media massa sangat ditentukan oleh interaksi dua belah pihak. *Pertama*, masyarakat selaku konsumen dan produsen peristiwa. *Kedua*, jurnalis selaku mediator dan aktor dalam sistem komunikasi massa modern. Menjalankan fungsi penyedia informasi aktual ke sektor institusi dan individu dalam lingkup sosial, jurnalis memiliki keterikatan pada norma-norma yang secara yuridis dan kultural dianut masyarakat serta diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan penuhi. (Masduki, 2003: 101). Ditengah tuntutan itu, jurnalis dan masyarakat saling berinteraksi dalam ruang publik.

Begitu pula seperti yang dilakukan oleh Politikana.com, dimana masyarakat dapat berinteraksi secara penuh dalam ruang publik dengan etika-etika universal yang dimiliki oleh setiap *citizen journalist* sehingga interaksi dapat terjaga dengan baik dan bertanggung jawab terhadap setiap tulisan yang diposting dan dikomentari.

Para *citizen journalism* memiliki kesadaran yang tinggi terhadap permasalahan khususnya di bidang politik dan juga motivasi yang kuat untuk dapat berbagi dengan orang lain melalui curahan hati dan pikiran yang disampaikan melalui teks-teks dalam tulisannya. Bahkan seorang wartawan Kompas yang aktif dalam kompasiana mengatakan bahwa "yang sekarang

berkembang adalah konsep *shari-ism* dimana semangat warga untuk berbagi (*to share*) dengan orang lain mengenai pendapatnya sangat besar. "*Shari-ism, sekarang bukan jurnalism lagi, itu menjadi sebuah konsep yang kini berkembang.*" (wawancara dengan kang Pepih Nugraha- Kompasiana).

Dalam ranah persebaran informasi, *citizen journalist* dan jurnalisme profesional dapat dikatakan berada pada koridor yang sama, yaitu, sama-sama bertujuan menyebarkan informasi. Namun, jika mengacu pada kode etik dan prinsip jurnalistik (diatas), terlihat adanya beberapa perbedaan antara jurnalis *mainstream* (arus utama) dengan *citizen journalist* dalam hal cara kerja. Jurnalis arus utama harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang jurnalisme. Mereka juga dituntut untuk patuh pada kode etik profesi. Jurnalis arus utama juga mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya dari lembaga pers yang ada. Profesi jurnalis menuntut praktisinya untuk paham hak dan kewajiban masing-masing. Karena itu, dapat dikatakan jurnalis memiliki kriteria profesionalisme (*expertise*), terdidik (*well educated*), dan dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan memadai (*well equiped*). Lazimnya para jurnalis menerima gaji yang layak (*well paid*). Namun, mereka memiliki motivasi (*well motivated*) yang lebih dari sekedar materi karena umumnya mereka telah melalui proses seleksi khusus (*well selected*). (Dirgahayu dalam Jurnal Observasi, 2007: 28)

## BAB V

### ANALISA HASIL PENELITIAN:

#### DEMOKRASI JURNALISME WARGA, DEMOKRASI INDONESIA

Dari temuan yang telah disampaikan sebelumnya, menunjukkan bahwa *citizen journalism* dapat dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya secara lebih leluasa, terstruktur, serta dapat diakses secara umum dan sekaligus menjadi rujukan alternatif. Menurut Nofie Iman, *citizen journalism* (jurnalisme orang biasa) untuk menggambarkan betapa pemberitaan yang selama ini dikuasai oleh mainstream media sudah bergeser ke tangan individu. Kita semua bisa menjadi jurnalis. Tiap orang bisa menjadi penerbit dan atau pembaca, tidak hanya menerima, tapi ikut serta berinteraksi (<http://www.nofieiman.com>)

*Citizen journalism* merupakan sumber informasi alternatif yang sekaligus merupakan perlawanan terhadap informasi arus utama yang disampaikan oleh media massa mainstream. Contoh terlihat saat protes warga Myanmar terhadap junta militer di tahun 2007. Ketika media massa konvensional dilarang meliput oleh pemerintah Junta Myanmar, warga berusaha menyalurkan informasi melalui internet, mulai dari tulisan, foto, hingga video. Internet yang merupakan pintu globalisasi mampu mengoptimalkan peran *citizen journalism* sebagai ajang memberi dan mendapatkan informasi, sekaligus berinteraksi.

Seiring dengan prinsip tersebut, di Indonesia, aktivitas *citizen journalism* juga dapat dianggap sebagai perlawanan, perlawanan secara cerdas, menurut bapak Wilson:

*“Kita tidak hanya melihat sebagai sebuah media alternatif, tapi ini adalah klaim/counter, perlawanan dalam pengertian perlawanan secara cerdas, dan kita lebih melihat juga apa yang kita lakukan ini sebagai pembelajaran/edukasi kepada masyarakat, jangan sampai mereka hanya*

*dijadikan obyek tapi lebih kepada subyek, kenapa kita harus menjadi sapi perah dengan kemampuan yang ada."*

## 5.1. Demokrasi dalam Jurnalisme Warga

### 5.1.1. Keragaman Isu

Dalam situs Politikana.com, dibahas berbagai macam isu yang menjadi titik pusat perhatian para *citizen journalist* terutama isu politik, seperti isu pemilihan umum di Indonesia, kualitas pemilu Indonesia, masa depan Indonesia dalam pemilu, pemilu untuk kesejahteraan rakyat, ruang publik dalam pemilu, Hak Azasi Manusia (HAM) dalam Pemilu; aktor-aktor dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), antara lain kapasitas calon wakil rakyat, komitmen calon wakil rakyat, jejak rekam calon wakil rakyat, parpol lebih dikenal daripada calon wakil rakyat, kritik terhadap calon presiden, komitmen partai politik terhadap pluralisme; pemilihan presiden (Pilpres); pilihan politik; kepemimpinan dalam politik.

*Citizen journalist* yang berperan sebagai penulis dan pembaca bisa mengirimkan tulisan dengan substansi apapun terkait dengan isu politik. Artinya, bahwa semua bebas menawarkan isu politik yang akan dibahas dalam situs Politikana.com. Selain itu, terjadi interaksi dalam situs Politikana.com melalui respon yang disampaikan oleh para *citizen journalist* lainnya yang memberikan komentar atau penilaian terhadap sebuah tulisan yang diposting. Komentar yang disampaikan bisa bersifat serius atau hanya sekedar komentar-komentar iseng.

Meskipun *citizen journalist* yang ikut terlibat dalam sebuah interaksi bebas menuliskan apapun yang ingin disampaikannya, namun mereka terikat oleh sebuah nilai-nilai universal yang mengontrol etika mereka dalam menyampaikan pendapatnya melalui tulisan. Nilai-nilai universal tersebut berasal dari kontrol sosial dalam masyarakat, antara lain tulisan yang dimuat tidak boleh mengandung unsur SARA, berbau

pornografi, dan pencemaran nama baik. Apabila ada seorang *citizen journalist* yang melanggar, maka *citizen journalist* yang lain akan memberikan hukuman berupa respon negatif.

Dari uraian tersebut diatas, dalam konteks demokrasi terlihat bahwa *citizen journalism* memberi ruang bagi tumbuhnya kebebasan berpendapat dan mengeluarkan ide tanpa rasa takut. Selain itu, *citizen journalism* juga memberikan kesadaran seseorang untuk menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Dua hal itu merupakan nilai-nilai universal yang ada di dalam konsepsi demokrasi. Jadi, pada titik ini, *citizen journalism* dapat berperan dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi.

#### 5.1.2. Kesetaraan Aktor

Dalam situs Politikana.com, semua *citizen journalist* memiliki posisi tawar yang sama, meskipun terdapat pengelola, namun intervensinya sangat minim, dalam aktivitasnya, semua aktor yang terlibat dapat menyampaikan postingan tulisan sepanjang tidak melanggar aturan-aturan universal (misal mengandung unsur SARA, porno, pencemaran nama baik, dan sebagainya). Para *citizen journalists* tidak perlu merasa takut terkena sensor dari pengelola atau tanpa takut tulisan yang disampaikan tidak menguntungkan dari sisi bisnis. Hubungan antar aktor relatif setara. Tulisan atau teks yang diposting oleh seorang *citizen journalist* mencerminkan kepentingan penulis yang juga bisa berperan sebagai pembaca dimana mereka adalah bagian dari warga yang memiliki kebebasan untuk berpendapat.

Nilai Kesetaraan antar aktor dalam Politikana.com tersebut mencerminkan nilai demokrasi yang tumbuh berupa kesetaraan yang memberikan ruang bagi siapapun untuk berpartisipasi secara langsung, tanpa ada perantara yang bisa menyelewengkan kepentingan tersebut.

## 5.2 *Citizen Journalism* dan Penguatan Demokrasi Indonesia

### 5.2.1 Nilai-Nilai Demokrasi

Proses produksi dan reproduksi tulisan / teks dalam *citizen journalism* berlangsung secara demokratis dan sederhana. Siapapun dapat dengan bebas memposting tulisannya ke situs Politikana.com, khususnya berita-berita yang terkait dengan politik, tanpa merasa takut dan tidak ada sensor terhadap postingan tulisan.

Selain itu, pembaca lain dapat memberikan tangggapannya secara langsung tanpa melalui prosedur tertentu. Hal ini menunjukkan, meskipun terjadi dalam dunia maya, namun telah terjadi interaksi antar pembaca dalam aktivitas *citizen journalism* di Politikana.com. Interaksi yang terjadi membentuk pola pikir seseorang untuk dapat saling menghargai perbedaankarena siapapun harus menghargai ide apapun yang disampaikan oleh orang lain.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Enda Nasution, yang dinobatkan sebagai bapak blogger Indonesia:

*"Demokrasi itu kan menerima perbedaan. Masalah nanti tulisan tersebut sesuai atau tidak, anggota lain akan menilai. Jika jelek ya jelek, jika bagus ya bagus,"*

### 5.2.2. Kontrol atas Kekuasaan

Dalam sebuah negara yang demokratis, pemerintah harus responsif terhadap kepentingan rakyat (terutama terhadap hak-hak mereka, khususnya hak-hak sosial, sipil, dan politik. Ketika itu tidak dipenuhi mendorong kearah demonstrasi. Karena oligarki dalam pemerintah, mementingkan partai dan golongannya.

Pada akhirnya, *citizen journalism* dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan atau jalannya pemerintahan dengan cara yang demokratis, yaitu dengan menyampaikan pendapat di media massa, bukan dengan cara biasa dilakukan seperti demonstrasi, penyampaian pendapat secara langsung ke lembaga DPR.





## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Hadirnya *citizen journalism* bukan hanya sebagai demokratisasi media, tapi sebagai wadah partisipasi masyarakat baik sebagai subjek maupun objek informasi. Semua ini banyak sekali kontribusinya dalam mewujudkan masyarakat informasi. Bentuk partisipasi inilah yang menarik untuk dikaji, apa, bagaimana dan sampai sejauh mana bentuk partisipasi masyarakat dalam *citizen journalism* itu. *Citizen journalism* hadir dengan konsep baru; dari, oleh, dan untuk kepentingan masyarakat.

Mereka yang berpartisipasi dalam *citizen journalism* memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan hak-haknya sebagai warga negara. *Citizen journalism* mendidik masyarakat dengan nilai-nilai demokratis: kesetaraan, berani menyampaikan pendapat, mau berdiskusi dengan pihak lain yang berbeda pendapat, mau bernegosiasi dan berkompromi, tidak ada kekerasan, dan sebagainya). *Citizen journalism* merupakan cerminan dari *civil society* yang bersifat mandiri dan sukarela, dan mendorong semangat warga untuk bisa berpartisipasi ikut berpartisipasi dan mencari solusi untuk permasalahan bangsa dan negara.

Di Asia, *citizen journalism* sukses digalakkan lewat situs Oh My News, yang berpusat di Seoul, Korea Selatan. Situs yang terbit pada 22 Februari 2000 ini mempunyai motto "Setiap Warga adalah Seorang Reporter". Di Indonesia, *citizen journalism* berkembang tahun 2005 melalui media berbasis internet. Perkembangannya ditandai dengan munculnya beberapa situs seperti: *halamansatu.net*, *wikimu.com*, dan *panyingkul.com* yang hadir dengan motto: "Jurnalisme Orang Biasa".

Berdasarkan jajak pendapat, diketahui saat ini makin banyak orang yang beralih ke berbagai sumber berita alternatif seperti internet, untuk memperoleh

informasi tentang kampanye presiden dan topik-topik penting lainnya (Gray, 2006: 3). Penyampaian informasi lewat internet menembus ruang-ruang publik yang tertutup oleh kekuasaan politik. Teknologi media internet membangun wacana demokrasi (Ellen, 1998).

Pengaruh informasi dan media *citizen journalism*, bukan sekedar menambah pengetahuan / wawasan (kebutuhan kognitif), tapi dapat mengubah pola pikir dan pola hidup masyarakat (kebutuhan afektif), yaitu dapat menumbuhkan kreasi dan dinamika hidup yang ditandai dengan adanya kemauan untuk bekerja atau berusaha (manusia produktif).

*Citizen journalism* tidak perlu khawatir menjadi ancaman bagi mainstream media, karena tidak akan saling merebut lahan, melainkan akan saling membagi dan melengkapi informasi. Masyarakat sendirilah yang menilainya, mana yang lebih baik dan bermanfaat. *Citizen journalist* tidak perlu takut kehabisan berita, sebab berita/ peristiwa yang dipublikasikan mainstream media sifatnya straightnews, masih dibatasi ruang/ kolom, dilihat dari aspek kepentingan pihak surat kabar dan harus melalui sensor, agar terhindar unsur SARA. Individu masyarakat yang berpartisipasi sebagai *citizen journalist/ blogger*, jangan kalah sigap oleh para wartawan mainstream media dalam mendapatkan informasi, mengorek dan mengungkap sekaligus memublikasikannya.

Banyak keuntungan dan harapan yang bisa diperoleh masyarakat umum dalam model pemberitaan *citizen journalism* itu, antara lain:

- (1) Proses dalam pemberitaan *citizen journalism* dapat mengimbangi polarisasi mainstream media dalam kebijakan pemberitaannya. *Citizen journalism* tidak bertujuan untuk menciptakan keseragaman opini publik, namun lebih menitikberatkan pada “inilah yang terjadi di lingkungan kita”. *Citizen journalism* menjadi wadah gairah bercerita dari semua individu.

- (2) Jumlah informasi yang ditawarkan akan lebih banyak dan beragam. *Citizen journalism* menawarkan perputaran informasi tanpa batas, tak ada halaman maupun durasi. Pemberitaannya dapat diakses dimana dan kapan saja.
- (3) Kelahiran *citizen journalism* didorong oleh makin meluasnya penggunaan internet. Kehadiran weblog atau blog menjadi kegiatan publikasi yang dapat dilakukan siapapun yang memiliki akses internet.
- (4) Meluasnya gerakan demokrasi membuat makin banyaknya orang yang ingin berkontribusi dalam proses kemasyarakatan.

Sejalan dengan harapan diatas, diperlukan pula penunjang untuk terwujudnya partisipasi dalam *citizen journalism*, yaitu peningkatan sarana dan teknologi informasi (internet), baik kepemilikan maupun kemampuan dalam operasionalisasi internet sebagai wadah informasi dimana-mana, terutama didaerah perkotaan.

Ketika teknologi komunikasi yang semakin berkembang memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam pemberitaan ketika itu pula warga menjadi individu yang terlibat aktif dalam penyampaian informasi. *Citizen journalism* menurut mantan jurnalis Dan Gillmor adalah pemberdayaan warga untuk terlibat aktif dalam media. Gillmor menyatakan bahwa *citizen journalism* lahir dari ranah media yang berbasis internet. Lewat internet, warga atau masyarakat bebas berekspresi menyampaikan informasi yang mereka miliki. Ciri khas *citizen journalism* muncul lewat spontanitas warga ketika memiliki informasi yang mereka rasa penting bagi orang banyak. *Citizen journalist* dalam Politikana.com sebagai warga negara yang aktif, dalam aktivitasnya memunculkan partisipasi publik secara individual (seperti pemberian rating dan komentar terhadap suatu tulisan yang di posting).

## 6.2 Saran:

- Keunggulan aktivitas *citizen journalism* tercermin melalui perannya dalam *civil society* yang terbukti dapat memperkuat sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Hanya saja interaksi yang terjadi masih bersifat horisontal (sesama pembaca) belum secara vertikal (terhadap aparat pemerintah) yang diharapkan masyarakat dapat turut terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah juga aktif terlibat dalam aktivitas *citizen journalism* seperti menyediakan portal khusus yang didalamnya rakyat bisa ikut mengontrol jalannya pemerintahan dan memberi ide atau pemikiran kepada para pengambil kebijakan agar mengetahui dengan lebih jelas apa yang menjadi kehendak rakyat, bukan atas dasar kepentingan golongan.
- Dari segi hukum, aturan dan perlindungan terhadap aktivitas *citizen journalism* masih sangat lemah, perlu adanya undang-undang yang mengatur informasi transaksi elektronik yang secara tegas dan jelas (meskipun saat ini sudah dibuat UU ITE, namun belum secara rinci menjelaskan aturan dan perlindungan terhadap para *citizen journalist* terbukti dengan adanya kasus pemenjaraan ibu Prita).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Altschull, J. H. 1984. *Against of Power: The Role of News Media in Human Affairs*. White Plains. N. Y.: Longman.

Anderson, Douglas A & Bruce D Itule. 1984. *Contemporary News Reporting*. New York: Random House.

Asagiri, Amsal, dkk. 2006. *Mini Encyglloss Seputar ICT*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika-Depkominfo.

Bungin, Burhan, Prof. Dr. H. M. 2007. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*, London: Thousand Oaks.

Dye, Thomas R. dan Harmon Zeilger. 1996. *The Irony of Democracy Uncommon Introduction to American Politic*. California: Warsworth Publishing Company.

Effendy, Onong Uchyana. 2003. *Komunikasi & Modernisasi*. Bandung: Mandar Maju.

Hume, Ellen. 1998. *Resource Journalism: A Model for New Media*, "The State of Democracy in the Digital Age".

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkIS.

Gee, James Paul. 1999. *An Introduction to Discourse Analysis Theory and Method*. New York: Routledge.

Giddens, Antony. 1997. *Sociology*. Oxford : Polity Press.

Gillmor, Dan. 2004. *We The Media: Grasroot Journalism by The People, for The People*. California: O'Reilly.

Gray, Jerry D. 2006. *Dosa-dosa Media Amerika*. Jakarta: UFUK Press.

Griffin, EM. 1997. *A First Look At Communication Theory*. Boston: McGraw Hill.

Habermas, Jurgen. 2008. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hachten, William A. 2005. *The Troubles of Journalism: A Critical Look at What's Right and Wrong With The Press*. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Heryanto, Ariel. 2000. *Perlawanan dalam Kepatuhan*. Bandung: Mizan.

Ishwara, Luwi. 2005. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

J. H. Altschull. 1984. *Against of Power: The Role of News Media in Human Affairs*. White Plains. N. Y.: Longman.

Kovach, Bill & Tom Rosentiel. 2001. *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Crown Publisher.

Lindlof, Thomas R. 1995. *Qualitative Qommunication Research Methods*, Sage Publication.

Littlejohn, Stephen W. 1992. *Theories of Human Communication 4th Edition. Chapter 5: Theories of Discourse*. Wadsworth, California.

Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.

Mencher, Melvin. 2000. *News Reporting and Writing*. Boston: McGraw Hill.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Naisbitt, J. 1994. *The Global Paradox*. New York: William Morrow.

Rachmiatie, Atie. 2007. *Radio Komunitas: Ekskalasi Demokratisasi Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Ritonga, Jamilludin. 2005. *Menyoal Kontrol Pers*. Jakarta: Dinamika.

Rivers, William L & Jay W. Jensen. 2004. *Media Massa & Masyarakat Modern, Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.

Robert C. Holub. 1991. *Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere*. London and New York : Routledge.

Romli, Asep Syamsul M. 2003. *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Batic Press.

Santana, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor.

Simbolon, Parakriti T. 2006. *Vademekum Wartawan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumadiria, AS Haris. 2006. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Tim Penulis, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) dan The Ridep Institute. *Demoskratos=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula*. 2003.

Triwibowo, Darmawan. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.

United States Information Agency. 1991. *What is Democracy*. Washington: USIA

Winataputra, Urip Saripudin. 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Deirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

#### Jurnal:

Hidayat, Dedy N. "Teori dan Penelitian dalam Teori-Teori Kritis" dalam *Jurnal Thesis*, Vol. IV/2. Mei – Agustus. 2005

*Jurnal Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, April 2007. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Observasi, Kajian Komunikasi dan Informatika. "Mengamati Fenomena Citizen Journalism" Vol. 5, No. 1, Th. 2007. Bandung: BP2i dan Simbiosis Rekatama Media.

Supriyanto & Yusuf, Pers dan Teknologi Media: *Dejurnalisasi di Tengah Konvensional*, dalam *Jurnal Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, April 2007.

Tesis & Disertasi:

Dhakidae, Daniel. 1991. *The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia News Industry*. PhD Thesis, Cornell University.

Khakim, Akhmad. 2004. *Kontrol Publik atas Pemberitaan Media (Studi Kasus Konflik Jawa Pos vs Banser)*. Departemen Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana – Universitas Indonesia, Jakarta.

Riswandi. 2000. *Isu-Isu Demokratisasi Pada Surat Kabar Indonesia Era Orde Baru dan Orde Reformasi (Suatu Analisis Komunikasi Politik dalam Harian Kompas, Merdeka, dan Republika)*. Departemen Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana – Universitas Indonesia, Jakarta.

Widyawati, Nina. 2004. *Rasisme dalam Media (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kerusuhan Mei 1998 pada Harian Kompas, Media Indonesia, dan Republika)*. Departemen Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana – Universitas Indonesia, Jakarta.

Skripsi:

Putri A.P, Ulung. 2008. *Fenomena Citizen Journalism dalam Ranah Media Massa Konvensional (Televisi) di Indonesia (Studi pada Program I-Witness di Metro TV)*. Departemen Ilmu Komunikasi Program Sarjana – Universitas Indonesia, Depok.

Internet:

<http://www.panyingkul.com>

<http://www.politikana.com>

<http://www.nofreiman.com>

<http://www.tempo.co.id/ang/min/02/05/kolom2.htm>

<http://www.fortunecity.com/millennium/oldemill/498/civils/FMSuseno.html>

<http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/04/29/90/215117/politikana-com-belajar-politik-yang-sesungguhnya>



## Kalau Golput akan Masuk Neraka

enda Rabu, 1 Apr '09 08:07

*\*Tulisan di bawah ini adalah notes-nya mas Leonardo Rimba di Facebook, untuk mengakses aslinya bisa [klik kesini](#). Dipostingkan atas seijin pemiliknya.*

T = Kapan kolom AGAMA di KTP kira-kira dihilangkan di Indonesia? Gara-gara ini orang masih laku jualan agama. Masih dalam kandungan sudah harus mendapat restu pemimpin agama. Lahir sudah harus mendapat restu pemimpin agama. Belajar di sekolah harus satu agama, kawin harus restu pemimpin agama, aniwe emang sentral banget fungsi agama di Indonesia. Makanya jadi tetap laku keras jualannya.

J = Waktu awal era reformasi kita mendengar banyak desas desus bahwa kolom agama dalam KTP akan dihilangkan. Ternyata cuma desas desus saja, dan masih dipertahankan terus sampai sekarang. Masih ada kolom agama dalam KTP yg tidak dihapus.

Harusnya, kalau konsekwen, kolom agama di KTP dihilangkan secara total. Jadi, orang tidak perlu mengisi atau mengosongkan karena kolomnya memang tidak ada. Negara-negara maju yg menghormati Hak Azasi Manusia (HAM) tidak mengenal kolom agama. Agama tidak menjadi syarat untuk memperoleh perlakuan sama di depan hukum.

Di Indonesia, agama-agama memang menjadi primadona sejak era Suharto yg termasuk dalam rejim otoriter ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu kerjanya melalui lembaga-lembaga tradisional seperti agama yg menjadi anak emas. Tujuannya cuma satu, yaitu agar rakyat menjadi penurut.

Kalau anda mengikuti ajaran agama, maka otomatis anda akan mudah diatur oleh negara. Sedangkan negara dikuasai oleh para jendral dan kroninya. Kalau anda beragama, maka akan amanlah posisi penguasa sebab anda gampang ditakut-takuti dengan neraka as well as diiming-imingi dengan sorga.

Ekstrim kiri bekerjanya lain lagi. Kiri itu komunis, dan dalam rejim komunis segala macam agama itu tidak akan memperoleh segala macam sanjungan. Komunis itu menelanjangi segala macam ajaran agama yg isinya pembodohan massal. Tetapi komunis juga memiliki kekurangan, yaitu adanya pemimpin partai dan birokratnya yg menggerogoti negara dan menjadi warganegara kelas satu, dan warganegara lainnya duduk di kelas kambing.

Rejim otoriter ekstrim kanan seperti Indonesia di era Suharto bekerja dengan cara menggunakan lembaga-lembaga agama untuk mengontrol rakyat. Bukan karena agama-agama itu benar atau mencerdaskan rakyat, tetapi karena agama-agama itu merupakan sarana paling mudah untuk mengontrol pikiran rakyat. Pikiran anda itulah yg dikontrol oleh para pemuka agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Kalau bukan pikiran anda yg dikontrol, apa lagi? Pedahal, asset kita sebagai manusia beradab yg terbesar adalah pikiran kita. Kita bisa berpikir, kita bisa membandingkan, dan kita bisa mengambil kesimpulan sendiri.

Contoh, ada parpol yg berslogan sebagai "partai Islam berwawasan kebangsaan".

Nah, tentu saja saya akan berpikir, apa bedanya partai Islam dengan partai non Islam? Apakah partai Islam akan otomatis menciptakan masyarakat yg adil dan sejahtera? Apakah benar ada partai Islam yg berwawasan kebangsaan?

Saya akan berpikir dengan bebas karena saya memang manusia bebas, walaupun saya juga tahu bahwa partai Islam tidak akan mau saya berpikir dengan bebas. Partai Islam maunya saya dicocok hidungnya seperti kerbau sehingga bisa disetir kesana kemari sambil berteriak allahuakbar, tanpa tahu apa yg diteriaki dan apa maksudnya.

Kembali ke partai Islam yg mengaku berwawasan kebangsaan, walaupun saya tahu itu tidak benar.

Yg saya tahu benar, partai-partai Islam itu ngotot menggolkan UU Pornografi yg menginjak-injak HAM warganegara dan tidak memperdulikan protes dari berbagai komponen bangsa. Partai-partai Islam tidak memperdulikan protes dari kelompok Katolik, Hindu Bali, seniman, aktivis HAM, aktivis feminis, dsb ketika pembahasan UU Pornografi.

Apanya yg berwawasan kebangsaan?

So, ternyata saya akhirnya mengerti bahwa partai Islam yg berslogan berwawasan kebangsaan itu cuma beriklan saja. Dan itupun iklan kosong. Pepesan kosong. Bukannya berwawasan kebangsaan malahan kebalikannya, yaitu berwawasan sempit mau menjadikan Indonesia seperti negara-negara Islam. Negara Islam? Apakah negara Islam lebih beradab? Apakah negara Islam lebih manusiawi? Jawabnya tentu saja tidak.

Kita jujur saja, yg namanya negara Islam itu menginjak-injak HAM atas nama Allah SWT. Yg menjadi pemimpin adalah para ulama yg sangat senang kawin sampai empat kali dan melecehkan wanita. Dan petantang petenteng diridhoi oleh Allah SWT tanpa bisa diprotes. Kalau kita protes mereka bilang bahwa agama mereka dihina. Dalam negara Islam kita tidak bisa memprotes ulama karena ulama itu difindungi oleh hukum. Negara dan ulama saling mendukung untuk membodohi rakyat banyak.

Indonesia dalam jaman Suharto adalah jenis negara seperti itu di mana ada agama-agama resmi yg memperoleh perlindungan dan tidak boleh "dihina" (dalam tanda kutip), tidak boleh dikritik, tidak tersentuh oleh protes masyarakat banyak, terlebih lagi oleh protes kaum wanita, walaupun ajaran dan fatwa-nya itu tidak masuk akal.

Tetapi kita sudah masuk era Reformasi dan harusnya agama-agama itu ditempatkan dalam porsi wajar saja sebagai lembaga otonom yg tidak memiliki hak untuk mengontrol pikiran orang.

Sekarang juga lembaga-lembaga agama itu tidak lagi bisa mengontrol pikiran orang. Kita sudah sadar bahwa ulama-ulama itu kepentingannya hanya untuk membodohi orang banyak. Tetapi sayangnya masih ada UU yg melindungi agama-agama "resmi".

Agama itu boleh bilang tidak terhitung banyaknya di dunia, setiap orang bisa dan berhak bikin agama baru kalau mau, dan membatasi hanya ada enam agama resmi merupakan suatu kenajisan yg dipraktekkan terus di Indonesia sampai saat ini.

Najislah! Padahal Piagam HAM dari PBB yg juga sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI menyatakan bahwa setiap manusia berhak berkeyakinan apapun. Nah, ini malahan ada pemerintah yg memaksa warganegara untuk beragama, pilih salah satu dari enam agama "resmi". Najis!

T = Btw, Arab Saudi sudah tidak memperlakukan paspor khusus haji, tapi menggunakan paspor internasional, maksudnya apa yach? Apakah mereka sudah mulai berubah? karena paspor internasional kan ngga ada kolom AGAMA nya ... Walaupun bimas haji Departemen Agama kita masih ingin ngotot pake paspor haji, tapi mereka dicuekin aja ama Arab.

J = Departemen Agama di RI ini aslinya merupakan Departemen Urusan Haji. Kerjanya ngurusin orang naik haji belaka, dan bukan ngurusin agama-agama orang.

Tetapi sejak Suharto kudeta di tahun 1965, agama-agama digunakan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Suharto itu bilang bahwa komunis tidak beragama, sehingga semua WNI harus beragama dan, waktu itu, dipilhkanlah lima agama resmi untuk dianut. Dan maraklah segala macam pelecehan atas HAM manusia untuk bebas beragama, berserikat, dan berpendapat.

Suharto itu rejim otoriter ekstrim kanan, cara kerjanya memang seperti itu, menggunakan agama-agama untuk mengontrol masyarakat. Kalau tidak beragama artinya komunis, dan harus di-diskriminasi, dibedakan perlakuannya, dilecehkan, disegala-macamman. Itu kelakuan Suharto.

Tetapi Suharto jatuh dan segala macam kedoknya dalam menggunakan agama untuk mengontrol rakyat sudah terbuka.

Sayangnya saat ini masih banyak orang yg tidak bisa melihat hal itu. Mereka masih berpikir bahwa benar manusia harus beragama, bahwa segala macam ulama itu tidak bisa ditelanjingin ucapannya. Kalau mereka bilang bahwa partai Islam mereka berwawasan kebangsaan, maka kita harus bilang amin. Padahal itu absurd.

Setahu saya tidak ada partai Islam yg berwawasan kebangsaan. Semua partai Islam berwawasan sempit, ingin menjadikan anda sebagai boneka yg bisa disetir para ulama yg, maybe, akan kawin sampai empat kali dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya agar bisa diterima di sisi Allah SWT, complete with 72 bidadaris.

Saya tidak bilang semua Islam adalah jelek. Ada juga komunitas Islam Liberal yg sama manusiawinya dengan masyarakat NON agama di negara-negara Barat. Tetapi secara umum, Islam sampai saat ini selalu diasosiasikan dengan keterbelakangan dalam cara berpikir, dengan konsep Allah yg menginjak-injak HAM, dengan pemaksaan kehendak, dengan pelecehan wanita.

Wanita-wanita dari partai Islam tertentu itu maju sebagai caleg dengan mukenah which is very much terbelakang. Primitif sekali. Mereka pikir kita orang bodoh sehingga mau memilih mereka. Berpakaian saja tidak becus, apalagi menjadi anggota legislattif!

Dan itu ada lagi partai yg warnanya ijo banget sampe melihatnya jadi silau. Silaulah, hijauuuu sekaleh. Dan, in my opinion, itu norak.

Nama saya Rimba, dan konotasinya itu warna hijau. Tapi at least saya tidak senorak itu, menggambar wajah dan tangan saya sehi-jau-hijaunya dengan niat agar dipilih oleh rakyat yg bisa terkena pesona magis warna hijau. Kalau hijau dipilih akhirnya bisa masuk sorga, begitu kali yah jalan pikirannya?

Kita memang masih negara berkembang, tetapi kita tidak bodoh-bodoh amat. Banyak dari kita sudah bisa berpikir, membandingkan, dan mengambil kesimpulan sendiri-sendiri.

Banyak dari ajaran agama itu isinya pembodohan massal. Wanita-wanita itu sudah tahu dan merasakan sendiri betapa pria menginjak-injak HAM wanita atas nama agama Islam, dan mereka juga banyak yg tidak peduli lagi dengan sorga yg dijanjikan oleh Islam. Kalau sorganya isinya itu bidadari doang, ngapain gue pilih partai Islam, katanya.

Mending pilih partai nasionalis yg menjanjikan sorga berisikan bidadara juga dan tidak menempatkan wanita sebagai warga kelas dua, begitu katanya.

Tapi partai nasionalis juga tidak semuanya ok.

Golkar itu ikut mendukung UU Pornografi yg melecehkan HAM warganegara. Partai Demokrat ikut mendukung. Cuma PDI Perjuangan yg menolak UU Pornografi. So, walaupun PDI Perjuangan suka gimana gituh, dalam hal HAM masih lebih ok.

Sekarang ada Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto yg berpendidikan di Inggris dan mengerti tentang perspektif HAM Liberal. Dulu Mas Bowo bilang bahwa Indonesia belum siap untuk masuk ke era Liberalisme di mana hak-hak rakyat itu dihormati, di mana setiap individu memiliki HAM yg tidak bisa diinjak-injak baik oleh negara maupun agama.

Itu dulu di era Suharto.

Saya tidak tahu apakah Prabowo Subianto sekarang sudah bisa bilang bahwa Indonesia sudah SIAP untuk masuk ke era Liberalisme di mana negara cuma mengurus urusan negara, dan individu mengurus urusan individu. Di mana agama-agama tidak menjadi primadona yg dielus-elus sebagai memedi yg bisa dipakai untuk menakut-nakuti rakyat.

Kalau sudah siap, ya bicara sajalah.

Bicara saja bahwa Indonesia ini negara sekuler, ada pemisahan tegas antara negara dan agama, bahwa kolom agama dalam KTP itu harus dihapuskan secara tegas, bahwa pernikahan bisa dilakukan oleh sesama warganegara tanpa harus dipaksakan beragama sama, bahwa pernikahan yg diakui negara adalah yg bersifat sekuler, bahwa bahkan warganegara yg beragama Islam berhak untuk tidak mengikuti hukum Islam dalam pernikahan dengan alasan hukum pernikahan Islam itu sangat melecehkan derajat wanita.

Lalu SBY itu visinya apaan?

In my opinion, SBY itu tidak memiliki visi kebangsaan. Mana suara SBY dalam UU Pornografi? Diam saja. Silent is golden atau silent is stupid? Menurut saya, silent dari SBY itu silent yg stupid. Dan saya bahkan akan tanpa ragu-ragu bilang bahwa kita memiliki presiden goblok.

Di masa Suharto, orang yg mengucapkan atau menulis presiden goblok pernah masuk bui. Saya masih kecil sekali waktu itu, tapi saya ingat ada orang yg bilang presiden goblok, dan orangnya akhirnya dijebloskan ke penjara. Kita saat ini bisa bebas bilang bahwa presiden goblok, dan kita akan biasa-biasa saja. The president juga akan biasa-biasa saja, wong itu cuma pendapat saja kok, opini saja, namanya HAM Kebebasan Berbicara.

Saya bahkan bisa bebas berbicara bahwa partai-partai politik itu goblok.

Mereka arak-arakan di jalan raya dengan tujuan menarik simpati massa. Tetapi bukannya simpati yg tertarik malahan antipati. Mereka buat jalanan yg sudah macet menjadi makin macet saja, apalagi dengan iring-iringan motor yg dikendarai secara tidak disiplin. Dengan teriakan-teriakan menjagokan partainya sendiri yg kita tahu semuanya omong kosong belaka.

Partai-partai itu goblok, mereka tidak tahu Indonesia sudah memiliki kelompok kelas menengah yg cukup besar. Banyak dari kita berpendidikan sarjana, dan kita tidak bisa lagi dibodohi dan takjub dengan segala macam iklan dari partai yg kita tahu isinya omong kosong.

Dan kita sudah eneg setengah mati melihat arak-arakan di jalan raya itu. Dan kita tidak mau ikut hadir di kampanye parpol. Banyak yg hadir itu mereka yg dibayar, dikasih kaos dan dibeliin nasi bungkus. We are not interested in such.

We are interested in dihapuskannya kolom agama di KTP.

We are interested in clean government.

We are interested in perlindungan HAM.

We are interested in kesetaraan hak-hak wanita, kebebasan beragama dan berpendapat.

So, selamat memilih salah satu dari partai-partai goblok itu atau tidak memilih sama sekali alias golput yg tidak haram, walaupun MUI, seperti biasa, akan membodohi anda dengan bilang bahwa golput itu haram dan kalau golput akan masuk neraka.

## Kasino Besar Bernama Indonesia: Budaya Pop dan Fenomena Fans Club Pemilu 2009

Bukan Black Campagin, Kamis, 2 Apr '09 09:13

Sejenak kita tanggalkan rasa khawatir dan gelisah setiap kali membayangkan wajah para legislator hasil pemilu legislatif 9 April 2009. Tentang gambaran kompetensi mereka yang tidak jelas, yang semakin kabur setelah memerhatikan pesan-pesan politik mereka yang bertabur di spanduk-spanduk dan billboard di jalanan. Kebanyakan mereka mirip para pedagang dadakan, yang mencari untung cepat dalam sebuah bazaar, pasar dadakan, pasar malam, atau pasar kaget yang bernama pemilu. Hanya, yang mereka tawarkan bukanlah sesuatu yang terukur nilai guna dan manfaatnya bagi si pembeli—yang dalam bazaar pemilu disebut sebagai pemilih—melainkan janji-janji yang seluruhnya bisa disimpulkan dalam satu kata: ketidakpastian.

Karena dominasi ketidakpastian akan kompetensi calon legislator itu demikian tinggi, maka pemilu April 2009 ini kemudian lebih menyerupai pertarungan di sebuah kasino besar yang bernama Indonesia, bukan lagi sebuah bazaar. Para penjaja dan pembeli (baca: pemilih) sama-sama bertaruh. Penjaja memertaruhkan modal kampanye, sementara pemilih memertaruhkan setiap satu suara yang akan berakumulasi menjadi kuasa memerintah. Tiada yang pasti apakah kuasa itu akan membawa keadilan atau tends to corrupt sekaligus menindas seperti biasa, secara tersembunyi maupun terang-terangan.

Ibarat pasar taruhan, ada banyak prediksi. Di kasino pemilu 2009, prediksi itu adalah publikasi hasil survei empat lembaga survei (CSIS, LP3ES, LIPI, dan Puskapol UI) yang dirilis Maret lalu. Partai Demokrat mendapatkan 21,5 persen pemasangan taruhan, PDIP 15,21 persen, Partai Golkar 14,27 persen. Diikuti PPP dengan 4,15 persen, PKS 4,07 persen, PKB 3,25 persen, PAN 2,91 persen, dan Gerindra 2,62 persen.

Para petaruh perlu berpikir keras, karena sesungguhnya Indonesialah yang dipertaruhkan pada setiap satu suara yang dipasang. Fakta bahwa Partai Demokrat mendapatkan demikian banyak pemasangan tidaklah terlalu mengejutkan. Angka itu adalah cermin dominannya budaya pop masyarakat Indonesia. Proses idolisasi SBY lewat komunikasi politik Partai Demokrat selama ini bukan saja sudah berhasil mengangkat angka keterpilihan Partai Demokrat, melainkan juga penegasan diri bahwa partai ini lebih menyerupai sebuah fans club daripada partai politik.

Hanya di fans club semua orang bisa menyukai satu hal yang sama. Hubungan antara penggemar dan sang idola sangat emosional, bukan rasional, apalagi kontraktual, sebagaimana disyaratkan dalam sebuah organisasi politik. Tidak ada pertarungan gagasan, kepentingan, dan faksionalisme sebagaimana layaknya sebuah partai. Hanya di Partai Demokrat kita bisa menemukan orang-orang

menggandrungi hal yang sama, membicarakan topik yang sama, berbagi rasa yang sama.

Orang teragum-kagum ketika SBY naik motor pengawalnya, meski itu bukan tugas negara. Tambah terkagum lagi ketika diceritakan soal penanganan sebuah penculikan. Tidak jelas lagi mana misi kenegaraan yang mendesak dan mana tindakan yang manusiawi, di mana setiap orang pasti tergerak melakukannya. Di mata para penggemar BBM itu turun karena SBY, padahal harga BBM turun karena memang harga minyak dunia turun. Hanya di mata penggemar uang negara yang diberikan lewat BLT itu adalah uang pribadinya SBY.

Pertanyaannya, apakah siap Indonesia dipertaruhkan di tangan para penggemar dan sang idola?

Bagi mereka yang sudah siap memasang taruhan di fans club ini, hanya satu hal yang perlu diingat: fans club sebagai fenomena budaya pop cenderung lebih merebut ruang, bukan waktu. Ia sangat cepat mengumpulkan banyak penggemar, secepat itu pula para penggemar itu akan pergi. Contoh paling mudah adalah karya-karya seni pop yang sulit bertahan menghadapi ujian waktu. Lain halnya dengan karya-karya seni tinggi yang sanggup menembus ruang. Para petaruh semestinya melihat, mana partai yang sanggup bertahan menghadapi pasang surut sejarah bangsa ini, dan mana yang besar secara karbitan atau dibesarkan oleh iklan dan lembaga survei.

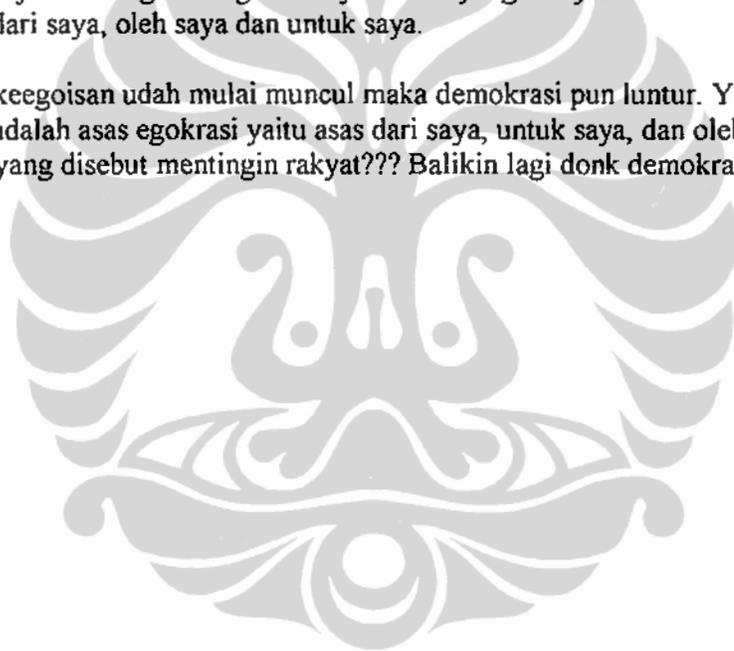
## Demokrasi atau Egokrasi??

She, Kamis, 23 April 2009

Masih segar di ingatan kita tentang pesta demokrasi yang baru saja kita lewati. Mungkin bagi sebagian orang pemilu adalah sebuah ajang untuk berpesta demokrasi, namun sangat disayangkan banyak orang yang gak ikut serta dalam pesta tersebut.

Bagi gw pribadi, kadang2 gw geregetan ma kondisi Indonesia sekarang. Mungkin gw mang masih anak SMA yang belum punya KTP n gak ngerti apa2. Tapi yang gw sangat sayangkan adalah banyak orang gak ngerti kalo Indonesia tuh milik kita bersama. Sometimes demokrasi yang adalah dari kita, untuk kita dan oleh kita itu akhirnya jadi omong kosong. Hari2 justru ini yang menjadi arti dari demokrasi adalah dari saya, oleh saya dan untuk saya.

Ketika keegoisan udah mulai muncul maka demokrasi pun luntur. Yang justru timbul adalah asas egokrasi yaitu asas dari saya, untuk saya, dan oleh saya! Trus apa ini yang disebut mentingin rakyat??? Balikin lagi donk demokrasinya!!



## Demokrasi Yang Kian Menghasilkan Buah

JED-ReVoLuTiA, Jumat, 24 Apr '09 18:52

Tidak terasa perjalanan bangsa kita sudah melewati lebih dari satu dasawarsa pasca Reformasi 1998. Telah banyak hal yang dihasilkan oleh Reformasi tersebut diantaranya keterbukaan informasi dan demokratisasi rakyat di bangsa ini. Pelan-pelan bangsa Indonesia belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan tidak lagi berada di bawah stigma bahwa perubahan itu harus dikendalikan oleh arus atas karena arus bawah ternyata punya peranan yang besar untuk mengendalikan arus atas.

Sekarang bukan lagi waktunya kita khawatir akan pemilu yang rusuh karena iklim demokrasi sudah mulai memasyarakat. Sebagai akibatnya stabilitas negara pun terjaga dan ekonomi bisa pelan-pelan tumbuh. Meskipun pada pokoknya, tetap pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berperan besar dalam menentukan arah bangsa ini ke depan, namun rakyat bangsa kita sudah mulai bisa menilai para politisi berdasarkan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Aura primordialisme dimana kita memberikan dukungan buta para politisi dari suku, agama, ras dan golongan tertentu pun mulai ditinggalkan. Kultur bangsa kita sudah sedemikian maju meninggalkan Malaysia yang masih mirip seperti Orde Baru, Thailand yang memiliki konflik antar golongan, dan Singapura yang monoton.

Kita bisa melihat dalam pemilu kemaren dimana MK membuat keputusan yang benar dengan meloloskan caleg dengan suara terbanyak yang terpilih. Meski pada prakteknya masih terdapat banyak kecacatan, namun secara garis besar pelajaran yang bisa diambil ialah suara rakyat tidak bisa dibeli dengan uang. Dana kampanye yang jor-joran tidak menjamin elektabilitas dan tidak selamanya partai besar akan tetap besar. Komposisi anggota dewan kita 2009-2014 akan diisi oleh banyak muka-muka baru yang bisa dipastikan akan merubah arah perpolitikan kita ke depan untuk semakin policy concious. Pada ujungnya, para pejabat akan menyadari bukan uang atau koneksi mereka yang membuat mereka menjadi wakil rakyat, namun keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat yang akan menentukan karir politik mereka. Tentu saja DPR ke depan masih jauh dari sempurna, namun arah perbaikan mulai terlihat.

Jika ke depan bangsa ini akan konsisten mendukung pemimpin yang anti-korupsi sehingga ke depannya kita akan melihat perbaikan di segala bidang. Bangsa ini sudah mulai masuk ke dalam G-20 dan diperhitungkan di percaturan dunia sebagai negara dengan ekonomi kuat. Kepemimpinan yang kuat oleh Dr. Sri Mulyani di Departemen Keuangan dengan merombak tempat basah itu menjadi tempat bermartabat telah meraih kepercayaan banyak pelaku saham, bisnis, dan perbankan. Terbukti dengan menjadikan Indonesia negara dengan fiskal konservatif, maka kita bisa bertahan dari ancaman badai ekonomi global yang dipicu dari defisit berlebihan oleh banyak negara.

Yang harus dikejar ke depan ialah kebijakan-kebijakan yang berpihak ke rakyat, seperti penghapusan subsidi komoditas entah itu BBM atau yang lainnya termasuk sembako karena itu sama saja dengan membakar uang. Sangat amat menguras biaya namun hasilnya nihil ditelan oleh waktu. Yang harus dilakukan ialah subsidi orang karena dengan demikian bangsa ini akan keluar dari krisis pengangguran dan kemiskinan. Dengan mensubsidi orang, yakni pendidikan dan kesehatan, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis akan meningkatkan derajat manusia dan bernilai jauh lebih penting dari BBM murah atau sembako murah.

Mari kita berharap pemilu presiden 2009 akan bisa menghasilkan perubahan signifikan dan berharap bangsa ini bisa bijak memilih pemimpin yang pro-rakyat dan bukan pro-jabatan.



## Demokrasi Vs Demonstrasi

Mr.RHR, Selasa, 28 Apr '09 21:38

Entah kenapa tiba-tiba saya terfikirkan untuk menulis seperti ini. Sebagai manusia yang berpangkat 'rakyat biasa' mungkin saya jadi ingin berbicara seperti ini.

Seperti yang kita lihat di sekitar jalan saat menjelang Pemilu Calon Legislatif banyak sekali CALEG-CALEG yang mempromosikan dirinya dengan kata kata "Siap berjuang untuk rakyat!", "Dukung yang Pro-Rakyat!" dan kata kata lain yang mengandung membela rakyat.

Begitu juga dengan 'Demokrasi'. Banyak partai yang menggungkan kata tersebut untuk mengesankan bahwa partai partai tersebut akan menegakan demokrasi. Tapi jujur saja, saya selama ini tidak tahu apa artinya demokrasi. Kalau kata guru saya di sekolah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Demos artinya Rakyat Cratein artinya Pemerintah, maksudnya adalah pemerintahan yang berpihak pada rakyat atau yang terkenal sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi pada rakyat.

Kalau tadi saya sudah menjabarkan tentang demokrasi, sekarang saya ingin menghubungkan-nya dengan demonstrasi. Apa sih arti dari demonstrasi sendiri? Menurut kamus sih artinya melakukan gerakan protes dengan cara turun ke jalan. Tapi darimana sumber kata tersebut berasal? Kalau menurut penalaran saya demonstrasi itu bukan berasal dari kata "demo" tapi lebih tepat kalau ditambah dengan "n" menjadi "demon" yaitu setan. jadi dapat diartikan sebagai demonstrasi sebagai gerakan protes turun ke jalan dan berperilaku seperti setan. Eits! tapi masih banyak kok yang ber-demonstrasi secara damai, tapi bukan berarti setan-nya tobat terus jadi damai ya! bukan itu. hehehe

Kita (khususnya yang tinggal di Jakarta) pasti sering sekali ketemu nih sama yang namanya demonstrasi, apalagi buat yang tinggal di pusat Jakarta. Ngomong ngomong mereka itu yang berdemonstrasi itu buat apa sih? Ingin tuntutan-nya dipenuhi? atau ingin ngeceng? ya tidak lah! masa demonstrasi buat ngeceng? sebetulnya ada 3 hal menurut saya yang menjadikan rakyat banyak berdemonstrasi. Yang pertama Pemerintah belum menemukan cara yang efektif untuk menampung aspirasi rakyat. Yang kedua, sebetulnya udah ada cuma pemerintahnya aja yang ogah, giliran beritanya udah booming di koran baru deh bertindak. Yang ke 3 sebetulnya pemerintah mau menjalankan aspirasi tersebut tetapi ada kepentingan suatu golongan atau pribadi yang menghalangi.

Coba lihat apa yang sekarang terjadi di negeri ini. Setiap kita rakyat mempunyai tuntutan, ribuan mahasiswa atau rakyat harus turun ke jalan dulu untuk melakukan demonstrasi. Coba kita cari jalan selain demonstrasi, paling hanya dianggap opini publik saja. Seperti kita ambil contoh sebelum kenaikan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Rakyat yang tidak mengerti politik akan berasumsi bahwa Pemerintah telah bekerja bagus! benar benar pro rakyat! tapi ketika saya berbicara dengan mahasiswa yang aktif dalam berpolitik berkata lain "Pemerintah

itu payah! mungkin jika kita tidak demo pemerintah tidak akan menetapkan hal itu!" (nama di sensor). Ini sangat berbeda dengan anggapan kita yang merasa pemerintah bekerja dengan baik. Padahal di dalam Pemerintahan ada banyak anggota legislatif yang katanya "Siap berjuang untuk rakyat!" lebih baik diganti saja menjadi "Siap dituntut oleh rakyat". Sungguh memalukan jika kita mengingat pilar demokrasi di negara ini yang sudah komplit dan sesuai dengan trias politica jika hanya dijadikan hiasan saja.

Intinya sih sepele. Saya ingin menanyakan apakah jika kita ingin berdemokrasi kita harus ber demonstrasi? biasanya demo yang berhasil adalah demo yang menggunakan kekerasan seperti demo yang memakan korban ketua DPRD di SUMUT. namun demo yang terkesan lembek selalu di acuhkan. Seperti demo tentang RUU BHP yang bikin calon mahasiswa seperti saya ini sudah sulit semakin sulit lagi untuk kuliah karena biayanya mahal. padahal rakyat tidak ada tuh yang minta disah-kan UU tersebut. Ingat loh kata orang Yunani "vox populi vox dei" artinya suara rakyat suara tuhan. berarti yang minta disah-kan UU tersebut tuhan apa pemerintah? Demokrasi Indonesia benar benar terancam punah sepertinya



## Pemilu Indonesia Terbaik Sepanjang Sejarah

enda , 10 Mei 2009

KPU telah mengumumkan hasil resmi Pemilu Legislatif tadi malam beberapa saat sebelum deadline dengan hasil pemilu seperti demikian

1. Demokrat	26.43 %
2. Golkar	19.2 %
3. PDIP	16.61 %
4. PKS	10.54 %
5. PAN	7.50 %
6. PPP	6.96 %
7. PKB	4.64 %
8. Gerindra	5.36 %
9. Hanura	2.68 %

Keluar dari masalah-masalah teknis selama penyelenggaraan dan penghitungan, tapi fokus pada substansi hasil pemilu kali ini bisakah kita sebut bahwa pemilu kali ini adalah **pemilu TERBAIK sepanjang sejarah?**

Begitu yang dinyatakan oleh **Wimar Witoelar** dalam postingnya "[History has been made in Indonesia's political journey](#)"

Bang Wimar menyatakan hal diatas karena sebab-sebab di bawah ini diantaranya:

- **Sipil telah menang melawan militer-ist.** Kombinasi Gerindra & Hanura total meraih 8.04%, berarti suara sipil menikmati mayoritas 91.84%
- **Partai sekular memenangkan pemilu** dengan mayoritas besar dengan tinggal PKS yang membawa politik sektarian. PAN, PKB dan PPP partai dengan konten religius yang besar telah berkomitmen mendukung SBY capres yang non-sektarian
- Proses nominasi dan koalisi untuk menampilkan capres dilakukan secara terbuka, yang walaupun sebagian meanggap proses tersebut membosankan tapi sebenarnya proses tersebut adalah **antitesis dari politik otoritarian gaya Soeharto**
- Pemenang kursi di parlemen yang mengalami perubahan besar menunjukkan keinginan rakyat Indonesia akan **PERUBAHAN**.

Sejarah tengah berjalan, dan walau lambat dan tertatih-tatih tapi harapan itu muncul karena hasil dan indikasi positif yang kita temui setiap hari.

Jadi, ya! Masih ada cahaya terang di ujung terowongan ini!

## Lampiran I

Hasil wawancara dengan Bapak Wilson Lalengke (Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia). Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 12 April 2009.

T: Asal kemunculan CITIZEN JOURNALISM di Indonesia?

S: Saya kira secara pastinya saya juga tidak tahu persis, karena kemunculannya itu kan langsung kepada praktek yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan selama ini, rupanya itu yang disebut dengan CITIZEN JOURNALISM. Nah kapan itu mulainya, sepengetahuan saya, ketika masyarakat sudah diberi akses untuk mengemban informasi. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, pertama secara real yang massif itu pada saat beberapa orang terutama orang Indonesia yang berada di luar negeri mencoba membuat media-media, terutama media online yang bisa digunakan oleh oleh semua orang, itu kemunculannya sekitar tahun 2004-2005, munculnya Panyingkul, itu promotornya dari Sulawesi Selatan yang berada di Jepang. Menyusul ada Kabar Indonesia dan beberapa tahun terakhir ada Wikimu, dan sekarang ada Wikipedia Indonesia, itu adalah konsepnya CITIZEN JOURNALISM. Ketika semua orang boleh membagi beritanya, siapa saja. Tapi hal kedua yang ingin saya katakan bahwa di Indonesia sebenarnya sistem ini juga yang mempengaruhi era reformasi, karena seingat saya tahun 95/96 ketika internet sudah mulai masuk ke ranah publik, orang kan berbagai cerita, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan. Nah itu menjadi milik publik, sehingga masyarakat akhirnya terdorong untuk melakukan gerakan-gerakan publik seperti demo2, bahkan sampai pembakaran yang menurut kita sebenarnya itu tidak harus sampai segitu. Tapi paling tidak bahwa masyarakat akhirnya terbuka wawasan dan pikirannya terhadap bahwa dia itu sebenarnya selama ini, katakan mungkin "dikadalin" oleh pemerintah (orde sebelumnya) dengan sistem yang ada pada saat itu. Selama puluhan tahun, tahun '66-67 itu kan tidak ada akses masyarakat ke media, bahkan beberapa media yang coba kritis dibredel dsb, dengan adanya kementerian atau departemen penerangan waktu itu. Saya ingat betul, tahun 95-96, walaupun saya belum bisa mengakses internet, tapi copyan2 dalam bentuk berita2 internet itu banyak, sehingga harta kekayaan Soeharto, kekayaan Tommy, dsb. Memang fokusnya adalah persoalan kekuasaan di lingkungan Soeharto dan sekitarnya, tapi itu kan tidak dilakukan oleh wartawan profesional, tapi oleh warga masyarakat yang ingin membangkitkan gelora publik agar melakukan sesuatu secara massif. Jadi saya pikir ya tinggal dilihat dari sisi mana. Kalau buat saya CITIZEN JOURNALISM di Indonesia itu mulainya dari tahun 95/96 dan itu memberikan dampak yang besar, bahkan merubah tatanan kebangsaan dan kenegaraan kita.

T: Dulu muncul gerakan bawah tanah oleh mahasiswa, bisa kita bilang bahwa CITIZEN JOURNALISM salah satu bentuk gerakan sosial?

S: Iya, bisa dikatakan demikian. Kata kuncinya disini kan ketika seseorang membagi informasi tanpa keinginan untuk mendapatkan materi, mendapatkan kepentingan2 politik pribadi, dsb. Itu yang menjadi kata kunci dalam CITIZEN JOURNALISM.

T: Esensinya adalah...

S: Nah itu juga, ketika kita bicara di tataran internasional, Ohmynews itu bisa dikatakan sbg inspirator dari perkembangan CITIZEN JOURNALISM secara lebih luas kepada masyarakat, di belahan dunia yang lain termasuk Ind. Karena pada waktu tahun 2002, OMN bisa mempengaruhi pemilihan presiden, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya dunia internasional tau masyarakat di dunia2 lain berpikir berarti media

memang salah satu yang menentukan. Untuk melakukan perubahan kita perlu punya akses kesana, untuk melakukan hal-hal yang bersifat jurnalisme, untuk semua orang.

T: Kira2, faktor apa saja yang melahirkan konsep Citizen Journalism?

S: Kalau saya melihat bahwa ini lebih kepada pemberontakan bofeh, claim boleh. Yang saya ingin katakan bahwa, ketika kita menyerahkan pekerjaan media itu kepada sang profesional, dalam hal ini wartawan, maka ada 4 hal yang terjadi di situ: Pertama, Profesi itu kan menuntut keahlian, jadi orang harus tamat dari sarjana komunikasi atau jurnalistik, nah, kenapa harus begitu. Padahal berita itu adalah milik masyarakat, terjadi di masyarakat, semua orang bisa melihat, semua orang bisa bercerita tentang itu, kenapa harus diberikan ... kepada mereka. Harus mengambil mata kuliah ini, itu, dsb. Yang kedua adalah, ketika profesi itu menuntut sebuah koridor, artinya sudah ada aturan2 main, bahwa kalau menulis itu harus bla bla bla, itu kan berarti kita sudah desain sedemikian rupa. Ketika kita bicara desain, siapa pendesainnya? Kalau politikus yang mendesain, tentu dia akan kuat sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuannya tersampaikan. Kalau dia seorang ekonom maka ia akan arahkan...jadi patron itu yang kita claim, jangan ada patron-patron seperti itu, jadi orang mau menyampaikan informasi dengan caranya sendiri, biarkan saja, yang penting adalah informasi yang disampaikan itu adalah benar, bisa dipahami oleh orang lain, ada solusi2. Ketiga, ketika kita bicara profesi, maka profesi itu kan uang, kita melakukan sesuatu apa imbalannya buat saya, itu pengertian2 profesi secara kasat mata disitu. Tidak masalah ketika, imbalan yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Persoalannya ketika, imbalan itu tidak pernah cukup, kepuasan manusia tidak pernah terbatas, jadi disitu yang menjadi claim kita. Dan kita harus melakukan gerakan ...jangan sampai media itu didominasi oleh kalangan2 wartawan. Ok, memang masyarakat juga punya kelemahan tentu saja, karena menyampaikan informasi yang informatif itu bukan suatu hal yang mudah, tapi itu kan bukan sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari. Kita bisa belajar. Itulah kira2 alasan mengapa kita harus melakukan gerakan CITIZEN JOURNALISM.

T: Elemen apa saja yang membedakan pewarta warga dengan wartawan profesional?

S: Selain keahlian, dari sisi motivasi juga berbeda. Kalau wartawan lebih kepada motivasi profesi, tuntutan profesi, sementara masyarakat luas justru dimotivasi oleh keinginan untuk berbagi. Dan saya kira, hal2 lain berkenaan dengan ruang lingkup yang diberitakan oleh wartawan dan masyarakat. Ketika masyarakat. Wilayah A menceritakan tentang wil A, ruang lingkungannya adalah sekitar A, tapi seorang wartawan bisa bicara lebih luas, perbedaan yang lain adalah mungkin dari sisi objektivitas, karena wartawan mungkin sudah dibentuk untuk memilah-milah pemberitaan. Berita yang layak dan tidak layak, sementara masyarakat tidak tahu apakah sebuah berita layak atau tidak. Yang jelas, saya ingin berbagi sehingga lebih kepada subjektivitas saya ingin berbagi. Nah adapun obyek yang diberitakannya itu betul2 sebuah kejadian, saya kira justru disini masyarakat lebih unggul, karena apa yang dia lihat itulah yang diberitakan. Apa yang terjadi disekitarnya, itulah bahan cerita dia. Bandingkan dengan wartawan, bagaimana wartawan yang tinggal di Jakarta bercerita tentang kejadian di Papua, kan akan lebih obyektif kalau orang Papua sendiri yang menceritakan, dia lihat siapa yang kena tembak, dimana kena tembaknya. Dibandingkan kalau seorang wartawan senior di Jakarta dia dengar informasi dari kontributornya disana akhirnya panjang lebar... (menit ke 18)!! dan disitu kan bumbunya lebih banyak. Perbedaan yang lain, ketika kita bicara kecepatan akses, yang dari masyarakat, lebih cepat, lebih komprehensif, lebih luas karena...jumlah pemberi informasi juga menentukan, ketika seorang wartawan dibandingkan dengan sepuluh

wartawan masyarakat, tentu akan lebih banyak informasi dari sepuluh orang daripada satu orang.

T: Perkembangan trend jurnalisme warga bagaimana?

S: Saya melihatnya bahwa CITIZEN JOURNALISM ini menjadi sebuah katakan booming itu ditunjang oleh internet, keberadaan teknologi komunikasi yang maju. Mengapa itu bisa terjadi, karena ini masalah efisiensi dan efektivitas terhadap pemberitaan. Efisien dalam pengertian kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk memberitakan sesuatu, kita cukup mengeluarkan pulsa 100 rupiah saja sudah bisa menyebarkan informasi ke banyak orang. Smsan misalnya. Kalau dulu kan kita harus ngirim ke media, itupun belum tentu dimuat. Jadi efisiensi yang disediakan oleh internet memang sangat mendukung, sehingga perkembangannya bisa dikatakan beratus-ratus kali lipat dibandingkan tahun2 sebelumnya.

T: PPWI didirikan tahun 2007 atas dasar kebutuhan masyarakat

S: kalau kita bicara PPWI, sekitar 300an ...kita di Kabar Indonesia (menit ke 22)!! HOKI, waktu itu saya sebagai pimred ketika saya kembali dari belanda, saya sendiri waktu pertama kali masuk ke HOKI tidak kenal dengan manajemennya, kemudian mereka melihat bahwa potensi untuk membagi berita yang penting untuk masyarakat, sehingga manajemennya tertarik untuk mengundang saya kerumah. Kita buat komitmen bareng2lah untuk memajukan CITIZEN JOURNALISM melalui HOKI sampai saya kembali ke tanah air sebagai pimpinan redaksi untuk HOKI itu, ketika ada desakan dari teman2 terutama untuk menerbitkan kartu, sementara di CITIZEN JOURNALISM baik ditingkat internasional itu tidak mengenal kartu identitas, karena setiap orang memang dianggap sbg Citizen Reporter, sehingga tidak perlu kartu2an, ...(23) aja udah cukup. Tapi buat temen2 kita di tanah air, mereka perlu identitas bahwa saya ini sbg CR, maka kita established lah sbg sebuah organisasi. Jadi ada sebuah organisasi yang mewadahi mereka. Dan kita beranggapan bhw semua masyarakat, adalah C.Reporter, ...anggota dalam "anggota PPWI". Yang menyatakan secara langsung dengan mengisi formulir sudah ribuan orang, ada beberapa kendala untuk penerbitan kartu memang ...(24) karena inikan menyangkut cost, jadi baru ada sekitar 500an orang yang sudah memiliki kartu yang tersebar di seluruh Indonesia. → hanya formalitas.

Jadi memang kita fungsikan ketika orang bertanya siapa anda, saya Wilson. Darimana? PPWI, mana buktinya? kalau kita tidak ada kartu kan kita kesulitan menunjukkan. Tapi kartu itu tidak bermakna apa2 sebenarnya, artinya kartu itu tidak bisa untuk memeras orang, ..oh saya harus masuk ke dalam ruangan karena saya anggota PPWI, bukan itu, tapi hanya sebagai penanda bahwa Anda adalah anggota ini. Terserah bagi lawan bicara kita, mau diakomodasi atau tidak, itu harapan kita adalah dimudahkan tho? Karena hal2 yang dilakukan adalah hal2 baik, bukan hal2 yang buruk.

Itu adalah identitas anggota organisasi, medianya mau dimana atau apa saja, itu terserah. Sebab ada anggota kita yang dari HOKI, ada anggota kita yang dari Wikimu, Panyingkul, ada yang dari blogger2. Bloger malah yang banyak, tapi tidak masalah, mereka punya media, medianya itu dibaca oleh banyak orang.

T: Naluri Kesadaran berita, apakah informasi yang disampaikan bisa disetarakan?

S: jelas tidak bisa disamakan, pertama dari sisi keahlian membuat artikel kan sudah beda. Orang yang memang dilatih/ditrain untuk itu dengan orang yang hanya mengikuti naluri untuk berbagi cerita. Jadi dari sisi kualitas tulisan artinya bisa dipahami atau tidak, alur cerita, alur artikel dan itu memang berbeda, dan kita akan angkat tangan/angkat topi pada wartawan dibandingkan dengan (39)....tapi disisi substansi, persoalan yang

diangkat saya kira itu akan sama, bahkan pewarta warga jauh lebih baik, karena itu tadi alasan2 yang sudah disebutkan. Menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar...(39). Tidak ada tendensi, motivasi dan lain2, hanya keinginan untuk berbagi terutama keinginan. Misalnya kita telfon ke elshinta, bahwa sini macet (40). Kan itu ada niat baik dibandingkan dengan wartawan yang penting, ah saya sampaikan, ini berita bagus. Bahwa ini ada orang digigit anjing, ok, anjingnya entah ...siapa2 kan dia ngga peduli. Jadi di satu sisi, tulisan wartawan profesional lebih bagus, tapi di sisi lain tulisan pewarta warga atau masyarakat itu lebih dibutuhkanlah. Sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kita masing-masing.

T: Kontrolnya bagaimana? Pemberitaan benar atau tidak

S: karena ini dari masyarakat, maka kita beranggapan bahwa masyarakat adalah kontrol itu sendiri. kontrol sosial disini yang paling dominan, tapi kita sebagai sebuah organisasi tentu punya sikap, punya pandangan yang kita berikan kepada masyarakat bahwa untuk mewartakan sebuah informasi kepada masyarakat tentu ada etika2, bla3, itu kan kamu bisa lihat sendiri dari 10 dasar titah pewarta warga, bahwa itu kurang lebih sama dengan wartawan. Itu kan sifat2, nilai2 universal bahwa beritanya harus benar, harus faktual, jangan ngarang, jangan bohong, itu kan sifat2 universal. Nah, tapi kita tidak memaksa pewarta warga untuk melakukan hal seperti itu, kita hanya mengarahkan, kalau anda langgar, kita juga tidak punya hak untuk memberikan sanksi. Jadi sanksi itu lebih diserahkan kepada mekanisme, kalau itu berkenaan dengan hal2 yang bersifat kriminal misalnya pencemaran nama baik, ya kan bisa klaim, laporkan ke polisi. Polisi lah yang memproses, bukan kita. Terus kalau itu hanya menyangkut persoalan2 nilai susila dan sebagainya, sanksi masyarakat malah lebih berat...(42). Kontrol sosial dari masyarakat, kita sebagai organisasi coba memberikan panduan2. Kalau dalam hal, oh saya ngga bisa menulis, kemampuan saya menuliskan berita itu masih kurang bagus, kita arahkan dia untuk mengikuti pelatihan2. Bagaimana menjadi jurnalisme warga, dan dalam pelatihan itu kita masukkan etika jurnalisme warga. Jadi orang kita beri panduan, menulis seperti ini, sebaiknya seperti itu.

O ya saya tambahkan, apabila ada hal2 yang menyangkut pembelaan hukum, kita juga memback-up anggota2, bukan hanya PPWI tapi juga masyarakat. Misalnya ada kasus yang belum sempat kita tangani, (44) seorang anak yang coba menulis dinding sekolahnya itu, pesantren di Jawa Timur, dia sebenarnya karikatur tapi karikaturnya itu menyentil pengurus yayasan di sekolah itu, nah itu kan sebenarnya sebuah aktifitas jurnalisme, akhirnya dia ditangkap polisi. Kita sebenarnya punya kewajiban untuk mengadvokasi bahwa ini adalah salah satu bentuk jurnalisme warga yang walaupun memang mungkin masih di luar koridor. Tapi yang buat itu kan anak2, kalau orang dewasa tentu sudah tau mana yang benar.

Ini memang untuk seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Iya, kita memang tidak batasi hanya untuk anggota PPWI, siapa saja yang kenal PPWI dan butuh advokasi yang ebsifat pembelaan dan sebagainya,...menurut mereka, mereka sudah lakukan dengan baik dan benar, maka kita siap untuk turun.

T: Kalau yang kita tahu pada media massa konvensional ada relasi kekuasaan...

S: Kalau di PW itu lebih fleksibel, karena setiap orang yang mendaftar di media massa dia bisa masuk dan keluar kapan saja dan dengan alasan apa saja. Kalau dia sudah tidak suka dia bisa keluar, kalau dia masih senang, dia bisa teruskan. Artinya memang tidak ada ikatan hirarkis seperti itu. Paling2 yang ada adalah bahwa kita menciptakan sebuah pemberitaan atau media...(46) jurnalisme warga atas dasar keinginan suka sama suka.

Tidak ada yang memerintah, dan tidak ada yang diperintah walaupun ada manajemen seperti redaktur dan sebagainya itu hanya sebatas penyaringan informasi yang layak dipublikasi dalam sebuah media. Yang kita sebut layak disini tidak berarti disesuaikan dengan visi misi media, kelayakan dalam hal dipahami tidak apa yang disampaikan karena yang menulis itu kan rupa2 orang, dengan rupa2 pola, alur pikir, sehingga kita coba bantu. Ini lebih banyak kepada editor, mengedit beritanya supaya enak dibaca, bisa dipahami maksudnya, nah kalau yang kesulitan kita memahami maknanya, tentu kita kembalikan kepada yang bersangkutan, "ini berita bagus tapi tolong diperbaiki supaya lebih sesuai dengan eyd, dipahami maknanya, apa sebenarnya persoalan yang ingin disampaikan". Hanya pada hal2 seperti itu, tapi bahwa kita membatasi hanya ini dan ini, itu tidak ada. Orang dia yang tahu apa kejadian disekitarnya, masak kita ngatur2.

T: Sekarang ada Kompasiana, wartawan as a citizen yang diwadahi oleh Kompas?

S: Itu suatu hal yang bagus, kita menyambutnya sebagai langkah positif dari media2, jangankan Kompas, Metro TV kan punya i-witness, yang menayangkan video2, artinya apa mereka memang responsif terhadap perkembangan. Kalau di tahun awal2 berdirinya HOKI, berkembangnya CITIZEN JOURNALISM, ini kan terjadi sebuah stigma atau friksi diantara wartawan untuk kenal dengan "wartawan", karena mereka terancam. Mereka melihat bahwa ini sebuah ancaman, artinya kalau semua orang bisa jadi wartawan, saya mau cari uang darimana. Tapi sekarang rupanya paradigma mereka berubah, khususnya dalam 3 tahun terakhir, mereka melihatnya ini sebagai suatu potensi karena mereka melihat bahwa semakin mereka membuka akses untuk masyarakat kepada situs mereka, itu akan mendatangkan income. Nah disitu kan lihaihnya mereka, semakin banyak orang yang berkunjung ke situs mereka, maka iklan pun semakin banyak. Seperti blog Detik itu, Detik dulu awal2nya kan sangat payah, tapi ketika mereka buka akses untuk masyarakat lewat blog, ya hampir semua informasi dimasukkan kesitu, akhirnya kita lihat sekarang, Incomenya itu satu bulan 5 miliar!

Itu tahun lalu, tahun 2008, itu dari iklan, karena aturannya dia kan tidak boleh menerima amplop, uang dan sebagainya. Berita terselubung juga ada, tapi itu antara lain, berita seperti parpol2, sering diberitakan komitmen, dalam satu bulan ini kita akan beritakan kegiatan2 anda, berapa costnya. Saya kira sekarnag sudah mau 7 atau 10 M satu bulan, apalagi dia sudah punya TV kan, ada TV disitu, Detik TV, itu lebih cepat lagi. Itu didukung oleh Blog2nya dari dalam, itu hampir sekarang ini hampir setengah juta orang mengakses Detik perhari. Semakin cepat penetrasi internet di Indonesia, itu media2 itulah yang akan lebih. Okezone, dll itu sudah mulai berkembang, karena mereka melihat potensi disana. Kertas semakin kecil oplahnya, malah online yang akan (52). Karena memang kertas ini butuh waktu untuk buka (52), kalau internet ntar dikantor lagi makan pun kita bisa baca, HP, sedang diperjalanan. Itu sekarang mereka lagi kembangkan untuk radio, jadi masyarakatarokat yang tidak sempat baca atau buka internet, mereka tinggal buka HP dengarkan Detik radio. Jadi kembali ke tadi, kita sambut baik sebagai suatu hal yang responsif dari media2 mainstream untuk membuka kanal bagi pewarta warga, tentu yang kita harapkan adalah bahwa trend seperti ini tidak melulu dimanfaatkan oleh media mainstream artinya kalau mereka mendapatkan income dari sana saya kira bagus untuk dipikirkan bagaimana berbagi, tidak hanya menshare berita tetapi juga income, ketika blognya memang aktif, kita kasih reward, toh yang kita terima sudah banyak. Sehingga itu akan memacu orang untuk mengembangkan blognya atau berita2nya lebih berkualitas sehingga dia akan mendapatkan manfaat, saya kira itu kepuasan sendiri, jangan dimakan sendiri.

Media mainstream lihai melihat itu, mereka belajar dari perkembangan2 karena ini tidak mungkin dihambat tapi justru disiasati menjadi potensi pasar yang besar, karena mereka sudah mulai menikmati.

T: Bisa ngga kita mengatakan CITIZEN JOURNALISM sbg Counter Culture? → thd siapa? (sist.politik/mainstream media)

S: Kita tidak hanya melihat sebagai sebuah media alternatif, tapi ini adalah klaim/counter, perlawanan dalam pengertian perlawanan secara cerdas, dan kita lebih melihat juga apa yang kita lakukan ini sebagai pembelajaran/edukasi kepada masyarakat, jangan sampai mereka hanya dijadikan obyek tapi lebih kepada subyek, kenapa kita harus menjadi sapi perah dengan kemampuan yang ada.

T: tatanan socio-cultural

S: Saya setuju sekali, sudah berubah, saya kira itu konsekuensi logis dari sebuah perubahan terhadap peradaban apalagi ditunjang dari dimensi perkembangan teknologi informasi yang memudahkan setiap orang melakukan kegiatan jurnalisme warga.

PPWI menerbitkan buletin Explore Indonesia, yang dikirim oleh pegawai negeri. Sudah disebarluaskan ke seluruh Indonesia, dan Singapura. Memang ada beberapa pengurus cabang yang sudah terbentuk, di Kendari, Palembang...didistribusikan ke hotel2, kafe2 orang asing, resort2, tempat2 isata. Sasaran kita menengah keatas. Tapi sebenarnya ide yang kita usung itu bagaimana kita menciptakan image Indonesia yang lain daripada yang diceritakan oleh media massa mainstream itu, daripada yang kita ceritakan soal cuma bakar2an, huru hara, soal politik yang ngga pernah selesai. Kenapa kita ngga ceritakan soal Indonesia yang indah2.

Ada reward ngga dari PPWI?

Sejauh ini baru dalam bentuk paling piagam2, belum materi. Seperti sistem yang dijalankan oleh HOKI itu ada top reporter dan mereka diberikan piagam penghargaan. Kemudian kalau ada even2, lomba2, menulis surat cinta (kekasih, orangtua, lingkungan, pekerjaan, kantor). Biasanya yang paling banya menulis surat cinta itu lebih besar. Sebenarnya ada konsep yang belum dijalankan, dalam bentuk siapa yang jadi Creporter of the month nanti kita beri uang. Misalnya Bank Mandiri memberikan reward, tapi belum jalan. Di PPWI juga kita baru mencoba melakukan hal2 seperti itu. Namanya Citizen journalismist, punya basic ekonomi masing2, kalau ada artinya dia mendapatkan sesuatu disitu dia baru bisa jalan, memang hal2 seperti itu masih sulit.

Yang leading HOKI, kalau Panyingkul kendalanya dia lokal, yang sekarang trend itu Wikimu akrena dia luas tapi batasannya akademis.

Saya kira Citizen reporter tidak mengharapkan hal2 seperti itu, kalau dapat syukur kalau tidak saya sudah puas, berita saya masuk.

Ada azas2 jurnalis? Wiki kan membatasi

Kenapa tidak, karena konsepnya kan memberi keleluasaan kepada setiap orang, kecuali kalau hanya profesor doktor saja yang boleh, orang2 tertentu saja yang boleh, itu bisa kita katakan semi. Ketika semua orang bisa.

Sistem editor itu lebih substansi.

Di sistem Jurnalisme Warga juga kita punya etika, kita punya koridor2 yang menjadi panduan warga untuk melaksanakan aktifitasnya, bukan tugas. Kalau wartawan ada

sangsi2 hukum yang lebih ketat, di kita tidak kita hanya sebagai Kompas, kalau salah kompas ya kamu kecebur.

Terima kasih untuk wawancaranya.



## Wawancara Pepih Nugraha (Kompasiana) => 21 April 2009

T: Awal mula konsep *citizen journalism*?

P: Awal dari berdirinya suatu situs *citizen journalism* yang disebut Ohmynews.com pendirinya Oh Hyeon Hoo, dia dulu sebenarnya seorang wartawan mainstream/jurnalis profesional (seperti saya) yang bekerja di sebuah majalah berita. Pada suatu waktu dia meneliti suatu kuburan massal, yang diindikasikan bahwa di tempat itu dulu pernah ada pembantaian massal oleh Amerika. Dia menggali informasi, cari bukti2, wawancara dengan saksi mata juga dengan beberapa korban lalu menuliskannya di majalah, memang dimuat tapi tidak membawa gaung yang besar, tidak berpengaruh. Entah itu mungkin majalahnya, padahal majalah itu cukup dikenal kalau disini itu seperti Tempo, dan dia menjadi sakit hati ketika ada wartawan Amerika yang menulis berita itu dan dia mengutip dari majalah itu lalu menjadi terkenal ke seluruh dunia. Barangkali secara tidak sengaja dia (Oh Hyeon Hoo) melawan, lalu dia berinterospeksi, merefleksi diri, kenapa ini bisa terjadi?, apa penghargaan saya sebagai jurnalis mainstream terhadap suatu peristiwa yang saya tulis betul2 tapi tidak dianggap, lalu ada sebutan Parasut Journalist (orang yang diterjunkan dari kapal, menulis berita lalu pergi), dia keluar dari tempat ia bekerja lalu at the time sedang terjadi booming internet di Korea tahun '92. Dia mulai mengakrabi tapi tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pada saat itu blog belum begitu mewabah, peristiwa terjadi ketika dia mulai mengutak atik, memiliki sebuah portal, ibaratnya hanya memindahkan print menjadi bentuk online. Pada saat itu terjadi kudeta, koran2, media massa dikuasai oleh pemerintah, akses rakyat terhadap media yang benar2 independen itu tertutup ...mahasiswa bergolak, terpikir kenapa ngga bikin wadah saja, lalu dia wadah dengan yang kemudian disebut Ohmynews.com, dari situ dia bikin sbuah pertal berita yang awalnya berisi laporan2 mahasiswa yang sedang demo, kebetulan rakyat Korea makin mencintai internet karena ada alternatif pemberitaan. Karena yang namanya baca koran isinya sama, versi pemerintah. Demo mahasiswa perlu ditindak, direfreseh. Bagaimana mahasiswa tersekap dikampus, dipukuli aparat, jadi lebih hidup.

Lama2 Oh Hyeon Hoo tidak hanya mengembangkan peristiwa2 yang bersifat politik, tapi labih luas.

UGC (User Generate Content) intinya adalah konten dalam hal ini adalah berita/foto yang dikirim atau dicreate oleh si para pembacanya itu sendiri, itu sudah istilah baku, UGC. Atas dasar itu, yang semula dari mahasiswa jadi diperluas ke warga, petani, ibu rumah tangga. (6) Cjist mulai ada.

Kalau disebut perlawanan ya memang pada saat itu memang merupakan perlawanan terhadap media massa mainstream, sebagai bentuk rasa dendam di dalam diri Oh Hyeon Hoo, dendam kepada media2 mainstream yang dianggap sok tahu, satu arah, menggurui, dan mengarahkan. Sementara masyarakat menurut Oh Hyeon Hoo masyarakat Korea pada saat itu sudah terdidik, sudah tidak bisa diarah2kan lagi, dan butuh media alternatif. Akhirnya berkembanglah yang disebut CJ.

Apa yang diberitakan oleh CJ sebenarnya tidak melulu berita yang sifatnya straight news, atau peristiwa hot news, kayak ada peristiwa tabrakan, bencana, itu kan straight news. Tapi juga bisa menggali sendiri. Misalnya kesehatan ibu dan anak, ini kan peristiwa penting tapi tidak diliput oleh media2 massa mainstream, kalau mengangkat isu tentang posyandu, mana orang mau baca, lebih bagus ya berita presiden, lebih seksi, politik. Sementara berita2 yang oleh pemerintah atau koran2 besar yang dianggap tidak

penting, itu yang disajikan(8) Jadi berita2 dari warga itu bisa jadi tentang siskamling, selokan mampet, kematian seorang anak, yang ecek2 apapun yang ada disekitar masyarakat, jadi berita itu sangat2 lokal. Karena Diseluruh dunia itu tidak ada berita internasional, yang bikin dia internasional itu penamaan (nomenklatur) yang diberikan oleh medianya sendiri atau editor. Katakanlah kejadian Boval, meledaknya reaktor nuklir Boval, itu kan berita lokal India, menjadi berita internasional karena orang menagnggapnya itu sebagai sebuah berita internasional. Padahal itu berita lokal India, All News Is Local, jadi kenapa orang lokal tidak punya berita. Persoalannya kalau kita mau menanam investasi utnuk bikin koran cetak disitu, menjual npada masy.lokal belum tentu masyarakat lokal mau, itu contoh Amerika dan Korea.

Jauh2 sebelumnya ada yang namanya Night raider, yang mencoba menciptakan sebuah situs yang berbasis UGC. Tapi yang paling fenomenal dan situs yang paling terkenal Ohmynews.

Kalau dibilang perlawanan terhadap MM memang iya (di Korea), itu semangatnya. Harus diadakan di Indonesia, apakah menjadi perlawanan terhadap MM, pelengkap, atau bisa bekerja sama? Tapi itulah sejarah lahirnya CJ

T: di Amerika itu perlawanan thd pemilihan presiden (1988). Apakah Indonesia mengadopsi?

P: Sangat. Semuanya by accident, (11) Pemerintah dalam hal ini lebih percaya masyarakat daripada omongannya wartawan, di Amerika juga pada saat itu begitu. Karena ketidakpuasan media mainstream mengangkat hal2 kecil (12). Kami kekurangan kertas suara, etc. Yang bagi koran gede lebih penting hasilnya siapa yang jadi presiden. Jadi intinya menurut saya yang namanya CJ itu memberitakan hal2 sepele, hal2 kecil yang dianggap ngga penting, tapi berguna bagi masyarakat. Daripada berguna tapi ngga penting. Soal tidak penting, saya mau cerita CJ di Singapura, disana ada koran namanya Straight Time, dia punya on line, punya versi lainnya, tapi dia juga punya 1 situs namanya STOMPer (Straight Time Online...) intinya dia UGC. Stomper menjadi fenomenal karena hitnya orang yang masuk bisa mengalahkan ... (13) ternyata dia memang merakyat, dia dari, oleh, dan untuk rakyat. Apa yang bikin dia menarik? Yang saya tahu, pernah ada sebuah kejadian seseorang melalui kamera handphone memotret sebuah rumah yang ada penampakan, tapi di singapur disebut Pontianak (Kuntilanak), di Stomper itu masuk berita utama (Headline), ini berarti masyarakat senang membaca berita dari masyarakat, itu bukan ditulis oleh wartawan. Padahal masy.Singapur itu bukan masy yang mistis. Mungkin penyajian bahasanya, fotonya, dll.

Saya bergeser ke Digg.com, portal berita yang juga dibikin oleh warga, dibikin oleh Kevin Rose (17 tahun), dalam waktu yang lebih singkat dibanding kerajaan bisnis yang dibangun pak Jakob selama 50 tahun. Sifatnya UGC juga.

Suatu saat pernah ada orang dari negara pecahannya unisoviet, mengirim suatu artikel ke digg.com, ecek2, disuatu tempat itu ada kambing yang hidupnya di pucuk2 pohon tinggi. Dipotret. Tapi reaksi di Digg, banyak yang berdiskusi...komentatornya dari profesor sampai anak SMP. Artinya ini demokratis banget, memadukan pemikiran dari semua kalangan terhadap hal yang sama... dan itu bukan dibikin oleh wartawan media mainstream/profesional jurnalis, tapi oleh warga biasa. Stomper juga sama, disaat ada seseorang yang mempostingkan orang lagi ciuman, sebenarnya dilarang tapi ada aja yang melanggar, dan itu ada yang foto kemudian menjadi berita yang heboh banget. Medianya udah dikenal, dicintai orang, apa yang dipostingkan semuanya menarik.

Saya jadi berpikir tentang konsep berita, jadi berita itu apa. Kalau pola/teori lama, yang namanya berita itu penting, menarik, mungkin bermanfaat. Mungkin kalau dalam

konteks kekinian, kalau yang penting2, ok lah itu gilirannya jurnalis MM, misalnya orang pingin tahu harga bensin naik, ya baca di koran, itu yang penting2. SBY ngomong apa sih, baca di koran, itu yang penting. Tapi jangan lupa, masyarakat juga butuh informasi yang disebut berita yang menarik dan bermanfaat buat dia. Menarik tidak bisa dijabarkan bahwa itu penting. Jangan memaksakan masyarakat itu dikasih yang penting2, masyarakat perlu juga yang menarik. Kenapa infotainment menjadi laku, karena ngga penting. Kesadaran ini yang digugah oleh masyarakat sendiri. beda testimoni kalau seorang artis yang ngeblog...di Amerika hampir semua artis ngeblog. Kita aja belum sadar. Jadi konsep menarik jangan diabaikan, juga bermanfaat. Berita itu harus bermanfaat, misalnya terjadi perampokan di lokal...menarik dan bermanfaat ini yang juga pola yang diabaikan oleh media2 massa mainstream, yang MM itu yang penting2 aja, padahal penting belum tentu menarik (23). Menarik itu ....penting, tapi penting bagi sebagian orang...Jadi relatif, berita ecek2, tidak seksi di mm  
Tapi bagi warga sekitar ini menjadi berita besar karena menyangkut kepentingan bersama. Jadi dengan Dan Gillmor menyebutkan bahwa We Media itu mengisyaratkan bahwa, kami juga punya media, kami juga bisa bikin berita di media kami, itu intinya. Jadi jangan abaikan yang disebut We Media itu.

T: Terkait unsur demokratis → Public sphere – Habermas

P: Ruang dan waktu, Habermas mungkin lebih ke ruang tapi waktu juga penting karena, kalau saya contohkan misalkan waktu, pernah terjadi bom di London 2005, saat itu ada seorang yang berada di tempat kejadian stasiun bawah tanah menggunakan kamera smartphone, merekam video, memperlihatkan bagaimana kepanikan orang, tetapi itulah gambar yang paling berbicara kemudian dimasukkan ke blog, dari blog kemudian BBC televisi menayangkannya berulang-ulang karena dianggap itu gambar yang paling hidup. Kita waktu itu berpikir, ini kan masalah konsep waktu, pada saat itu barangkali jurnalis media massa mainstream pada saat yang sama mungkin hanya dapat mengungkap bagaimana polisi dengan ambulans, mengatur lalu lintas, kejadiannya kan dibawah tanah. Wartawan mediamassa mainstream punya kendala waktu untuk sampai ke lokasi. Gambar itu menjadi mengalahkan yang lain2.

Soal ruang, waktu terjadi tsunami, gambar yang ditayangkan metro tv paling berbicara, paling hidup, dan itu video amatir. Begitu pula bom Mumbai, dikirim ke Twitter, seperti micro blog. Itu yang paling banyak diakses. Kalau beritanya memang berita Shari-ism, sekarang bukan jurnalism lagi, itu menjadi sebuah konsep yang kini berkembang

T: apakah ini sbagai ancaman?

P: Kalau menurut saya ini bukan sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan, dalam pengertian, kalau kita anggap itu ancaman berarti kita memposisikan diri sebagai lawan. Kenapa ngga dirangkul? Kalau kita punya konsep, rangkul aja. Bagaimana Kompas merangkul itu, ada Kompas.com, mykompas, isinya UGC (Koki, Kompasiana, Forum) intinya berbasis dari kita, untuk kita; disini Shari-ism yang menarik. Kalau di jurnalism penting. Metro tv punya i-witness, CNN juga punya i-report.

T: Beda Forum dan KoKi, Kompasiana

T: Mahasiswa melaporkan melalui media internet, gerakan bawah tanah pada saat Orba, dulu mm dikekang kemudian kemunculan CJ gerakan bawah tanah kah? Terkait situasi politik?

P: Alternatif media, kalau kita bicara tahun 94-96, pernah ada majalah lokal "Independent", majalah gerakan bawah tanah karena disebarakan secara diam2, isinya perlawanan terhadap Soeharto, penulisnya jelas, bailand-nya jelas. Yang disembunyikan adalah alamat. Isinya terhadap Soeharto, bukan oleh warga tapi oleh penggerak pers / wartawan yang sekarang beberapa wartawannya mendirikan AJI, kita tidak bisa mengatakan sebagai perlawanan warga tapi alternatif media, warga pada saat itu ibaratnya kalau jarum suntik, massa itu yang tidak berdaya, hanya disuntikkan oleh berita2 pemerintah, tidak ada kuasa melawan, tidak ada alternatif media. Sebelum tahun 98 kita belum akrab dengan blog, internet, dll.

Jadi itu media alternatif, karakteristiknya siapa yang membuat, kalau misalnya KAMMI, Indonesia Raya, independent, karakteristiknya siapa yang membuat, kalau misalnya Kammi, Indonesia Raya, independen itu yang buat adalah wartawan bukan warga. Berbeda dengan konsep kalau yang ngisi itu warga. Konsep CJ itu ada karena ada online, dulu jangan harap ada warga masyarakat bisa ngirim berita lalu kemudian dimuat. Dalam batas2 kecil ada istilah LPPE (Letter....), kalau Kompas punya Redaksi Yth, itu kan dari warga, surat pembaca itu kan dari warga, walaupun isinya keluhan kadang berita. Kompas yang besarnya sekian halaman cuma menampung berapa, tidak semua bisa tertampung, selected, kalau dia sudah selected, berarti dia sudah melalui tangan2 editor. Artinya masyarakat berpikir, wah ini sih sama juga disaring. Coba kalau seandainya warga punya, entah itu penting atau tidak paling tidak bisa dimuat kan sudah senang, jangan dibatasi. Tapi kalau di koran karena kalau tidak mau meneliti yang ditolak dan yang tidak, sehari bisa berapa puluh yang ditolak, ngga semua dimuat. Nah online bisa memuat semuanya.

Kalau di online ada yang namanya Term Of Reference (TOR) yang ditentukan oleh redaksi hanya sebagai pembatasan aja, karena sebebaskan-bebasnya kita tetap kita punya etika dan etika itu universal. Di setiap negara itu berbeda2, karena kita untuk pers memang terkait dengan uu yang ada, tapi kalau disini standard aja, dan juga membatasi diri sendiri. Ada nilai2 umum yang mengatur dan itu universal. Dalam dunia online itu disebut Netiquette. Bukan etika, tapi lebih menyangkut sopan santun. Kalau dibidang dulu pernah ada memang itu media alternatif tapi bukan dari warga, sebagai counter hegemoni terhadap pemerintah yang berkuasa. Lalu masyarakat ditawarkan sebagai media alternatif, tapi itu kan smebunyi makanya disebut underground.

T: Apakah saat ini ada media yang sbg perlawanan thd MM

P: Perlawanan media online terhadap MM. Pertanyaannya buat apa, kalau saya melihat ngga ada perlunya, sekarang eranya berkompetisi, menarik minat masyarakat. Karena misalnya kita bilang di online jangan baca print, banyak orang yang tersinggung. Ada "Say No to Megawati" saya menentang habis2an, dan saya juga ditentang habis2an. Ini berkaitan dengan etiket. Kompas.com hadir untuk melengkapi Kompas print, bukan untuk melawan. Misalnya ada Kompasiana, KoKi, ini untuk melengkapi Kompas.com. Sekarang masy. Diberi kesempatan untuk memilih, kembali ke masyarakat sendiri, mau informasi penting, menarik, bermanfaat atau apa pun, kita sediakan. Jadi sia2 untuk melawan.

T: Wartawan sempat merasa terancam?

P: Kedepan ini sebenarnya shari-ism bukan lagi jurnalism, masyarakat senang berbagi tentang jurnalistik. Dulu Aktadiora. Dulu yang namanya berita koran, mengumumkan hal2 yang spesifik banget, awalnya dari berita pelabuhan, lama2 ngga cukup di sekitar juga ada keperluan lain, jam berapa kapal berangkat, dll, itu awalnya. Memang ngga perlu dilawan, kita rangkul aja. Kalau ada istilah not war, make club. Kenapa kemudian

harus dipertentangkan, mana kekuatan2 dari masing2, bisa digabungkan. Di paris dan belanda orang sudah mengkonversi buku menjadi kindle (buku elektronik), dimana satu buku itu bisa menampung 200 judul buku, dia bisa internet juga. Kalau di Jerman, orang baca buku tebal, baca koran itu masih berlaku, kita tidak mencemooh mereka, ini hanya masalah kebiasaan saja. Jadi print juga bukan masa lalu. Walaupun si Phillip Meyer meramalkan tahun 2043 sudah tidak ada lagi kertas, tapi saya kira dalm batas2 tertentu masih saja ada.

Di London ada Christian Science Monitor, yang awalnya punya koran print tapi secara beralih ke OnLine.

P: Kalau Forum, sifatnya untuk diskusi, kita menciptakan trade2 sendiri tapi harus register, jadi dikelompok2an. Ada popularitas talk to Megawati, bahannya terserah, boleh juga dari Kompas.com, namanya Forum ngga ada editor atau apapun, masuk aja. Ada istilah bahwa percakapan adalah berita, dan ini gw banget. Dan kita bisa menciptakan trade macam2, satu postingan itu namanya trade. Kolom KoKi, ini semua dari warga, ngga ada yang wartawan punya. Dan beritanya dahsyat2, sama seperti koran. Mana dari koran kita nemu yang begini2 (57) Kompasiana nanti akan seperti KoKi. Beda agama misalnya, kalo di Kompas ngga mungkin kita tulis soal beda Agama.

Shari-ism, saya mengajak sharing orang, dan bukan sok tau. Konsepnya shari-ism, jadi kita setara dengan warga. Saya memang jurnalis profesional tapi saya juga berperan sebagai warga.

Orang dikasih kesempatan seperti ini, pasti mau.

Jurnalis pun perlu ngeblog, karena ngga puas kita nulis di koran sendiri. kalau saya nulis di koran 6000 karakter, dipotong 3000 karakter oleh editor saya, ngga sopan kan. Jadi memang terlalu rigid, terlalu ketat. Kalau di blog kan ngga.

Kalau facebook di ... (01:01:50), say no to megawati. Kalau itu permusuhan dong namanya. Jadi intinya dari eranya itu kita bisa melihat apa sih yang disebut CJ termasuk sharing2nya, ada manfaat yang bisa didapat.

22 Oktober 2008 peluncuran versi betanya, kalau versi Alphanya September 2008.

P: iya kalau dibilang perlawanan terhadap market/gov. artinya perlawanan karena tidak diberi kesempatan, padahal ingin tampil. Perlawanan dalam pengertian tidak melawan kepada pemerintah (01.09.46), perlawanannya secara cerdas.

Di indonesia CJ mulai berkembang sejak booming internet, karena cj tanpa internet/on line nggamungkin terjadi. Semua memanfaatkan internet. Radio Elshinta juga CJ, utamanya lebih kepada berita dari warga, bukan kutipan dari si wartawannya sendiri.

Ternyata CJ ada yang gagal juga karena MODAL, dia bingung memodifizenya seperti apa?. Kalau kita misalnya katakanlah Kompasiana itu juga pakai modal, bandwidthnya, creatornya, segala macemnya. Pasti ada modal yang harus dikeluarkan, sekarang persoalannya kalau dia sudah mengeluarkan uang banyak tapi ngga ada pemasukan akhirnya tutup kan. Nah rupanya satu telaah lagi ketika dia bagaimana memo... (01;24:18) dari CJ, nah itu harus belajar dari Oh Mynews.

T: Apakah para jurnalist warga tersebut bisa memperoleh penghasilan atau honor dari tulisan-tulisan mereka yang dimuat oleh media massa mainstream?

P: Awal2nya Ohmynews itu penulis dikasih honor, tapi karena krisis keuangan ngga dikasih lagi, tapi tetep banyak yang nulis karena kebutuhan orang untuk sharing. Saya menulis di tisu bukan untuk mencari uang.

Kalau blokir2 gitu terjadi di negara Iran, Syuriah, Cina. Ada kasus2 seperti itu, di cina terutama, kalau apa2 dia main tutup aja.

Faktor utama tetep Modal, karena untuk menampung sekian banyak berita. Kalau panyingkul bisa survive karena sumbangan warga.

Tentu tetep pakai SW 1H, karena kalau kita melaporkan berita tetep ada SW1H, walaupun tidak diajarkan itu secara otomatis, warga tidak sebodoh itu. Kaidah2 itu tetep ada, Cuma yang membedakan itu niali berita. Nilai berita itu kalau untuk koran umum (teori umum) ada Proximity, besaran peristiwa, prominent people- menyangkut orang ternama, ...kemudian yang penting menarik, konflik, human interest. Tapi kalau unsur2 CJ itu unsur itu sudah pasti akan menceritakan hal2 yang disekitar dia. Ngga penting itu proximity, menarik buat dia. Konflik, kalau di dalam berita itu bisa berita partai, berita tnp konflik ya seperti pamflet aja. Mungkin di CJ konflik ada, misalnya masalah selokan, warga melaporkan ada selokan, tapi pak rt, nah itu sudah konflik tuh. Secara tidak sengaja mereka juga bikin, tanpa harus kita ajarin.

Bagaimana cara mengasah jiwa kewartawanan bagi warga, dia harus care sama lingkungan sekitar. Mau tau, care thd lingkungan sekitar, dan skeptisnya tinggi, dia ngga percaya begitu aja. Jaman dulu orang nulis di catatan harian, sekarang ada blog = catatan harian versi online.

Menjadi subyektif antara penting dan menarik.  
Pokoknya tidak terikat ruang waktu

### Transkrip Pak Daniel Dhakidae

T: Berkembangnya konsep CJ. Melalui perkembangan teknologi internet semua orang sudah bisa mengirimkan berita. Apakah sbg ancaman bagi media konvensional atau media alternatif?

D: Media Massa selalu melihat perkembangan media komunikasi sebagai ancaman, dari dulu sampai hari ini. Televisi muncul, ancaman, jangan-jangan mulai sejak radio muncul ancaman, komputer muncul ancaman, fax ancaman. Sekarang internet juga ancaman, sms ancaman. Jadi saya tidak pernah mengerti psikologi media cetak, selalu merasa terancam, bahwa seluruh dunia ini adalah ancaman. Padahal meskipun televisi hadir tapi oplah koran tetap tinggi, New York Times, Kompas 500 ribu oplahnya. Jadi yang namanya harus dipertanyakan itu adalah mental blog dari para penerbit surat kabar cetak yang melihat seluruh dunia sebagai ancaman, tiba2 ada yang menyelamatkan dalam pengertian ternyata televisi bukan ancaman tapi komplementer, radio bukan ancaman itu komplemen, dan seterusnya sampai internet. Tetapi dengan munculnya internet merupakan ancaman mulai lebih serius. Karena internet juga menulis, kalau tv tidak. Dan dalam komprehensif dalam penulisan jauh lebih hebat, karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dua hal ini merupakan ukuran yang paling serius dalam kehidupan ini, dan kalau internet mampu mengatasi dua hal ini sudah sama dengan Allah SWT. Karena itu Google itu God.

Semua yang dibikin di koran bisa dibikin di internet, menulis sekian puluh halaman lebih hebat di internet, tidak terikat oleh space, iklan jauh lebih hebat, lebih mobile. Dari dulu setiap waktu setiap publisher merasa terancam. Tapi ancaman yang paling serius adalah internet.

Dan sebegitu seriusnya ketakutan para publisher sampai-sampai pemilik New York Times menyebutkan bahwa tahun 2012, kita mengalihkan perhatian seluruh atau sebagian besar pada New York Times Online, sehingga keberadaan New York Times cetak tergantung pada perkembangan saja. Kalau memang mau hancur, dia sudah siap untuk hancur, kalau mau dibubarkan dia siap, tetapi seluruh perhatian sudah diarahkan ke online. Begitu juga dengan Kompas disini, dengan kehadiran Kompas.com.

Internet memang mengubah seluruh pemikiran, seluruh style di dalam jurnalistik sendiri, bukan hanya penampilan tapi juga essence dari journalism itu juga berubah dalam pengertian tidak ada lagi penerbit. Kita sebut blog, facebook, macam2 yang ada di internet, sekarang ada juga twitter. Semua ini jelas saja suatu dimensi baru yang tidak pernah dibayangkan bahkan 10-15 tahun lalu. Dia mengubah benar2 the essence, yaitu semua menjadi jurnalis, siapa aja yang punya hp bisa mengirimkan berita. Jurnalisme bebas, tidak lagi harus terikat oleh piramida terbalik, segala jenis berita dan tulisan itu diterima sebagaimana adanya dan tidak lagi dituntut orang ini direkrut oleh siapa. Berita sendiri sudah menjadi sesuatu yang benar2 berubah karena makin dekat ke real time.

T: Nilai berita sudah berubah, kalau Kompas ada hirarki dari editor, redaktur, pengiklan. Nilai berita yang terkandung bgmn?

D: Nilai berita ini kan macam2 dengan...apa itu newsworthy, layak ngga menjadi berita. Kedua, kalau itu layak, mengapa lalu dipersoalkan sumber ini reliable, kredibel. Jurnalisme tradisional masih dipersoalkan bagaimana cara orang menulis, dan itu dilewatkan. Informasi menjadi jauh lebih penting dan manfaat dari informasi itulah yang

lebih menjadi persoalan. Artinya informasi itu lebih penting daripada persoalan struktur, kredibiliti. Bukan berarti ini tidak kredibel, tapi kredibiliti ini sudah dimantapkan sebegitu rupa sampai yang lebih penting kemudian apa berita yang disampaikan itu benar adanya. Nilai kebutuhan saat itu jauh lebih tinggi.

T: CJ di Amerika sbg bentuk perlawanan tahun 1988 (Reagen masa kedua). Kemunculan di Indonesia apakah sebagai bentuk perlawanan terhadap media mainstream?

D: sama sekali tidak, karena perlawanan itu kan sesuatu yang disengaja, sedangkan di Indonesia bukan sebagai sesuatu. Dugaan saya perkembangan yang paling serius itu karena teknologi. Tapi kalo dibidang CJ itu sebagai bentuk perlawanan bisa aja (19) pada masa Orde Baru, kalau pamflet dianggap sebagai perlawanan, meskipun menurut saya...penerbitan2 "gelap" yang dalam klendeistein (tersembunyi) kalau itu dimaksudkan jadi sedikit berbeda pengertian karena disitu jurnalisme terbatas di kalangan aktivis, kalnagan yang tertindas, dst. Kalau dalam pengertian itu bisa saja kalau dianggap perlawanan. Tapi sedikit berbeda pengertiannya karena dalam hal ini dia tidak terbuka dalam pengertian tidak semua orang punya akses disitu, yang punya kan mahasiswa atau siapa saja yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Kalau dia menulis disitu berarti kan tingkat intelejensinya tinggi, terpelajar, punya kesadaran tinggi, tapi dia sangat2 terbatas. Sedangkan ini kan tidak terbatas, semua orang yang bisa baca tulis bisa. Jadi memang teknologi komunikasi yang merevolusikan seluruh konsep yang disebut sbg CJ, semua orang jadi jurnalis tidak terbatas pada aktivis, semua orang menjadi sumber berita tidak terbatas pada orang yang punya kseadaran ideologi tinggi. Semua orang bisa menjadi pembawa berita juga tidak terbatas pada orang2 yang punya kemampuan khusus. Malah di twitter itu lebih aneh lagi, berita menjadi hanya dua kata, satu kata, sudah cukup. Tapi sudah memberikan informasi yang besar untuk difollow-up diujung lain. Baik ujung itu koran, polisi, siapapun.

T: Kalau di Kompas ada Kompasiana, ada KoKi. Kalau di Kompasiana wartawan lebih bebas menulsikan fakta. Hal itu menarik bahwa wartawan sbg citizen, apakah fenomena itu muncul sbg ketidakpuasan sebagai jurnalis karena ada hegemoni.

D: tapi ini kan sebagai kelanjutan dari blog, tidak ada dari segi teknologi bukan perkembangan baru, dari segi pemanfaatan juga bukan suatu yang baru. Malah disini masih sangat msikin, dalam arti satu blog paling tinggi 30 orang yang komentar, rata-rata hanya 1 atau 2. Kalau membaca New York Times, bisa 600. Tingkat penyebaran komputer di sana juga jauh lebih hebat. Dikita lebih banyak dikantor2, belum dirumah, infrastruktur komputer di kita masih sangat terbatas. Tetapi blog itu dengan sendirinya. Berbeda dengan CJ, blog itu ada satu sumber, orang bereaksi terhadap sumber itu, sedangkan CJ itu kan tidak ada kepastian dimana sumber itu, semua orang menjadi sumber, semua orang jadi jurnalis itu sendiri. dari mana ujung pangkalnya tulisan seseorang.

Iklan sebetulnya yang akan mencari kesempatan.

Blog ini berbeda, dia mengundang orang lain untuk komentar, jadi pada satu sisi kelihatan sangat modern tapi di sisi lain sangat tradisional karena dia tidak menyebar. Beda dengan orang yang punya hp, semua menjadi sumber dan bukan sekedar omong. Coba kita liat pemilu ini, semua ngomong dari ujung mana ke ujung mana. Palembang melapor ke kupan-manado-jakarta, semua jadi sumber. Siapa yang menang di medan, saya ngga perlu tunggu KPU meskipun KPU jadi sumber resmi ya tapi saya bisa tau lebih dulu. Antara hp dan hp disana menjadi sumber saya menjadi penerima, dan sebaliknya. Jadi setiap sumber dan receiver menjadi satu, sedangkan blogger kan ngga, blogger ini satu

